

1303144

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN FLORES TIMUR
(Studi Tentang Peran Pemerintah dan YASPENSEL dalam Pengembangan
Usaha Kecil di Kelurahan Sarotari dan Weri Kecamatan Larantuka)

T E S I S

Untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Magister



PERPUSTAKAAN PUSAT
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

TES
 658.3
 RAY
 p
 2004
 k.1

Oleh :

ANTONIUS LEBI RAYA
NIM. 0221100031

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN MANAJEMEN PUBLIK

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2004



MILIK
PERPUSTAKAAN
 Universitas Brawijaya



0400614

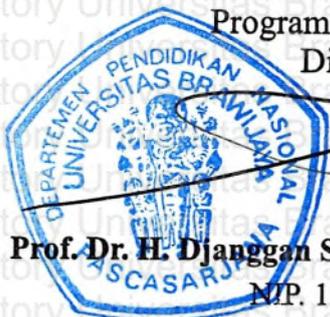
T E S I S

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN FLORES TIMUR**(Studi Tentang Peran Pemerintah dan YASPENSEL dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Kelurahan Weri dan Sarotari Kecamatan Larantuka)**

Oleh

ANTONIUS LEBI RAYA

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 30-09-2004
dinyatakan telah memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,**DR. Sumartono, MS****Ketua****Drs. Andi Yuli Gani, MS****Anggota****Anggota****Malang, 30 NOV 2004****Universitas Brawijaya
Program Pascasarjana
Direktur,****Prof. Dr. H. Djanggan Sargowo, dr, SpPD, SpJP (K)**

NIP. 130 531 873



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 4 Oktober 2004

Mahasiswa,



Nama : ANTONIUS LEBI RAYA
NIM : 0221100031.....
PS : ILMU ADMINISTRASI
PPSUB





RIWAYAT HIDUP

ANTONIUS LEBI RAYA, 23 Oktober 1965 anak dari ayah Linus Lanang Kenale dan Magdalena Uba Ola, SD sampai SMA di Larantuka lulus SMA tahun 1985, studi pada Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 1993. Bekerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 1995 – sekarang.

Malang, Agustus 2004

Penulis



*Karya Ilmiah ini kutujukan kepada
Ayahanda dan Ibunda (Alm.) tercinta,
dan istriku tersayang
Ilona Fernandez*



RINGKASAN

ANTONIUS LEBI RAYA, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 30 September 2004. Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Flores Timur (Studi Tentang Peran Pemerintah dan YASPENSEL dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kelurahan Weri dan Sarotari Kecamatan Larantuka). Komisi pembimbing, Ketua: Sumartono, Anggota: Andi Yuli Gani.

Secara makro perekonomian bangsa ini mendapat guncangan hebat oleh krisis ekonomi pada tahun 1997, bangunan dan struktur perekonomian bangsa ini terbukti amatlah rapuh dan nyaris ambruk. Namun sektor usaha kecil dan menengah masih tetap bertahan hidup serta menjadi pilihan kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu katup penampung masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Fakta inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan salah satu penyangga penting dari konsep ekonomi kerakyatan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam di Kabupaten Flores Timur.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, dilakukan kajian teoritik baik yang berasal dari temuan hasil penelitian terdahulu maupun dari konsep-konsep yang mendukung kerangka pikir, yaitu konsep pemberdayaan, peran pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan suatu fenomena tertentu dari sekelompok kecil individu dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka membuahkan hasil yang berbeda. Mekanisme dan proses pemberdayaan yang diterapkan pemerintah masih bersifat sentralistik. Masyarakat diposisikan sebagai obyek yang harus dibangun. Sebaliknya mekanisme dan proses pemberdayaan yang diterapkan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL), yakni menggunakan pendekatan 'pembelajaran bersama', dimana masyarakat diberi wewenang untuk merumuskan sendiri, melaksanakan dan menilai programnya sendiri, serta diposisikan sebagai pelaku utama pembangunan.
2. Iklim usaha yang kondusif dan kemudahan dalam memperoleh bantuan modal merupakan faktor pendukung di dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi kualitas Sumber daya Manusia masih rendah dan masih sangat kuat terikat pada tradisi dan adat istiadat setempat.

Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kecil hendaknya pemerintah menciptakan regulasi yang mendorong kelompok tumbuh apa adanya serta melaksanakan diklat-diklat khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan



ketrampilan. Dalam hal ini Pemerintah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat hendaknya berperan sebagai motivator dan animator yang dapat diandalkan. Di samping itu, pemerintah dan LSM, perlu membangun kerjasama melalui 'sharring program' pemberdayaan yang saling menguntungkan, seperti dengan: (1) melakukan pemetaan wilayah miskin dan indentifikasi masyarakat miskin menurut tingkatannya, serta menentukan prioritas dan sasaran bersama; (2) adanya visi dan komitmen bersama mengenai pentingnya pendidikan/latihan dan bantuan modal dalam upaya pengembangan usaha kecil; 3) masyarakat perlu 'bukti' bukan program 'kosong'. Oleh karena masyarakat umumnya hanya mau diyakinkan atau mau ikut berpartisipasi secara aktif, kalau program-program pemberdayaan tersebut berguna / bermanfaat bagi mereka. Maka di sini perlu ditunjukkan 'bukti' keberhasilan program tersebut di tempat lain.

Ini merupakan salah satu alternatif 'model' pemberdayaan masyarakat, yang bila diterapkan secara sungguh-sungguh akan sanggup membangkitkan 'semangat' dan 'keyakinan' masyarakat untuk mengelola potensi sumberdaya lokal yang tersedia demi peningkatan taraf hidup mereka.



SUMMARY

ANTONIUS LEBI RAYA. Post Graduate Program of Brawijaya University, September 30th, 2004. Empowerment of Societies at the East Flores Regency (Case Study of Small Business Development at the Weri and Sarotari Villages, Larantuka District, East Flores Regency). Supervisor: Sumartono, Co-Supervisor: Yuli Andi Gani.

In macro-level the country's economics encountered turmoil, it is caused by the economic crises in 1997. It implies that the country's economic structure is so weak. However, small and middle-scale businesses keep alive and become main choices of economic activities. They also become places which accommodate working problems in Indonesia. Then, the fact results in an assumption that small and middle-scale businesses become important pillars in the popular economic concept.

The research was conducted to describe and analyze the empowerment of society in the small-scale business development through Collective Saving-Borrowing Activity (Usaha Bersama Simpan Pinjam) in order to improve the social life standard. It also wants to describe and analyze factors, both supporting and impending, the empowerment of societies in the small-scale business development through Collective Saving-Borrowing Activity at the East Flores Regency.

To handle research's issues, the researcher conducted a theoretic analysis including findings of previous studies and concept supporting the framework, namely concept of empowerment, and government and non government organization's roles in the development. The research used the qualitative approach in describing certain phenomenon on small groups of individuals and societies.

The results show that:

1. The empowerment of societies in order to increase small-scale business through Collective Saving-Borrowing Activity supported by government and Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Larantuka Social-Economy Development Foundation) has different results. However, the Larantuka Social-Economy Development Foundation implements the collective learning approach, in which societies have authorities in formulating, implementing, and evaluating their own program, and they are taken as subjects of development.
2. Conducive business climate and ease in seeking capitals are factors supporting the small-scale business developments through Collective Saving-Borrowing Activity. Meanwhile, the factors constraining the program are lack of qualified human resources and the strong effects of local traditions and customs.

To ensure the successful small-scale business development program, the government should make supporting regulations and holds special courses to improve knowledge and skills. In the case, the Government and Non Government Organization should serve functions as the reliable motivator and facilitator. Besides, government and Non Government Organization should create a sharing program, that is, mutual-benefit empowerment by: (1) mapping poor area and identifying the levels of poor community, and identifying priority and target; (2) acquiring mutual vision and commitment toward the education/training



importance and capital loan to improving small scale business; (3) understanding that community need not promises but a real action. Because community will take an active participation only if they can take advantages from the empowering, good proofs should be presented.

It is alternative of community empowering model, should it is applied accordingly, will raise the spirit and belief of community to manage their local resources available in order to improve their economic standard.



KATA PENGANTAR

Karya ini dikerjakan dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar magister pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Karya ini tidak dapat dibanggakan sebagai sesuatu yang sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis dalam ilmu, maupun dalam cara menuangkan ilmu tersebut dalam bentuk tulisan.

Namun, terlepas dari keterbatasan tersebut, penulis merasa patut bersyukur karena berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, usaha-usaha yang tekun akhirnya dapat selesai pada waktunya.

Karya ini adalah hasil dari sekian banyak ide dan sumbangan dari berbagai pihak kepada penulis. Terhadap pendukung ide dan para penyumbang, penulis merasa sangat berutang budi dan menyatakan salut serta terima kasih yang selimpah limpanya.

Terima kasih yang istimewa penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Djanggan Sargowo, dr.,SpPD.,SpJP(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
2. Bapak Prof. Drs. Ismani HP,MA, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Sumartono, MS, selaku pembimbing utama, yang dalam kesibukan-kesibukan beliau sebagai pembantu Dekan I pada Fakultas Ilmu Administrasi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
2.2. Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan.....	22
2.2.1. Pembangunan.....	22
2.2.1.1. Pengertian Pembangunan.....	22
2.2.1.2. Teori-Teori Pembangunan.....	24
2.2.2. Kemiskinan.....	34
2.2.2.1. Konsep Kemiskinan.....	34
2.2.2.2. Dimensi Kemiskinan.....	36
2.3. Pemberdayaan Masyarakat.....	43
2.3.1. Konsep Pemberdayaan.....	43
2.3.2. Bentuk dan Proses Pemberdayaan.....	47
2.4. Peran Pemerintah dan LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	50
2.4.1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	50
2.4.2. Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	55
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	60
3.2. Fokus Penelitian.....	61
3.3. Lokasi Penelitian.....	62
3.4. Sumber Data.....	63
3.5. Teknik Pengukuran Data.....	65
3.6. Teknik Analisa Data.....	67
3.7. Keabsahan Data.....	69



**V. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data	71
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
1.1. Letak Geografi	71
1.2. Topografi dan Iklim	73
1.3. Penduduk dan Angkatan Kerja	74
1.4. Pemanfaatan Lahan dan Konservasi SDA	76
1.5. Kondisi Sosial Budaya	76
1.6. Kondisi Sosial Ekonomi	78
1.7. Dinas Koperasi dan JKM	89
1.8. Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka	91
2. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah dan YASPENSEL	98
2.1. Pemberdayaan oleh Pemerintah	99
2.1.1. Bentuk dan Proses Pemberdayaan	103
2.1.2. Hasil yang Dicapai	115
2.2. Pemberdayaan oleh YASPENSEL	122
2.2.1. Bentuk dan Proses Pemberdayaan	122
2.2.2. Hasil yang Dicapai	134
2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat	140
B. Pembahasan	142
a) Pemberdayaan oleh Pemerintah	143
1) Bentuk dan Proses Pemberdayaan	144
2) Hasil yang Dicapai	153
b) Pemberdayaan oleh YASPENSEL	156
1) Bentuk dan Proses Pemberdayaan	156
2) Hasil yang Dicapai	160
c) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	165
1) Faktor Pendukung	165
2) Faktor Penghambat	167
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	170
B. Saran	172

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kabupaten Flores Timur.....	73
Tabel 2. Persebaran Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Flores Timur	75
Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Lapangan Kerja Tahun 1999-2002	76
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Larantuka Dirinci Menurut Desa/Kelurahan.....	84
Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Weru.....	85
Tabel 6. Sumber Dana Bergulir Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2001-2003	100
Tabel 7. Penyebaran Dana Bergulir Untuk Koperasi/KUD, UKM, dan LKM Menurut Kecamatan Tahun 2001-2003	101
Tabel 8. Penyebaran Dana Bergulir Di Kecamatan Larantuka Dirinci Menurut Desa/Kelurahan.....	102
Tabel 9. Daftar Susunan Badan Pengurus Anggota Kelompok UBSP Rera Gere Tahun 2004.....	112
Tabel 10. Kelompok UBSP/USPRO Dampingan YASPENSEL (1999-2002)	129
Tabel 11. Daftar Susunan Pengurus UBSP Kepuuk Lolon (Keadaan Maret 2004).....	131
Tabel 12. Perbandingan Temuan Penelitian Terdahulu dan korelasinya dengan penelitian ini.....	169



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Model Interaktif.....	80
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur	108
Gambar 3. Konsep, Strategi dan Sasaran Program YASPENSEL.....	136



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Billah (2000), dalam analisisnya berkenaan dengan perkembangan pembangunan menyatakan, bahwa setidaknya ada dua kecenderungan perkembangan pembangunan yang terjadi pada awal dua dasawarsa terakhir abad ini, yakni *pertama* : tetap meluasnya kemiskinan sampai ke derajat yang sangat tidak manusiawi dan tidak lagi bisa diterima; dan *kedua*: semakin menurunnya ketersediaan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pemberantasan kemiskinan itu.

Praktek-praktek pembangunan selama ini selalu menekankan pengalihan modal, perencanaan formal, spesialisasi, dan pengendalian oleh pemerintah pusat. Teori-teori pembangunan konvensional yang dijadikan dasar sangat menekankan pentingnya meletakkan tanggung jawab pengendalian dan pengalokasian sumber-sumber pembangunan terpusat pada pemerintah. Karena dengan demikian dianggap akan dapat dihasilkan pengambilan keputusan yang optimal tentang investasi. Pendekatan sistem komando atas pengelolaan sumber-sumber ini lebih sering menghasilkan pemantapan sistem patronase dan membangun proyek-proyek ekonomi yang lembek, mengabaikan disiplin ekonomi, meningkatkan ketergantungan pada sumber-sumber luar, dan menggusur prakarsa lokal. Selain itu, pendekatan semacam ini cenderung mendorong ke arah otoritarianisme, dan pemusatan kekayaan dan kekuasaan politik.

Sebagai tanggapan terhadap kecenderungan itu, kemudian muncullah suatu tuntutan agar pembangunan lebih berpihak pada rakyat, yang menekankan





penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial yang mendukung pengembangan pengendalian, pertanggung gugatan (*accountability*), prakarsa dan kemandirian lokal (Korten, 1993). Pengalihan modal dilihat sebagai bukan masalah utama, dan sebaliknya prioritas diutamakan pada proses demokratisasi. Rakyat didorong untuk memobilisasi dan mengelola sumber-sumber mereka sendiri. Dengan pendekatan yang terdesentralisasikan dan penekanan pada kemampuan mengorganisasikan diri untuk mengelola sumber-sumber pembangunan, maka akan dihasilkan suatu pengelolaan sumber-sumber yang lebih efisien dan produktif, peningkatan prakarsa, dan pertanggung gugatan lokal, serta penguatan disiplin ekonomi. Pendekatan seperti yang disebut terakhir ini seringkali digunakan oleh LSM/NGO yang pada prakteknya cenderung memiliki minat yang kuat dalam demokratisasi.

Secara luas ada kepercayaan bahwa pembangunan adalah terutama tugas pemerintah dan ini seakan-akan membenarkan otoriterisme dan menyebabkan hambatan besar bagi kemajuan pembangunan yang sesungguhnya di negara-negara selatan selama empat dekade yang lalu (Korten, 1993). Namun pada akhirnya pemerintah terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui instrumen pembangunan, karena adanya penilaian yang keliru terhadap kemampuan pemerintah dan terhadap hakekat pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan (*empowerment*) pada awalnya timbul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan (Soetrisno, 1995). Paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Kritik yang dikemukakan adalah bahwa paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dan



kelompok mereka sendiri. Model sentralistik tersebut tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan.

Sejak tahun 1970-an pembangunan di Indonesia terus melaju dengan cepat, dan dampak positifnya perkembangan ekonomi pun meningkat. Namun pembangunan ternyata juga menimbulkan dampak negatif, terutama meningkatnya kemiskinan, represi terhadap hak-hak asasi manusia, dan merusak lingkungan hidup. Upaya untuk menanggulangi dampak negatif itu kemudian melahirkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang semula dikenal sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Ornop, yang merupakan terjemahan dari *Non-Governmental Organization* atau NGO.

LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi Non-Pemerintah, merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri.

Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah, pada negara, terutama dalam dukungan finansial dan sarana/prasarana. Sekalipun mendapat dukungan dana dari lembaga internasional, tidak berarti kalangan LSM/NGO sama sekali terlepas dari pemerintah. Karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki LSM/NGO.

Memperhatikan pencatatan sosial dan politik di Indonesia pada akhir abad ke-20 ini, kiranya kita tidak dapat mengabaikan peranan yang dimainkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mulai bermunculan pada awal tahun 1970-an, kini LSM hadir dalam setiap bidang kehidupan dan dalam beberapa kasus menjadi penggerak utama perubahan. Menurut penilaian Clark (1995) Organisasi non Pemerintah memiliki keragaman, kredibilitas dan kreativitas yang lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Di negara-negara sedang berkembang



keberadaan mereka sering terkait erat dengan penduduk lokal dan melaksanakan kegiatan yang sekiranya sulit dilaksanakan pemerintah.

Sejalan dengan pandangan di atas *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID),1993, secara jelas menggambarkan bahwa peranan LSM pada umumnya adalah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah--yang selama ini menjadi pengendali perubahan dalam skala besar--atau melakukan hal yang sama dengan pemerintah tetapi dengan cara yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan semangatnya yang hendak menciptakan perbedaan ini, serta keberhasilan relatif ditengah ketiadaan kekuatan lain yang berani berhadapan dengan pemerintah, wajar saja kiranya untuk menyebut LSM sebagai salah satu pendorong dinamika sosial dan politik masyarakat. Dalam hubungan dengan situasi seperti inilah maka sebagian orang lebih suka menyebut lembaga-lembaga ini sebagai Organisasi Non Pemerintah, atau Ornop, yang merupakan terjemahan lurus istilah Inggris *Non - Governmental Organization* (NGO).

Namun demikian, terlepas apapun peranan yang dimainkan, yang jelas bahwa dalam periode sepuluh sampai lima belas tahun terakhir ini telah sangat banyak bermunculan LSM di Indonesia. LSM tidak hanya menawarkan jalan alternatif yang praktis untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat penyadaran dan pembelaan kepentingan umum. Mereka semua berharap dapat memberdayakan masyarakat dalam berhadapan dengan kekuatan besar pemerintah dan swasta. Tetapi ada pula LSM yang bergerak dalam bidang-bidang yang sesungguhnya merupakan kepentingan semua orang, seperti lingkungan hidup dan hak konsumen.



1303144



Sebagaimana diamanatkan oleh GBHN bahwa hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti memberi tempat terhadap hakekat pembangunan manusia pada posisi sentral. Dilihat dari kerangka yang demikian, pembangunan yang terbesar justru pada manusia, karena ia dipandang sebagai fokus utama pembangunan maupun sebagai sumber utama pembangunan. Hal senada diungkapkan Budiman (1995) bahwa bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya ditujukan pada pembangunan manusia. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material.

Kebijakan pembangunan selama rezim Orde Baru yang sentralistik, ternyata hanya melahirkan kelompok masyarakat kelas dua. Berbagai program dan proyek yang terkesan populis malah hanya memperbesar kemiskinan struktural, masyarakat makin termarginalisasi dan institusi lokal makin tidak berdaya. Seperti diungkapkan Abdul Wahab (2002), bahwa pada masa Orde Baru berkuasa, posisi tawar politik (*bargaining position*) Pemerintah Daerah ketika berhadapan dengan berbagai rupa kepentingan pemerintah atasannya amat lemah karena pilihan-pilihan politik lokal (*local political choices*) memang tidak bisa (atau tidak boleh) berkembang secara optimal sejalan dengan aspirasi lokal.

Sebagai negara kepulauan, hingga kini bangsa kita belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah kesenjangan yang sudah ada sejak sebelumnya. Sampai batas-batas tertentu ada kesan bahwa hasil pembangunan selama Pelita itu, memang lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu saja dari masyarakat Indonesia. Seperti diungkapkan Baswir, *et.al.*(2003) dan Widjanarko



(2001), bahwa persoalan pokok yang mencolok adalah masalah kesenjangan dan ketimpangan yang amat lebar, bukan saja antara pusat-daerah dan antar daerah, melainkan sudah demikian parah yakni: kesenjangan antar sektor, antar kesempatan usaha, dan kesenjangan antar-golongan pendapatan dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah adalah peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Hal ini meliputi: pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk menentukan atau menetapkan sendiri metode dan pola-pola yang sesuai dengan budaya masyarakat lokal, baik yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi atas pembangunan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan, memandirikan, menswasembadakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif guna meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 'perangkap kemiskinan' dan keterbelakangan.

Dalam rangka meningkatkan laju perekonomian masyarakat, tatanan ekonomi Indonesia seharusnya diberi landasan yang kukuh, diantaranya dengan menciptakan ekonomi pasar yang sehat. Belajar dari pengalaman orde baru, maka usaha membangun masyarakat yang mengandung relevansi emansipatoris hanya dapat dilakukan jika memasukkan upaya pemberdayaan masyarakat, bukan saja memerangi kemiskinan dan kesenjangan, tetapi juga memungkinkan



masyarakat untuk menjadi lebih aktif, penuh inisiatif dan mandiri untuk mengekspresikan dirinya.

Wujud pembangunan masyarakat yang demikian akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi dan lebih mejamin tumbuhnya *self sustaining capacity* masyarakat menuju *sustained development*. Oleh karena itu pembangunan masyarakat yang bersumber pada sumber daya manusia dengan pendekatan derivatifnya yang berbentuk pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas, diharapkan dapat ikut mewujudkan *sustained development* lewat penerapan strategi *empowerment*.

Konsep *empowerment* sebagai konsep alternatif pembangunan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial pengalaman langsung (Friedmann, 1992). Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab *civil society* akan merasa siap diberdayakan lewat issue-isue lokal. Oleh karena itu pemberdayaan lewat masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki posisi tawar, baik secara nasional maupun secara global.

Menurut Kartasmita (1996), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat secara praktis merupakan upaya pengerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat, akan berakibat meningkatkan produktivitas rakyat. Sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat pula ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Pada akhirnya rakyat



miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat, bukan hanya ekonominya tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuhkan nilai tambah ekonomis tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Selama ini pemerintah kurang memberikan perhatian atau mengabaikan peran masyarakat melalui partisipasi mereka, yang merupakan inisiatif dan gerak bersama dalam melaksanakan pembangunan dari bawah yang memang tumbuh dari masyarakat. Hal senada diungkapkan Soedarsono (2000), bahwa:

“Pembangunan Berbasis Rakyat: Konsep inti bahwa pembangunan itu sebaiknya dilakukan sendiri oleh rakyat. Caranya adalah memberi kekuatan kepada rakyat bukan cara kasihan, namun melihat kekuatannya dan dari kekuatan itu dikembangkan kompetensinya untuk membangun dirinya sendiri. Paradigma ini sebenarnya bermakna dua. Pertama, sebuah paradigma yang dikembangkan bagi mereka yang kurang beruntung dalam proses pembangunan, seperti: kelompok miskin, cacat, terbelakang dan sebagainya. Kedua, sebagai sebuah paradigma menyeluruh yang melihat bahwa pembangunan sebagai sebuah gerak bersama yang saling terpadu dan terkait dari rakyat, baik rakyat besar, menengah, kecil, maupun rakyat maju, sedang dan terbelakang”.

Bahwa pembangunan merupakan gerak bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama. Dalam kurun waktu sepanjang perjalanan pembangunan sejak Indonesia merdeka, rakyat belum seluruhnya menikmati apa yang disebut “hasil-hasil pembangunan”.

Hal senada diungkapkan Korten (seperti dikutip Clark, 1995) bahwa: “lebih dari tiga dasawarsa lalu asumsi yang berlaku adalah bahwa pembangunan itu untuk pemerintah dan pemerintah sendiri”. Asumsi ini tidak dapat lagi dipergunakan. Pemerintah dapat menciptakan hukum dan melakukan pengalokasian kembali sumber-sumber negara yang mempunyai fungsi penting.



Oleh karena itu, peran pemerintah (negara) dalam pembangunan, sedapat mungkin dikurangi dengan memberi peran yang optimal bagi swasta dan organisasi kemasyarakatan (LSM).

Memang, birokrasi pemerintahan kurang menyadari kekeliruannya yang dibuat selama ini. Hal ini disebabkan karena organisasi yang terlalu besar dan memiliki kekuasaan yang sangat dominan. Almond dan Powel (Seperti dikutip Zulkarnaen, 1997) mengartikan birokrasi pemerintahan sebagai sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Kartodirdjo, (1990) menegaskan alasan kuatnya birokrasi pemerintahan dengan mengaitkannya pada sistem politik. Kelemahan sistem politik membawa dampak pada birokrasi, yaitu birokrasi menjadi kuat kedudukannya oleh karena lemahnya pengawasan politik. Birokrasi pemerintah dominan pada segenap aspek penyelenggaraan pembangunan nasional, sedang lembaga non birokrasi lemah *bargaining positionnya*.

Pemerintah cenderung monopolistik yang menimbulkan sifat ketergantungan pada birokrasi dalam segala hal. Ketergantungan ini dipicu lebih lanjut oleh sifat elitis dan sifat eksklusif administrator yang karena alergi terhadap timbulnya proses-proses politik, mengira bahwa hanya merekalah yang dapat mengerti pemerintahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga hampir tidak terdapat saling mempengaruhi antara masyarakat dengan para administrator. Pada hal kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan pembangunan. Masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah, demikian pula sebaliknya; jika masing-masing saling memahami, saling menghormati maka akan terjalin hubungan yang harmonis.



Dengan gambaran mengenai pola pemerintahan Orde baru yang cenderung otoriter dan amat sentralistis itu, dimana hasil-hasil pembangunan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lembek, tidak mampu mengembangkan pemerataan, baik pemerataan partisipasi maupun hasil-hasil pembangunan. Pembangunan yang timpang, hanya melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan di pedesaan maupun perkotaan.

Walaupun pada masa Orde Baru, LSM dianggap sebagai kelompok oposan, yang aktivitasnya sering dicurigai oleh pemerintah, namun pada era Reformasi ini cara pandang dan pola hubungan antara pemerintah dan LSM sudah banyak berubah. Bagaimanapun juga terdapat celah-celah pembangunan yang belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat, yang di dalamnya termasuk LSM.

Uphoff (1995) seperti dikutip oleh Trieanto (2000), menyajikan konsep pendekatan pembangunan (pedesaan) dalam tiga alternatif mekanisme, yakni birokrasi pemerintah/negara sebagai sektor pertama; pasar sebagai sektor kedua; dan organisasi non pemerintah (NGO) sebagai sektor ketiga.

Konsep tersebut di atas hendak menjelaskan, bahwa antara Pemerintah/birokrasi walaupun memiliki pola pendekatan, mekanisme kerja yang berbeda, tapi mempunyai satu tujuan yang sama yakni upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. LSM yang kita harapkan tidak bekerja untuk kepentingan partai atau golongan dan juga kepentingan pemodal raksasa lembaga internasional, atau Ornop yang tidak tenggelam dalam "politik proposal".



Petras, 2001 (seperti dikutip Hartiningsih dalam Kompas, 22 Januari 2003) menyatakan bahwa telah terjadi polarisasi dalam Ornop. *Pertama*, Ornop yang aktif mempromosikan neoliberalisme. Jenis Ornop ini biasanya bekerja sama dengan proyek besar Bank Dunia, AusAID, dan berbagai lembaga dana internasional lainnya. *Kedua*, Ornop reformis, yang menerima pendanaan skala menengah dari lembaga-lembaga sosial demokratik dan pemerintah regional dan lokal yang progresif untuk mendanai proyek-proyek perbaikan dan untuk mengoreksi pasar bebas. *Ketiga*, Ornop radikal yang terlibat dalam gerakan-gerakan anti globalisasi, anti rasis, dan sebagainya.

Budairi (2000), menjelaskan bahwa era 80-an merupakan era kebangkitan LSM, dimana sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Kegiatan LSM tersebut, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah telah mencakup banyak sektor, seperti: usaha kecil dan sektor informal, usaha bersama dan perkoperasian, industri kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan dan perkotaan, dan sebagainya.

Pandangan yang amat kuat pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa untuk mempercepat proses pembangunan perlu menggunakan strategi industrialisasi. Maka hampir seluruh kebijakan pemerintah terlihat amat memihak sektor formal, yang dianggap dapat dengan segera mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena secara konseptual terdapat anggapan bahwa sektor informal atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor marginal, yang hanya memberikan pendapatan yang cukup membantu penduduk dalam kondisi subsisten, dengan ciri-ciri berupa, pekerjaan yang berubah-ubah





dan tidak bertahan lama, serta peralihan dari bekerja ke menganggur, menyulitkan dalam usaha melakukan kategorisasi hubungan perburuhan (Manning, 1990).

Ketika secara makro perekonomian bangsa ini mendapat guncangan hebat oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, bangunan dan struktur formal perekonomian bangsa ini terbukti amatlah rapuh dan nyaris ambruk, namun sektor usaha kecil dan menengah (UKM) masih tetap bertahan hidup serta menjadi pilihan kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu katup penampung masalah ketenagakerjaan di Indonesia (Yustika, 2003). Fakta inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu penyangga penting dari konsep ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia tahun 1993 (dalam Sumodiningrat, 1998), yang berjudul: "*Industrial Policy Shifting in to High Gear*", menyimpulkan bahwa beberapa permasalahan struktural industri Indonesia: (1) tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik terselubung maupun terang-terangan, dan pasar yang diproteksi; (2) dominasi kelompok bisnis pemburu rente (*rent seeking*), ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global; (3) lemahnya hubungan intra industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis, yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien; (4) struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah; (5) masih kakunya BUMN sebagai pemasuk *input* maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi; (6) investor asing masih cenderung pada orientasi pasar



domestik (*inward oriented*) dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi.

Usaha kecil di pedesaan merupakan kelompok masyarakat ekonomi lemah.

Mereka bukan hanya lemah dalam akses modal, manajemen usaha, sumberdaya manusia, pemasaran produk, tetapi juga lemah dalam akses pembinaan dan pengembangan baik dalam aspek institusi/ kelembagaan, pembinaan dan pengembangan serta fasilitas alokasi kredit.

Swasono (1998), mengemukakan bahwa perekonomian rakyat harus dimengerti sebagai aktivitas yang seluruh proses kegiatannya diselenggarakan oleh rakyat secara informal maupun tradisional, di pedesaan maupun dipertanian, sebagai upaya memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada persyaratan khusus, yang dituntut adalah keuletan, tekun dan bersedia melakukan segala pekerjaan, baik wanita maupun pria.

Maka disini amat diperlukan peran keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat/LSM, untuk mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan usaha seoptimal mungkin. Dukungan kerjasama swasta dengan pemerintah (daerah) ini merupakan terobosan yang penting dan strategis, untuk memberi ruang bagi masyarakat kecil mengembangkan potensi sumber daya lokal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Hal ini seperti dikemukakan Saefuddin, et. al. (2003) bahwa pemerintah bertanggung jawab menciptakan iklim yang kondusif serta mendorong masyarakat dunia usaha untuk mengembangkan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Misalnya PT. Caraka Muda Perkasa bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Departemen Pertanian, menyediakan fasilitas



kegiatan kredit ketahanan pangan bagi petani kecil (petani padi) kabupaten Pinrang yang sukses dilaksanakan di area 10.000 Ha.

Pemberdayaan usaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Diakui bahwa pemberdayaan usaha kecil menghadapi beberapa kendala, seperti lemahnya manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Yustika (2003), mengemukakan bahwa upaya untuk mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), merupakan pilihan yang penting, walaupun senantiasa diperhadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti: (1) pengetahuan manajemen terbatas; (2) kurangnya ketrampilan; (3) rendahnya kemampuan promosi dan pemasaran; (4) teknologi yang masih tradisional; serta (5) modal usaha yang relatif kecil. Maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mencegah diskriminasi proses pertumbuhan kedua sektor tersebut seperti dengan memberikan dorongan secara aktif dengan menyediakan fasilitas seperti kredit modal usaha, peningkatan keterampilan dan pengetahuan manajemen, promosi dan pemasaran serta penyediaan bahan baku, dan sebagainya.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut maka usaha kecil merupakan bentuk perekonomian rakyat, yang apabila diberdayakan akan mampu memecahkan masalah-masalah dasar pembangunan Indonesia seperti pengangguran, juga mampu membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambaran mengenai peran pemberdayaan masyarakat (pedesaan dan perkotaan) melalui pengembangan usaha kecil, juga ditemui di Kabupaten Flores Timur, baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun LSM, yang aktivitasnya



dapat dilihat di desa-desa binaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Flores Timur.

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan dengan luas wilayah 1.812,85 km², dengan total penduduk 201.749. Struktur masyarakat yang didominasi oleh komunitas yang berpendidikan rendah dan dengan modal usaha yang serba sangat kecil, membuat pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi tidaklah banyak. Bagi mereka yang memasuki usia kerja, dengan tanpa adanya dua bekal tersebut, salah satu jenis pekerjaan yang paling mungkin dilakukan adalah dengan bekerja atau membuka lapangan kerja di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut BPS (Biro Pusat Statistik) Kabupaten Flores Timur (2002), mencatat masalah-masalah yang dihadapi diantaranya: terbatasnya lapangan kerja, yang dapat dirinci: Pertanian (18.715), pertambangan dan penggalian (150), Industri (3.725), Konstruksi (2.070), perdagangan (6.330), transportasi dan komunikasi (1.850), keuangan (205), jasa (6.940). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal belum dapat mengembangkan usaha-usaha produktif, bila tidak diintervensi oleh "orang luar".

Telah banyak program pengentasan kemiskinan diimplementasikan, tetapi kebanyakan program pengentasan kemiskinan cenderung belum efektif karena kurang menjamin ke arah usaha produktif yang berkelanjutan secara mandiri. Permasalahan semacam ini jelas terlihat seperti pada implementasi program Inpres Desa Tertinggal sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 1993.

Pada tahun 1993 pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) menyalurkan dana dari Program Inpres Desa Tertinggal, berupa bantuan modal bergulir kepada kelompok masyarakat



(tani) yang tersebar di 12 kecamatan sebesar Rp 300.000 – Rp 700.000 per anggota. Program ini ternyata gagal membangun kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang sosial ekonomi. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan kurang memberi kepercayaan/wewenang kepada masyarakat kecil untuk mengelola sendiri program-program mereka.

Kemudian pada tahun 2000 pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Flores Timur mencoba memfasilitasi penyaluran bantuan modal dan pendidikan/latihan bagi anggota Koperasi/UKM/LKM/Kelompok untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Adapun sumber dana dari program ini adalah dari BUMN, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Selain pemerintah, program pengembangan usaha kecil ini juga dilaksanakan oleh LSM, yakni Yayasan pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL) yang mempunyai minat dan menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan usaha kecil, dengan memberi bantuan pendidikan/latihan dan modal kepada anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha bersama Simpan Pinjam (UBSP).

Memang peran keterlibatan, baik pemerintah maupun Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL), dalam memfasilitasi pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil. Dimana semua kelompok binaan mendapat bantuan/asistensi organisasi, administrasi dan modal.

Kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) ini bergerak dalam aneka usaha meliputi: Kios, ternak, meuble, gerobak, tenun ikat, tahu-tempe,



1303144

serta usaha buah dan sayur. Prakarsa untuk memberdayakan kelompok masyarakat lokal melalui peningkatan keterampilan dan keahlian serta dukungan modal usaha merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka disini penting untuk ditelusuri lebih jauh seputar peran dan keterlibatan, baik pemerintah maupun YASPENSEL dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) di Kabupaten Flores Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah seperti tergambar di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah dan YASPENSEL dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) di Kabupaten Flores Timur?
- b. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat, baik oleh Pemerintah maupun YASPENSEL, dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam di Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menggambarkan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam di Kabupaten Flores Timur.



- b. Menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam di Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Salah satu wujud kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep pembangunan dalam perspektif pemberdayaan, dan sekaligus memberi manfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Administrasi Negara di Era Otonomi Daerah ini.
- b. Sumbang saran berupa pemikiran strategis dan praktis dalam bentuk gagasan-gagasan baru yang berwawasan pemberdayaan serta relevan dengan dinamika pembangunan sosial ekonomi di daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.

Uphoff (1995), dalam *Grassroots Organization and NGO in Rural*

Development: Opportunities with Deminishing States and Expanding Market,

mengungkapkan hasil penelitiannya di berbagai negara tentang peran NGO, antara

lain:

- a. Program swadaya pengadaan air bersih di daerah pedesaan Malawi, yang mampu menjangkau lebih dari satu juta orang dengan biaya \$10/orang, dimana tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan dilakukan sendiri secara profesional oleh masyarakat.
- b. Proyek Agro industri di Haiti, yang berkat dukungan NGO dan GRO telah mampu menciptakan kerjasama yang baik antar sesama petani hingga menghasilkan 20 juta pohon (Pelampauan target lebih dari 6 kali lipat dalam jangka waktu 5 tahun).
- c. Penerapan metode partisipatif melalui *The Agha Khan Rural Support* di Utara Pakistan dengan sasaran penyediaan prasarana air bersih pedesaan. Daerah ini hampir tidak pernah dikunjungi pejabat negara ataupun tersentuh program pemerintah. Namun melalui program ini dibentuklah organisasi lokal (desa), dimana program ini akhirnya mampu memberikan layanan lebih dari 10.000 penduduk.

d. *The Kenya Tea Development Authority*, sebagai wujud kerjasama NGO dengan petani teh, yang menghasilkan teh berkualitas tinggi di pasar dunia. Dampak yang timbul dari kerjasama NGO dengan petani teh tersebut adalah, selain meningkatkan pendapatan petani teh juga mampu mendongkrak pendapatan negara (daerah) dari sektor ini.

Faktor utama dari keberhasilan program tadi, bahwa pendekatan yang digunakan NGO adalah pendekatan proses pembelajaran (*learning process approach*). Dari hasil penelitian yang dilakukan Uphoff, memberikan keyakinan bahwa pembangunan yang bernuansa pembelajaran yang tumbuh dari masyarakat sendiri akan lebih berhasil dibandingkan dengan metode tuntunan yang sering diterapkan oleh birokrasi. Oleh karenanya, hasil penelitian tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penelitian ini.

Trianto (1999), dalam tesisnya yang berjudul: "Intervensi LSM dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat", dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tulaka Kabupaten Pacitan, menyimpulkan bahwa: Komitmen pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah maupun LSM Plan International ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan atas hasil yang dicapai lebih disebabkan oleh penenrapan *etos kerja* yang berbeda. Strategi LSM Plan International dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui cara mendorong sumber daya lokal yang berpotensi untuk mengelola sendiri program-program mereka, sehingga dengan cara ini masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan hasil yang dicapai menjadi karya dan milik bersama mereka.

Sebaliknya etos kerja yang diterapkan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat didasarkan pada aturan/regulasi yang ketat/kaku, sehingga setiap aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan (yang sering dijabarkan ke dalam petunjuk, instruksi, arahan) dianggap sebagai penyimpangan.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh LSM Plan International disebabkan oleh mekanisme pemberdayaan yang dilakukan LSM dilaksanakan dengan cara mendorong sumberdaya lokal yang berpotensi diberi peluang untuk mengelola sendiri program-program mereka. Sehingga dengan cara ini masyarakat diposisikan sebagai mitra/pendamping sekaligus mereka merupakan pelaku utama pembangunan. Sebaliknya, birokrasi memandang masyarakat sebagai obyek yang harus dibangun, sehingga kedekatan hubungan tercipta apabila keduanya saling membutuhkan. Hasil penelitian ini tentunya memiliki sumbangan sangat besar bagi pemecahan permasalahan penelitian ini.

Awang (1995), hasil penelitiannya tentang pelaksanaan program IDT dan pemberdayaan masyarakat, dengan studi kasus tipologi desa Hutan Kabupaten Madiun, menyatakan bahwa proses pemberdayaan di desa lokasi penelitian dinilai gagal. Salah satu kesalahan fatal terletak pada tidak diberinya wewenang sepenuhnya kepada masyarakat (orang miskin) untuk menilai siapa yang layak perlu dibantu. Penentuan kriteria orang miskin di dominasi aparat (desa), sebagai wujud adanya interest pribadi. Oleh karenanya kegagalan dari kasus IDT ini berkaitan dengan aspek struktural yang tidak mampu diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomis saja, melainkan aspek politis atau pemberdayaan politis perlu dipertimbangkan.



Sungguhpun pemberdayaan politis belum memiliki bentuk baku, namun tindakan '*menyadarkan*' masyarakat miskin terhadap hak dan kewajibannya, merupakan jargon pemberdayaan yang lebih mengena.

Penelitian Awang dengan demikian memfokuskan pada aspek pemberdayaan di berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik) sebagai pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak (terutama birokrasi) sebelum program/kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat miskin diluncurkan.

Oleh karena penelitian ini berusaha melihat lebih jauh peran pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun LSM, maka kontribusi penelitian ini sangat besar dalam pemecahan permasalahan.

2.2. Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan

"Pembangunan" dan "Kemiskinan", merupakan dua kata yang paling sering didengar, yang substansi dan maknanya cenderung bergeser mengikuti arus perkembangan dan perubahan zaman. Kendati begitu, kedua kata ini sulit dilepaskan satu dengan yang lainnya, ibarat mata uang yang memiliki dua sisi yang sama, yang sulit dipisahkan. Sekalipun kedua istilah tersebut mempunyai kaitan satu dengan yang lain, namun perlu diperjelas pengertian masing-masingnya agar dapat dilihat hubungan maupun perbedaan antara kedua istilah tersebut.

2.2.1. Pembangunan

2.2.1.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah satu diantara konsep-konsep paling mendesak di zaman kita sekarang ini. Ia memancing pertanyaan-pertanyaan sulit tentang nilai-nilai, teknik-teknik dan pilihan-pilihan. Pembangunan memunculkan kembali pertanyaan



klasik tentang hakekat “masyarakat yang baik”, dan juga masalah siapakah yang harus menentukan isi dan tujuan masyarakat.

Syambi (1986), menyatakan pembangunan merupakan proses perubahan sistem direncanakan dan pertumbuhan menuju ke arah perbaikan yang berorientasi pada modernitas, *nation building* dan kemajuan sosial ekonomi. Sedangkan Siagian (2001), menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Sementara menurut Korten (1993) pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Pembangunan adalah suatu konsep normatif; ia menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut Gandhi sebagai “realisasi potensi manusia” (Bryant & White, 1987). Pertumbuhan semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. Juga, pembangunan tidak selalu dapat disama-ratakan dengan modernisasi, sebab ada banyak segi pada tradisi yang meningkatkan potensi manusia dan merajut serta mempertahankan kultur.

Todaro (seperti dikutip Bryant & White: 1987) menyimpulkan bahwa pembangunan adalah “proses multidimensi” yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional,

dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Konsep-konsep pembangunan di atas, termasuk konsep pembangunan yang sudah diperluas yang melibatkan aspek lingkungan dan keadilan sosial, pada dasarnya masih bersifat materialistis. Yang dipersoalkan terbatas pada persoalan materi yang mau dihasilkan dan yang mau dibagi. Hal ini disebabkan karena teori pembangunan masih sangat didominasi oleh para ahli ekonomi.

Dari pengertian pembangunan di atas, jelaslah bahwa suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat dilaksanakan secara terpadu untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik, secara sosial, ekonomi dan bermartabat. Budiman (1995), menyimpulkan bahwa pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. *Pertama*, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. *Kedua*, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.

Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya.

2.2.1.2. Teori-Teori Pembangunan

Kartasasmita (1997), menyatakan bahwa konsep pembangunan menurut literatur-literatur ekonomi pembangunan, sering didefinisikan sebagai suatu proses



yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

Teori pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidaknya-tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Smith (1776), proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Smith juga menggaris-bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Smith, muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pertumbuhan (*limits to growth*), antara lain Malthus (1798) dan Ricardo (1917).

Setelah Smith, Malthus dan Ricardo, yang disebut sebagai *aliran klasik*, berkembang teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasinya. Pada intinya, teori ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya (1) akumulasi modal (*physical capital formation*) dan (2) peningkatan kualitas dan investasi sumberdaya manusia (*human capital*). Salah satu dampaknya yang besar dan berlanjut hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod (1948) dan Domar (1946). Pada intinya model ini, berpijak pada pandangan Keynes (1936), yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Dalam model Harrod - Domar (seperti dikutip Arsyad, 1999), pertumbuhan akan ditentukan oleh dua unsur pokok yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (*capital output ratio*). Agar dapat bertumbuh secara



berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan makin besar investasi, dan makin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, makin rendah produktivitas kapital atau semakin tinggi *capital output ratio*, makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Kalau Harrod-Domar memberikan tekanan pada pentingnya peranan modal, Lewis (1954), dengan model *surplus of labour*nya, memberikan tekanan pada peranan jumlah penduduk. Dalam model ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat elastis. Ini berarti para pengusaha dapat meningkatkan produktivitasnya dengan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak tanpa harus menaikkan tingkat upahnya. Meningkatnya pendapatan yang diperoleh kaum pemilik modal akan mendorong investasi-investasi baru, karena kelompok ini mempunyai hasrat menabung dan menanam modal (*marginal propensity to save and invest*) yang lebih tinggi dibanding kaum pekerja. Tingkat investasi yang tinggi pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu berkembang sebuah model pertumbuhan yang disebut *neo-klasik*. Teori pertumbuhan neo-klasik, mulai memasukkan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan suatu negara (Solow, 1957, seperti dikutip Kartasasmita, 1997). Dalam teori neo-klasik, teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di dunia. Dalam perekonomian yang terbuka, dimana semua faktor produksi dapat berpindah secara leluasa dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, maka pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen, yang berarti kesenjangan akan berkurang.



Teori *Human Capital*, menekankan bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Menurut Becker (1964), peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat di dorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan. Selanjutnya, pertumbuhan yang bervariasi di antara negara-negara yang membangun melahirkan pandangan bahwa teknologi bukan faktor eksogen, tapi faktor endogen yang dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel kebijaksanaan (Romer, 1990). Sumber pertumbuhan dalam teori endogen adalah meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian yang tumbuhnya daya cipta, kreasi, inisiatif, yang diwujudkan dalam kegiatan inovasi dan produktif. Ini semua menuntut kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Transformasi pengetahuan dan ide baru tersebut dapat terjadi melalui kegiatan perdagangan internasional, penanaman modal, lisensi, konsultasi dan komunikasi.

Mengenai peran perdagangan dalam pertumbuhan, Nurkse, 1953 (seperti dikutip Kartasasmita, 1997), menunjukkan bahwa perdagangan merupakan mesin pertumbuhan selama abad ke-19 bagi negara-negara yang sekarang termasuk dalam kelompok negara maju. Pada abad itu, kegiatan industri yang termaju terkonsentrasi di Inggris. Dengan demikian pertumbuhan yang terjadi di Inggris menyebar ke negara lain melalui perdagangan internasional.

Dalam kelompok *teori pertumbuhan* ini ada pandangan penting yang dianut oleh banyak pemikir pembangunan, yaitu teori tahapan pertumbuhan. Dua diantaranya yang terpenting adalah dari Rostow, 1960 dan Chenery-Syrquin, 1975 (seperti dikutip Budiman, 1995; Kartasasmita, 1997; dan Arsyad, 1999).

Rostow, dalam bukunya yang terkenal, *The stages of Economic Growth*, menguraikan teorinya tentang proses transformasi dari negara terbelakang menjadi negara maju, dapat dijelaskan melalui urutan tingkatan atau tahap pembangunan yaitu; (1) masyarakat tradisional, (2) Pra kondisi untuk lepas landas; (3) tahap lepas landas; (4) tahap bergerak ke kedewasaan; (5) tahap konsumsi masal yang tinggi. Menurut Chenery dan Syrquin (1975), perkembangan perekonomian akan mengalami transformasi (konsumsi, produksi, dan lapangan kerja) dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian menjadi didominasi sektor industri dan jasa.

Salah satu anggapan dari pengikut teori pertumbuhan ini adalah bahwa hasil pertumbuhan akan dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah. Namun, pengalaman pembangunan dalam tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa rakyat lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Bahkan di banyak negara terjadi kesenjangan yang semakin melebar, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan dapat menjadi lebih miskin.

Kemudian berkembang berbagai pemikiran untuk mencari alternatif lain terhadap paradigma yang semata-mata memberi penekanan kepada pertumbuhan, antara lain berkembang kelompok pemikiran yang disebut *paradigma pembangunan sosial*, yang tujuan utamanya adalah menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan.

Meskipun pembangunan harus berkeadilan, namun disadari bahwa pertumbuhan tetap penting. Upaya memadukan konsep *pertumbuhan* dan



pemerataan merupakan tantangan yang jawabannya tidak henti-hentinya dicari dalam studi pembangunan. Sebuah model yang dinamakan pemerataan dengan pertumbuhan atau *redistribution with growth*. Model ini dikembangkan berdasarkan suatu studi yang disponsori oleh Bank Dunia tahun 1974 (Chenery, *et.al.*). Ide dasarnya adalah pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah (yang di banyak negara berlokasi di pedesaan dan produsen kecil di perkotaan) akan mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan dan secara simultan menerima sumber ekonomi yang diperlukan.

Masih dalam rangka mencari jawaban terhadap tantangan paradigma keadilan dalam pembangunan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia atau *basic human needs*.

Strategi *basic human needs* disusun untuk menyediakan barang dan jasa dasar bagi masyarakat miskin, seperti makanan pokok, air dan sanitasi, perawatan kesehatan, pendidikan dasar, dan perumahan. Walaupun *redistribution with growth* dan *basic human needs* mempunyai tujuan yang sama, tetapi dalam hal kebijaksanaan yang diambil terdapat perbedaan.

Redistribution with Growth menekankan pada peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat miskin, sedangkan *basic human needs* menekankan pada *public services* disertai jaminan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Beberapa ahli berpendapat pula bahwa pemerataan pendapatan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja (Seers, 1970, seperti dikutip

Kartasasmita, 1997). Menurut teori ini barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin cenderung bersifat padat tenaga kerja dibanding dengan konsumsi masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, pemerataan pendapatan akan menyebabkan pergeseran pola permintaan yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

Dalam rangka perkembangan teori ekonomi politik dan pembangunan perlu dicatat pula bahwa aspek ideologi dan politik turut mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkembang. Salah satu diantaranya adalah *teori ketergantungan* yang dikembangkan terutama berdasarkan keadaan pembangunan di Amerika Latin tahun 1950-an. Ciri utama dari teori ini adalah bahwa analisisnya didasarkan pada adanya interaksi antara struktur internal dan eksternal dalam suatu sistem.

Menurut teori ini (Baran, 1957), keterbelakangan negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat pra kapitalis tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dengan demikian, masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi daerah "pinggiran" dari negara metropolitan yang kapitalis. Daerah (negara) pinggiran dijadikan daerah-daerah jajahan dari negara-negara metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri daerah (negara) metropolitan dan sebaliknya merupakan konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan industri-industri negara metropolitan tersebut. Dengan demikian timbul *struktur ketergantungan* yang merupakan rintangan yang hampir tak dapat diatasi serta merintanginya pula pembangunan yang mandiri.

Ada dua aliran dalam *teori ketergantungan*, yaitu aliran Marxis dan neo-Marxis, serta aliran non Marxis. Aliran Marxis dan Neo-Marxis, menggunakan kerangka



analisis dari teori Marxis tentang imperialisme. Aliran ini membedakan secara tajam mana yang termasuk struktur internal dan mana struktur eksternal, karena kedua struktur tersebut dipandang sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Selain itu, aliran ini mengambil perspektif perjuangan kelas internasional antara para pemilik modal (para kapitalis) di satu pihak dan kaum buruh di pihak lain. Untuk memperbaiki nasib buruh perlu diambil prakarsa menumbangkan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, menurut aliran ini resep pembangunan untuk daerah pinggiran adalah *revolusi* (Frank, 1967, yang dikutip Budiman, 1995).

Sedangkan aliran *Non-Marxis*, melihat masalah ketergantungan dari perspektif nasional atau regional. Menurut aliran ini, struktur dan kondisi internal pada umumnya dilihat sebagai faktor yang berasal dari sistem itu sendiri, meskipun struktur internal ini pada masa lampau atau sekarang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negeri (Dos Santos, 1969, yang dikutip kartasasmita, 1997). Oleh karena itu subyek yang perlu dibangun adalah *bangsa* atau *rakyat* dalam suatu negara (*nation building*). Dalam menghadapi tantangan pembangunan, konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaharuan.

Pandangan bahwa pembangunan tidak seyogyanya hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Masalah-masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi pembicaraan pula dalam kajian-kajian pembangunan. Goulet, 1977, (seperti dikutip Kartasasmita, 1997) yang mengkaji falsafah dan etika pembangunan misalnya, mengetengahkan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan (1) terciptanya solidaritas baru yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (*grass-roots oriented*),



(2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan (3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia dan masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai berbagai paradigma yang mencari jalan ke arah pembangunan yang berkeadilan, perlu diketengahkan pula *teori pembangunan yang berpusat pada rakyat*. Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang penting, guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan pelestarian pembangunan (Korten, 1993).

Logika yang dominan dari paradigma ini adalah ekonomi manusia yang seimbang dengan sumber-sumber daya yang utama, berupa sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tidak habis-habisnya. Tujuan utamanya adalah, pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai "perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia".

Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. *Pembangunan yang berpusat pada rakyat*, menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

Paradigma terakhir, yang tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan sosial dan berbagai pandangan terdahulu, adalah *paradigma pembangunan manusia*. Menurut pendekatan ini, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati hidup yang kreatif, sehat, dan berumur panjang. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan



bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pengalaman-pengalaman tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan produksi dan pendapatan hanya merupakan alat, sedangkan tujuan akhir dari pembangunan harus manusianya sendiri.

Menurut pandangan ini, tujuan pokok pembangunan menurut UI-Haq, 1995 (seperti dikutip Kartasasmita, 1997) adalah memperluas pilihan-pilihan manusia. Pengertian ini mempunyai dua sisi. *Pertama*, pembentukan kemampuan/ kapasitas manusia, seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan, dan keahlian yang meningkat. *Kedua*, penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan, atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan politik.

Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik ini mempunyai empat unsur penting, yakni: (1) peningkatan produktivitas, (2) pemerataan kesempatan, (3) kesinambungan pembangunan, dan (4) pemberdayaan manusia.

Konsep ini diprakarsai dan ditunjang oleh *United Nations Development Program* (UNDP), yang mengembangkan Indeks Pembangunan manusia atau *Human Development Indeks* (HDI). Indeks ini merupakan indikator komposit/gabungan yang terdiri dari 3 ukuran, yakni: Kesehatan (sebagai ukuran *longevity*), pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*), dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*).





2.2.2. Kemiskinan

2.2.2.1. Konsep kemiskinan

Kemiskinan mengandung banyak pengertian, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain pada setiap waktu, dan telah dideskripsikan dalam berbagai perspektif. Umumnya manusia tidak ingin terperangkap ke dalam kondisi kemiskinan. Saefuddin, *et.al.* (2003), menggambarkan bahwa secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini.

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas,2002). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Sementara menurut *World Bank*, Kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1 per hari.

Sedangkan menurut Townsend, 1972 (seperti dikutip Usman, 2003), mengatakan bahwa paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan yaitu, Pertama: kemiskinan absolut, biasanya dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Konsep kemiskinan semacam itu telah banyak mendapat kritik. Kritik itu antara lain mengatakan bahwa hampir tidak mungkin membuat satu ukuran untuk semua anggota masyarakat di masing-masing daerah berbeda-beda.



Contohnya, kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan; dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian dengan desa nelayan.

Kedua: Kemiskinan Relatif, dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yakni dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya; dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.

Konsep ini juga telah memperoleh banyak kritik, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubah-ubah. Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lainnya. Dan apa yang dianggap layak pada saat ini, boleh jadi tidak layak pada dua-tiga tahun lagi.

Ketiga: Kemiskinan subyektif, dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal *a fixed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin (dan demikian pula sebaliknya). Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong dalam hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri semacam itu (dan demikian sebaliknya). Oleh karena itu, konsep kemiskinan semacam ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk



memahami kemiskinan dan merumuskan cara dan strategi untuk penanggulangannya.

Konsep kemiskinan atau ketidaksejahteraan sebagaimana tergambar di atas, akan menjadi lebih nyata bila kita menggunakan indikator keluarga sejahtera. Pada dasarnya untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga (mulai dari kebutuhan dasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan diri) dibagi dalam tiga kelompok dengan variabelnya masing-masing, yakni; 1) Kebutuhan dasar (basic needs) meliputi: pangan, sandang, papan dan kesehatan. 2) Kebutuhan sosial psikologis (*social psychological needs*), terdiri dari: pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial (internal dan eksternal). 3) Kebutuhan pengembangan (*development needs*), meliputi: tabungan, pendidikan khusus/kejuruan, akses terhadap informasi.

2.2.2.2. Dimensi Kemiskinan

Tiga pendekatan ilmiah yang cukup populer di dalam memahami masalah kemiskinan ialah pendekatan kultural, pendekatan situasional dan pendekatan interaksional.

1. Pendekatan Kultural

Tokoh utama yang menggunakan pendekatan kultural ialah Lewis, 1966. Dengan konsep "*cultural poverty*", Lewis, 1966 (seperti dikutip Dewanta, 1999) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama. Berdasarkan penelitian pada beberapa kebudayaan kelompok etnik, Lewis (1966), menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu sub-kultur



masyarakat yang mempunyai persamaan ciri antar etnik satu dengan etnik yang lain. Akar dari timbulnya budaya miskin tersebut, lanjut Lewis, adalah keadaan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri berikut ini: (1). Sistim perekonomian yang terlalu berorientasi pada mencari keuntungan; (2). Tingginya angka pengangguran dan angka “*under employment*” bagi golongan yang tidak mempunyai keahlian (*unskilled labor*); (3). Rendahnya upah yang diperoleh para pekerja; (4). Tidak adanya organisasi sosial, politik dan ekonomi bagi kaum miskin, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat (*Non Governmental Organization*); (5). Hadirnya sistim kekeluargaan yang bilateral, yang menggantikan sistim yang unilateral; (6). Hadirnya kelas masyarakat yang dominan, yang menekankan pada penumpukan harta dan kekayaan, kesempatan untuk terus meningkat dalam status (*upward mobility*). Anggota kelas masyarakat ini beranggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena sifat pribadi yang lemah, yang inferior.

Menurut Lewis (1966), budaya kemiskinan adalah suatu cara yang dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marginal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas, sifat individualistik dan kapitalistik. Budaya kemiskinan adalah desain kehidupan bagi orang miskin yang berisikan pemecahan bagi problem-problem hidup mereka, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.



2. Pendekatan Situasional

Valentine, 1968 (Seperti dikutip Dewanta, 1999; Antjok, 1995), menggunakan asumsi yang berbeda dari asumsi Lewis, mengatakan bahwa ciri-ciri sub kultur orang miskin seperti yang digambarkan oleh Lewis bukanlah suatu hasil kebudayaan yang turun temurun. Ciri-ciri itu timbul oleh karena situasi yang menekan. Bilamana situasi yang menekan itu hilang, ciri-ciri tersebut akan hilang dengan sendirinya. Situasi yang menekan tersebut timbul karena struktur total dari sistem sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut menurut Valentine, untuk merubah keadaan orang-orang miskin ke arah yang lebih baik harus diadakan perubahan yang simultan dalam tiga hal: Pertama, menambah *resources* (kesempatan kerja, pendidikan dan lain-lain) bagi orang miskin. Kedua, perubahan struktur sosial masyarakat; dan Ketiga, perubahan-perubahan di dalam sub kultur masyarakat orang miskin tersebut.

Sumber perubahan yang paling mungkin menurut pendapat Valentine, adalah gerakan-gerakan sosial untuk menghidupkan kembali keyakinan diri kelompok miskin. Gerakan ini harus berasal dari dalam kelompok orang miskin tersebut. Bila telah timbul keyakinan diri tersebut maka hambatan-hambatan kultural yang merupakan ciri masyarakat miskin akan terkikis.

3. Pendekatan Interaksional

Menurut Gans, 1968 (sebagaimana dikutip Kartasasmita, 1996) perilaku dan ciri-ciri yang ditampilkan para kaum miskin adalah merupakan hasil interaksi antara faktor kebudayaan yang sudah tertanam di dalam diri orang miskin dan faktor situasi yang menekan. Gans tidak sependapat dengan Lewis, yang



mengatakan bahwa orang miskin di semua negara mempunyai ciri-ciri yang sama. Gans berpendapat bahwa orang-orang miskin bersifat heterogen.

Sebagian orang miskin menjadi miskin karena warisan generasi sebelumnya, sedangkan sebagian orang miskin lainnya hanya miskin secara periodik.

Sebagian orang miskin bertambah miskin (*downwardly mobile*), sedangkan sebagiannya lagi bertambah baik kehidupannya (*upwardly mobile*). Sebagian dari mereka berorientasi ke atas dan melihat adanya kesempatan untuk maju, sedangkan sebagian lainnya tidak berorientasi demikian dan tidak menggunakan kesempatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Gans, pemecahan terakhir masalah kemiskinan terletak pada usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat orang miskin untuk menggunakan kesempatan yang tersedia dan usaha untuk memberikan keyakinan pada diri si miskin untuk menggunakan kesempatan yang tersedia walaupun kesempatan tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan yang dianut saat itu. Untuk menyediakan kesempatan tersebut diperlukan suatu pemahaman tentang perubahan yang diperlukan dalam sistem ekonomi, struktur kekuasaan dan norma-norma serta aspirasi kelompok orang kaya yang ikut memungkinkan timbulnya kelompok orang miskin.

Ellis, 1984 (seperti dikutip Usman,2003), mengungkapkan sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu: perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*).



- a). Perspektif kultural, mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality* seperti: sikap parokhial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.
- b). Perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi modal, dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (*growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

Chambers (1987) mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut '*deprivation trap*' atau 'perangkap kemiskinan'. Dia menggambarkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan, satu dan lainnya terjalin sebagai suatu mata rantai kemiskinan yang disebutnya 'perangkap kemiskinan' yang terdiri dari lima faktor yang saling mengkait,

masing-masing faktor memperkuat dan memperburuk yang lain. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1).kemiskinan; (2).kelemahan fisik; (3). Isolasi; (4). Kerentanan; dan (5) ketidak-berdayaan.

Menurut Sumardjan (1997), terdapat berbagai sebab yang mengakibatkan kemiskinan dapat menimbulkan berbagai pola kemiskinan, yaitu:

Pertama: *Kemiskinan individual*, hal ini terjadi karena kekurangan sandang oleh seorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan. Mungkin individu ini sakit-sakitan sehingga tidak dapat bekerja mendapatkan penghasilan; mungkin ia tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, tidak mempunyai modal usaha atau semangat untuk maju dalam kehidupannya. Individu demikian dapat menderita hidup miskin dalam lingkungan kaya. Namun bagaimanapun jika individu tersebut memiliki jiwa usaha yang tinggi, niscaya menemukan jalan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Kedua: *Kemiskinan Relatif*, hal ini berkaitan dengan pengertian sosio-ekonomis-status (SES). Untuk menentukan SES (biasanya untuk suatu keluarga atau rumah tangga) diadakan perbandingan antara taraf kekayaan materi dari keluarga-keluarga dalam suatu komunitas. Dengan perbandingan ini dapat disusun pandangan masyarakat mengenai mereka yang tergolong kaya dan relatif miskin dalam komunitas itu. Ukuran yang dipakai adalah ukuran setempat (lokal). Dengan demikian suatu keluarga yang di suatu daerah atau komunitas yang dianggap relatif miskin, dapat saja termasuk golongan kaya diukur dengan kriteria di tempat lain, yang secara keseluruhan dapat dianggap komunitas atau daerah yang lebih miskin.



Ketiga: *Kemiskinan Struktural*, dinamakan kemiskinan struktural karena disandang oleh suatu golongan yang menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat. Seperti yang digambarkan mengenai kemiskinan individual, maka dalam konsep kemiskinan struktural, ada suatu golongan sosial yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari lilitan kemiskinan. Contoh dari golongan yang menderita kemiskinan struktural ini, misalnya golongan pegawai negeri sipil, petani yang tidak memiliki tanah, nelayan yang tidak memiliki perahu, buruh tanpa keterampilan khusus, pemulung sampah dan sebagainya. Di tiap-tiap golongan itu banyak terdapat orang-orang yang tidak mungkin hidup wajar hanya dengan penghasilan kerjanya. Akibatnya mereka harus pinjam dan selamanya terlibat hutang yang tak kunjung lunas.

Keempat: *Kemiskinan Budaya*, hal ini dimaksudkan sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sebab dari kemiskinan itu oleh karena kebudayaan masyarakat yang tidak mengandung ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa usaha dan dorongan sosial yang dibutuhkan untuk menggali kekayaan alam di lingkungannya dan menggunakannya untuk kebutuhan hidup masyarakatnya. Kalau ditinjau secara obyektif maka sebenarnya masyarakat Indonesia sebagian besar hidup dalam kemiskinan budaya seperti diungkapkan di sini.

Kelima: *Budaya kemiskinan*, istilah kemiskinan budaya kadangkala dipakai secara terbalik menjadi budaya kemiskinan. Yang dimaksudkan dengan budaya



kemiskinan adalah suatu tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap taraf hidup miskin yang disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar-wajar saja dan tidak perlu diperbaiki.

Dengan kata lain, kemiskinan yang diderita oleh masyarakat itu dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin diubah. Karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak meresahkan jiwa atau frustrasi secara berkepanjangan. Dalam kondisi ini, manusia dan masyarakat menyerah pada nasib dan bersikap tidak menggunakan sumber daya lingkungannya untuk mengubah nasibnya itu.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. Konsep pemberdayaan

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" dan "*empower*". Dalam Webster dan Oxford English Dictionary, kata "*empower*" mengandung dua makna, yaitu: "*to give power or authority to*" dan "*to give ability to or enable*". Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan wewenang ke pihak lain.

Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya memberi kemampuan atau keberdayaan (Priyono dan Pranarka, 1996).

Pembangunan yang berbasis kerakyatan merupakan suatu proses dimana Pemerintah dan masyarakat, termasuk LSM, mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan serta memacu aktivitas sosial ekonomi untuk peningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat itu sendiri.



Dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan menurut Pierse & Stiefel (Seperti dikutip Pranarka 1996), memiliki perspektif yang luas, karena mencakup penghormatan terhadap kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, serta peningkatan kemandirian. Lebih lanjut Pranarka (1996), menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan; Pertama, sebagai kecenderungan *primer* dari pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan kedua, sebagai kecenderungan *sekunder*, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dari berbagai pengertian tadi maka memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Priyono, 1996).

Kartasasmita (1995), menyatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana maupun prasarana fisik maupun sosial yang diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah. *Ketiga*, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.



Dalam proses perkembangannya, konsep pemberdayaan menjadi lebih luas baik pemahaman maupun cakupannya. Ketidak berdayaan dapat diakibatkan oleh kondisi dan disposisi subyektif, maka dalam hal seperti ini pemberdayaan menjadi gerak yang tumbuh dari dalam. Ketidak berdayaan dapat pula terjadi sebagai akibat dari struktur sosial, hubungan antar manusia, dari situasi keluarga, situasi masyarakat, situasi kerja, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan tentunya dari struktur kekuasaan yang tergelar dalam tata politik dan pemerintahan (Pranarka, 1996). Dalam konteks pembangunan nasional yang telah menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek, termasuk di dalam menghadapi imperatif perubahan, diperlukan adanya rasa keberdayaan untuk merumuskan arah kemana perubahan itu akan diupayakan, serta keberdayaan untuk mengelola dampak yang ditimbulkan dari perubahan itu. Ketika keragaman individu dan pluralitas masyarakat tadi harus menghadapi perubahan dengan tetap menjamin terpeliharanya sendi-sendi kehidupan yang mereka yakini, tentu diperlukan institusi yang mampu merujuk penyamaan persepsi/pemberian makna yang sama ketika menangkap isyarat perubahan.

Sedangkan Bryant & White (1987), mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Pengertian lain tentang pemberdayaan dari Freire (seperti dikutip Soetrisno, 1995), bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang menindas (*opressive*).





Lebih lanjut Freidmann, (1992) menawarkan strategi pembangunan yang populer disebut dengan *empowerment* (pemberdayaan). Bahwa hasil interaksi pada tingkat ideologi antara konsep *Growth strategy* dan *people centered* dengan pemberdayaan. Di tingkat ideologis, merupakan hasil interaksi antara konsep "*top down*" dan "*bottom up*", dan antara konsep "*growth strategy*" dan "*people centered strategy*". Di tingkat praktis, interaksi akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi.

Konsep ini tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi bagaimana mensinergikan keduanya. Konsep ini bertitik tolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk terjadinya pertumbuhan, serta memungkinkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat "*people centered, participatory, empowering and sustainable*". Asumsi dasar yang dipergunakan bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya pembedayaan dirinya. Kalau selama ini yang bersangkutan tidak berdaya, bisa jadi karena adanya stimulus yang bersifat negatif, yang menghalangi upaya tersebut. Dengan adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, maka dengan sendirinya dapat meningkatkan keswadayaan dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kekurangan yang dialaminya (Korten, 1993).



Oleh kerennanya setiap intervensi pembangunan yang dengan sendirinya membawa imperatif perubahan akan memunculkan reaksi dari pihak publik berupa persepsi dan pemaknaan baik dalam bentuk sikap, pikiran maupun tindakan. Pada tataran implementasi, pemaknaan terhadap intervensi, memunculkan berbagai alternatif yang tidak hanya sekedar menerima atau menolak, akan tetapi terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan pasif hingga penolakan aktif.

2.3.2. Bentuk dan Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan esensi dari perwujudan demokrasi, di mana rakyat mempunyai persamaan kedudukan dan hak, yang diakui dan dijamin oleh konstitusi serta bebas mengekspresikannya tanpa ada tekanan ataupun perasaan takut. Rakyat memiliki ruang untuk mengaktualisasikan hak-haknya itu dan ikut aktif berperan dalam pembangunan, tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Karena itu pendekatan pembangunan *top-down*, yang dulu pernah begitu populer mulai ditinggalkan. Masyarakat modern dewasa ini mulai berpaling pada pendekatan pembangunan *bottom-up*, yang hendak mendudukan masyarakat sebagai “subyek” pembangunan, dengan konsep *Community Based Development* yakni pembangunan yang berbasis rakyat (Korten, 1993).

Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.



Prijono dan Pranarka (1996), mengungkapkan paling tidak ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam upaya pemberdayaan, yaitu: *Pertama*, tahap inisial, dimana proses pembangunan dan pemberdayaan berlangsung dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Kemudian *kedua*, tahap Partisipatoris, yaitu: dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Dan *ketiga*, tahap emansipatoris, dimana pemberdayaan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat pada tahap inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah, dan tetap tergantung pada pemerintah. Pada tahap partisipatoris, dimana proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Dalam tahap ini, masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Dan terakhir, tahap emansipatoris, dimana proses pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat sudah dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri, dan tahap ini merupakan puncak dari pemberdayaan masyarakat. Dalam prakteknya Friedmann (1992), menyatakan proses pemberdayaan dilakukan melalui beberapa pentahapan yang dimulai dengan



pemberdayaan individu, dilanjutkan pemberdayaan ikatan antar individu/kelompok, dan terakhir pemberdayaan politik.

Selengkapnya Friedmann (1992) menguraikan tahap pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan individu, merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga. Asumsinya, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu jaringan keberdayaan yang lebih luas lagi. Jaringan yang lebih luas ini akan membentuk keberadaan sosial. Keluarga disini didudukkan sebagai prosedur sekaligus *customer*.
2. Pemberdayaan kelompok/ikatanantar individu yang merupakan '*spiral models*'. Pada hakekatnya individu satu dan lainnya diikat oleh ikatan yang disebut keluarga. Demikian antara satu keluarga dan yang lainnya diikat oleh ikatan berketetangaan seterusnya sampai ikatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan pertama, hubungan yang terjadi disebabkan saling percaya satu sama lain, keyakinan agama, kesamaan keturunan, nasib atau kedekatan bertetangga. Pada tingkatan yang lebih tinggi, hubungan ini dapat terwujud dalam suatu gerakan buruh, organisasi politik dan yang lainnya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi/hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi. Maka kemampuan individu 'senasib' untuk berkumpul dalam satu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau bisa disebut *collective self-empowerment*. Dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas yang homogen dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Di samping itu, biasanya melalui kehidupan kelompok masing-masing individu belajar untuk menganalisis secara kritis situasi social mereka termasuk dimensi

politiknya dan berusaha memperolehnya kembali daya untuk mengubah situasi tersebut. Pada titik inilah terjadi proses penyadaran/konsientisasi, yang merupakan suatu proses stimulasi dari *self-critical* manusia akan realitas sosialnya serta menekankan pada kemampuan (daya) yang dimilikinya untuk mentransformasikan realitas tersebut melalui aksi kolektif mereka secara sadar. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompok. Individu dalam kelompok akan belajar mendeskripsikan situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka. Dengan kata lain, mereka belajar mendefinisikan masalah, menganalisisnya serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

2.4. Peran Pemerintah dan LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bila kita mencermati dinamika pendekatan pembangunan, maka menjadi nyata bahwa peranan pemerintah tetap dominan, apapun pendekatan pembangunan yang dipergunakan. Menurut Abdullah (1985), dominasi itu muncul disebabkan pemerintah (birokrasi) memiliki peran penting dalam pembangunan yaitu:

- 1) Birokrasi sebagai motivator pembangunan
- 2) Birokrasi sebagai administrator profesional
- 3) Birokrasi sebagai *expert*
- 4) Birokrasi dalam peranan sebagai *leader*
- 5) Birokrasi sebagai strategi dalam memilih metode, cara dan teknik untuk mencapai sasaran;
- 4) Birokrasi sebagai penghubung terdepan kebijaksanaan pemerintah/nasional (*frontiers interface*).

Predikat yang diletakkan pada birokrasi (pemerintah) sebagai terurai di atas menunjukkan peranan pemerintah amat besar dalam menangani permasalahan pembangunan. Padahal sebagaimana kita ketahui, tidak semua permasalahan



pembangunan menjadi wewenang pemerintah. Ada permasalahan yang memang menjadi wewenang pemerintah, dan harus ditangani pemerintah yang disebut porsi pemerintah. Tapi ada juga permasalahan yang menjadi wewenang pihak non pemerintah dan ditangani oleh pihak non pemerintah, yang disebut porsi masyarakat.

Zauhar, (2001) mengungkapkan bahwa pada awalnya administrasi publik atau birokrasi hanya berkaitan dengan fungsi tradisional administrasi seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kini bergeser dan berkembang ke persoalan yang lebih luas, seperti persoalan pelayanan publik lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Sedangkan menurut Rasyid, (2002) Pemerintahan modern pada hakekatnya, adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Konkretnya, pada fenomena negara modern, administrasi negara atau birokrasi bukan hanya berperan dalam mengatur, mengontrol, dan menegakkan keadilan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat demikian menjadi salah satu tanggung jawab politik penting setiap pemerintah.

Bahwa fungsi pokok birokrasi dalam negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam



mencapai tujuan ideal suatu negara itu. Untuk melaksanakan fungsi itu, menurut Rasyid (2002), birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok yakni:

(1) Memberikan pelayanan umum (*service*) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk; (2) Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan, dan (3) Menyelenggarakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, dan sebagainya.

Sudah umum diketahui bahwa fungsi utama birokrasi sebagai lembaga pengabdian dan pelayan masyarakat seringkali tidak terwujud secara optimal. Bahkan, kinerja birokrasi sering mengalami *disorientasi* (melenceng) dari tugas pokoknya. Ketidakefektifan dan pelencengan tujuan itu, menurut Setiyono (2002), disebabkan oleh banyak faktor, (baik yang ada dalam intern institusi birokrasi sendiri maupun faktor yang ada di lingkungan dimana birokrasi berada), yaitu: kendala politis, kendala administratif, dan kendala sosial budaya.

Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan birokrasi bergerak lambat, tidak efisien, berbelit-belit, boros, tidak memiliki standar kepastian kerja yang baik, dan pada akhirnya tidak disukai oleh para pengguna jasanya. Menurut Weber, (seperti dikutip Ismani, 1996) mengungkapkan bahwa secara rasional birokrasi



mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Para anggota staf secara pribadi bebas menjalankan tugas-tugas jabatan mereka; (2) Ada hirarki jabatan yang jelas; (3) Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas; (4) Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak; (5) Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, memiliki ijazah, dan melalui ujian; (6) Memiliki gaji dan hak pensiun, gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki; (7) Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya; (8) Terdapat suatu struktur karier, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan/superior; (9) pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di posnya tersebut; dan (10) Ia tunduk pada system disiplin dan kontrol yang seragam.

Apabila tipe ideal birokrasi dengan sepuluh ciri tersebut dapat terlaksana secara konsekuen maka dampaknya akan positif dalam kehidupan organisasi maupun dalam masyarakat dan negara. Dalam prakteknya, tipe ideal birokrasi itu belum secara sungguh-sungguh diterapkan. Blau dan Meyer (2000), mencoba melihat birokrasi dari sisi gelapnya, yaitu adanya kekakuan (*inflexibility*) dan kemandegan struktural. Tata cara yang berlebihan (*ritualism*) dan penyimpangan sasaran (*perversion goals*), sifat tidak pribadi (*impersonality*) dan pengabaian (*alienation*) serta otomatis dan menutup adanya perbedaan pendapat.

Sistem birokrasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari masa lalu, dalam pemerintahan kerajaan, pemerintahan kolonial, pemerintahan orde lama, pemerintahan orde baru, masing-masing periode tersebut mempunyai corak

birokrasi tersendiri. Dalam zaman kerajaan, feodalisme menjadi landasan birokrasi, maka dituntut kesetiaan dan kepatuhan kepada raja dan punggawa raja sebagai kelompok elit pemerintah. Pada masa kolonial, keadaan birokrasi kerajaan yang demikian itu tidak mengalami perubahan yang berarti, tetapi justru dimanfaatkan dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih efisien demi kepentingan penjajah.

Kemudian setelah Indonesia merdeka sampai dengan runtuhnya orde lama, birokrasi patrimonial masih tetap melekat erat pada pemerintahan dan pembangunan. Pengaruh feodalisme dan kolonialisme masih terus berlanjut, dan pola hubungan *patron-client* menjadi referensi utama dalam birokrasi. Dalam orde lama orientasi ke atas sangat kuat dan menentukan, sehingga “bapak” harus dihormati, ditaati dan pantang ditentang.

Di masa Orde Baru, birokrasi yang bercorak patrimonial masih tetap menjadi warna yang dominan. Menurut Hein (Seperti dikutip Ismani, 1996) menegaskan bahwa hubungan “bapak-anak buah” mempengaruhi hampir setiap segi penting kehidupan politik dan pembangunan di Indonesia. Patrimonialisme dalam birokrasi merupakan peninggalan sejarah politik dan ekonomi di Indonesia sampai sekarang tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan.

Dalam era reformasi ini, birokrasi kita mulai berubah pandangan atas keberadaan mereka. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana nafas dan nuansa Undang-Undang tersebut adalah mencerminkan sosok birokrasi yang inovatif dan humanis yang dapat membagi peran atau bahkan bertindak sebagai fasilitator bagi tumbuh dan

berkembangnya partisipasi masyarakat lokal mengekspressikan dirinya dalam membangun daerah dan masyarakatnya.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan usaha untuk memberikan ruang gerak kepada daerah agar lebih leluasa untuk mengatur dirinya sendiri dan sekaligus cermin dari demokrasi. Sebuah pemerintahan yang demokratis, bermakna “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, dalam arti memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sebanyak mungkin melibatkan rakyat, dan sebanyak mungkin rakyat ikut menikmatinya.

Berkaitan dengan itu, bahwa demokrasi membangkitkan partisipasi, tanpa demokrasi mustahil partisipasi yang merupakan wujud dari pemberdayaan akan memiliki makna dan arti. Ada beberapa hal yang diambil birokrasi dalam menyikapi perubahan zaman, yaitu: redefinisi tentang visi, misi dan strategi, implementasi dan evaluasi. Dalam melayani masyarakat, birokrasi justru bisa adaptif, proaktif, efisien, jika bermitra dengan masyarakat yang dilayaninya. Sehingga peran pemberdayaannya tidak hanya diharapkan dalam program dan proyek saja, tapi dapat diaplikasikan atau diimplementasikan di lapangan yang secara sinergi bekerjasama dengan pihak LSM dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat (Nugroho, 2000).

2.4.2. Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan LSM merupakan fungsi dari hati nurani, sebab sifat yang dimiliki LSM sebagaimana digambarkan oleh Saragih (1993) antara lain:

- a. Bersifat nirlaba (*non profit*), didirikan bukan untuk mencari keuntungan.



- b. Bukan merupakan kepanjangan pemerintah, organisasi politik, maupun bisnis, tetapi independen.
- c. Meningkatkan keswadayaan masyarakat.
- d. Memperhatikan kelestarian alam.

Sedangkan menurut Peter Hagul (1985) menyatakan bahwa, pada umumnya LSM memiliki lima ciri sebagai identitasnya yaitu: (1) dapat menjangkau penduduk termiskin; (2) mendorong partisipasi yang lebih luas; (3) tidak birokratis; (4) mampu bereksperimen; dan (5) membutuhkan biaya yang murah.

Eldridge (1995) mengemukakan adanya tiga paradigma ataupun model dari NGO dalam perannya terhadap pembangunan. Ketiga model tersebut; *pertama*, NGO yang menjalin kerjasama dan membantu pemerintah melalui pembangunan partisipasi masyarakat; model *kedua*, NGO yang berkolaborasi dengan pemerintah tetapi memiliki sikap kritis; model *ketiga*, NGO yang berusaha menjaga jarak dengan pemerintah, tetapi orientasinya konsisten pada pemberdayaan masyarakat akar rumput. Sedangkan kelompok *radikal baru* adalah kelompok yang selalu berseberangan bahkan selalu menentang setiap program pemerintah.

Sementara itu Korten (1988), mengemukakan pendapatnya bahwa dilihat dari orientasi pada pembangunan, setidaknya ada 5 (lima) generasi NGO yaitu:

Generasi pertama-NGO yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu dengan berusaha untuk segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Generasi kedua-NGO yang memusatkan perhatiannya pada *small-scale self reliant local development* atau disebut juga *community development*, yaitu antara lain



meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur.

Generasi ketiga-NGO yang terlibat dalam *sustainable system development*, mulai memperlakukan dampak-dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh keluar daerahnya, ke tingkat regional, nasional dan internasional. Mereka mulai sadar bahwa ketidakberhasilan pada tingkat lokal sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari keadaan tingkat nasional dan global.

Generasi keempat- NGO yang bertindak sebagai *people movement*, yaitu sebagai fasilitator gerakan masyarakat.

Generasi kelima adalah NGO yang orientasinya pada *empowering people*, yaitu pemberdayaan rakyat.

Tidak banyak berbeda dengan pendapat Korten, Elliott (1987), mengemukakan bahwa terdapat tiga strategi pendekatan yang dilakukan oleh NGO. Pendekatan pertama, *the welfare approach*, memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah kelaparan. Pendekatan ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan berupa penyediaan makanan, pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.

Pendekatan kedua, *the developmental approach*, terutama memusatkan program kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

Pendekatan ketiga, yang masih dalam konteks pembangunan adalah *the empowerment approach*, yang melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan

berusaha untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Selain Elliott, Brodhead (1987) juga mengemukakan tiga tahap evolusi pengembangan kegiatan dan pelayanan NGO sebagai berikut: (1) menyediakan bantuan dan sumbangan; (2) mendanai atau melaksanakan proyek-proyek swadaya; dan (3) menjadi fasilitator atau katalisator. Pada hakekatnya peran NGO bukan hanya sebagai fasilitator pendidikan masyarakat atau katalisator perubahan, tetapi juga sebagai mediator, komunikator, dan dinamisator transformasi sosial dengan melindungi dan membela kepentingan kaum lemah.

Dengan mengacu pada strategi yang dikemukakan oleh Korten, Elliott dan Brodhead, peran NGO dalam proses pemberdayaan rakyat dan pemberdayaan NGO di Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

- 1) *Pendekatan kemanusiaan*, walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya, tetapi dapat memberdayakan NGO itu sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah membantu secara spontan dan sukarela kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah, atau kurang beruntung. Pendekatan ini terutama dilakukan oleh lembaga penyandang dana (*grantmaking* atau *fundraising institute*) seperti Yayasan Dana Gotong Royong.
- 2) *Pendekatan Pengembangan Masyarakat*, bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat, seperti dilakukan oleh Dian Desa dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang merintis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang kemudian menjadi salah satu program pemerintah.



Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM) merintis Usaha Bersama, kemudian mendirikan Yayasan Bina Swadaya yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga NGO dan pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat.

- 3) *Pendekatan Pemberdayaan Rakyat*, bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Caranya adalah dengan melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Solidaritas Perempuan, dan Indonesian NGO Forum on Indonesia (INFID).



BAB III

METODE PENELITIAN

1.3. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Dalam pelaksanaannya memerlukan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar perolehan data yang dikehendaki menjadi relevan dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian metode penelitian sangat diperlukan untuk mempermudah penulisan, penyusunan dan pelaporan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Menurut Nawawi (1995), penelitian deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*Fact finding*). Dimana hasil penelitian lebih ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Proses penelitian kualitatif berbentuk siklus bukan linier, maksudnya kegiatan pengumpulan data dan analisa data berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak (Bungin, 2003).

Dalam penelitian kualitatif, menurut Strauss (seperti dikutip Wignjosoebroto, 2002), peneliti dapat mengontrol dirinya sendiri agar mampu menganalisis dengan penuh kritik situasi yang tengah dikajinya untuk kemudian



melakukan abstraksi-abstraksi mengenai apa sesungguhnya yang tengah terjadi dihadapan realitas dan data, dan kepekaan teoritik sang peneliti pun tak pelak lalu menjadi amat berperan penting di sini.

Karena itu, menurut Guba dan Lincoln (seperti dikutip Abdul Wahab, 2002), peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen utamanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang lebih mendalam sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, dan umumnya relatif lebih leluasa dan fleksibel.

Sejalan dengan masalah serta tujuan penelitian yang diajukan maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

3. 2. Fokus Penelitian

Untuk menghindari peneliti dari pengumpulan data yang tidak perlu maka penelitian ini perlu difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Moleong (2000), mengemukakan bahwa penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan: *pertama*, penetapan fokus membatasi bidang inkuiri. Misalnya jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar maka lapangan penelitian lain tidak akan kita manfaatkan lagi. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* (termasuk-terpisah dari yang lain, peneliti) untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin ada suatu data yang cukup penting, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak perlu dihiraukan.





Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif sangat berhubungan dengan rumusan masalah, sehingga penetapan masalah merupakan pusat perhatian penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang fleksibel dan terbuka, mengikuti pola pemikiran yang menekankan analisis induktif (*emperico inductive*), dimana segala sesuatu dalam penelitian ditentukan oleh hasil akhir pengumpulan data (Sutopo, seperti dikutip Hasan, 2002), karena data tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan.

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka fokus penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) meliputi:

- 1) Pemberdayaan oleh Pemerintah :
 - 1.a. Bentuk dan Proses Pemberdayaan
 - 1.b. *Out put* atau hasil yang dicapai
- 2) Pemberdayaan oleh LSM:
 - 2.a. Bentuk dan Proses Pemberdayaan
 - 2.b. *Out put* atau hasil yang dicapai
- 3) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat:
 - 3.a. Faktor Pendukung
 - 3.b. Faktor Penghambat

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana data diambil dari sumber data sekunder maupun data primer. Berkaitan dengan ini Moleong (2000) menyarankan sebagai berikut:



“Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian”.

Berdasarkan pendapat di atas dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka lokasi yang dipilih menjadi obyek penelitian, yakni Kelurahan Weri dan Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang sekaligus sebagai sasaran/kelompok dampingan dari Pemerintah (Dinas Koperasi dan KM) dan YASPENSEL.

Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian: (1) Keterkaitan visi, misi dari pemerintah maupun LSM dalam mengemban tugas pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian; (2) Kedekatan lokasi dengan domisili peneliti, diharapkan memberikan kemudahan untuk dijangkau; (3) Tidak kalah pentingnya, motivasi pribadi peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat di lokasi penelitian yang memiliki corak kultur yang khas, dalam memberikan tanggapan/respons atas program pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemerintah (melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabuapten Flores Timur) dan LSM yakni Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL) dalam pengembangan usaha kecil, melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP).

3. 4. Sumber Data

Lofland & Lofland (seperti dikutip Moleong, 2000), mengemukakan “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Berkaitan dengan itu maka

yang termasuk sebagai sumber data dapat berupa peristiwa, dokumen (hal atau benda), atau orang yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Terkait dengan permasalahan dan fokus penelitian, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Informan

Yang dimaksud dengan informan adalah orang-orang yang dapat memberi informasi dan persepsi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Penetapan *informan* berdasarkan *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja dengan pertimbangan bahwa *informan* tersebut sangat mengetahui atau memahami permasalahan yang diteliti dengan tepat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Singarimbun (1995) bahwa penggunaan metode *purposive sampling* bisa dilakukan hanya pada populasi yang sifat-sifatnya sudah dikenal terlebih dahulu.

Dengan menggunakan metode tersebut maka yang dijadikan *informan* dalam penelitian ini terdiri dari para pelaku ataupun sumber informasi dari aktivitas pemberdayaan yang terdiri dari: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, beserta pejabat / staf di tingkat bawahnya, yakni Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kepala seksi jaringan usaha dan kemitraan, Direktur YASPENSEL, beserta petugas lapangan dan terakhir adalah anggota/pengurus kelompok UBSP Rera Gere dan Kepuuk Lolon serta tokoh masyarakat.

2. Peristiwa

Data juga diperoleh dari kejadian dan kenyataan yang ada di lapangan yang saat itu sedang dilakukan oleh pelaku pemberdayaan baik oleh pemerintah



maupun LSM YASPENSEL, misalnya saat dilakukan sosialisasi program atau Rapat Anggota Tahunan, dan berbagai peristiwa baik yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dengan topik dan permasalahan penelitian.

3. Dokumen dan catatan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik yang bersumber dari Pemerintah diberbagai tingkatan(Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan dan Kelurahan) maupun dari LSM (YASPENSEL).

3. 5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendatangi lokasi penelitian (*Getting-in*).

Peneliti mengawali kegiatan penelitian dengan membawa surat nomor :

234/J10.4/AK/2004,perihal : ijin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Uneversitas Brawijaya Malang, untuk melapor diri pada Bupati Flores Timur pada tanggal 24 Pebruari 2004, sekaligus mendapat gambaran mengenai program pemberdayaan yang telah dijalankan beserta instansi pelaksananya. Selanjutnya peneliti mendatangi Kepala Dinas Koperasi dan UKM beserta staf dibawahnya, juga Direktur YASPENSEL. Kemudian melakukan kunjungan ke lokasi penelitian, dengan mendatangi anggota dan pengurus kelompok dampingan, para elit desa, dan tenaga lapangan guna menjangring informasi atau untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan peran pemberdayaannya dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam.

2. Kondisi ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*)

Peneliti melakukukan hubungan secara pribadi yang akrab dengan para subyek peneliti. Dengan proses ini peneliti memperoleh informasi yang



lengkap, serta menangkap makna/ intisari dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut. Selanjutnya peneliti menjalin hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu kelancaran penelitian, walaupun orang-orang tersebut bukan informan untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Mengumpulkan data (*logging data*)

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Wawancara (*in-depth interview*)

Teknik wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan penelitian atau narasumber "Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi...sehingga suatu fenomena sosial menjadi bisa dipahami" (Zungin, 2003). Wawancara ini dilakukan peneliti secara tak berstruktur supaya dapat secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap dan semendalam mungkin.

b. Observasi

Pengamatan lapangan dilakukan langsung oleh peneliti terhadap aktivitas yang telah terprogram baik oleh Pemerintah (Birokrasi) yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Teknik ini dipilih agar dapat mengumpulkan data yang faktual dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian, yang juga bertujuan untuk memberikan deskripsi sistematis atas peristiwa, sikap, perilaku dan latar sosial dari masyarakat.



c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara pencatatan terhadap berbagai dokumen untuk memperkuat analisis data penelitian yang dilakukan dengan memperoleh surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari sumber-sumber, baik yang berasal dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM maupun YASPENSEL, serta instansi pemerintah di tingkat bawahnya yaitu Kantor Camat Larantuka, kantor Lurah Sarotari dan Weri yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

3. 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (1992) berupa analisis interaktif. Dalam analisis interaktif, analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Alur pertama adalah reduksi data, peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari lapangan baik dari kelompok UBSP, kantor Lurah, Kantor Dinas Koperasi dan UKM maupun LSM YASPENSEL yang masih berupa data kasar, kemudian dilakukan pemilahan dan penyederhanaan serta penggambaran sepanjang hal itu masih tetap menjunjung kemurnian/validitas data tersebut. Reduksi data peneliti lakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung sampai data tersebut mampu memberikan gambaran yang tersusun secara sistematis baik dalam bentuk tabel, gambar maupun informasi terstruktur berupa komentar atau pernyataan sikap, yang terkait langsung dengan permasalahan.



Alur kedua adalah penyajian data, berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebagaimana disinggung dalam teknik pengumpulan data, data yang diperoleh dari berbagai instansi/ lembaga baik dari Dinas Koperasi dan UKM serta instansi terkait diberbagai level maupun LSM YASPENSEL, merupakan sumber informasi yang perlu dicermati, dalam pengertian ada tidaknya keterkaitan langsung dengan pemecahan persoalan penelitian. Sebab dengan luasnya cakupan masalah yang diteliti, ternyata telah membawa peneliti pada kenyataan bahwa banyak data lapangan yang terkumpul. Karena itu, bila tidak cermat maka justru dapat membingungkan dan dapat berakibat menghambat penulisan. Oleh karenanya, data yang disajikan dalam penelitian ini setidaknya telah mengalami reduksi dan penyaringan dengan tidak merubah kemurnian/keaslian dari sumbernya. Selanjutnya dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan baik dalam bentuk tabel, angka-angka (kuantitatif) maupun dalam bentuk teks naratif berupa ungkapan atau tanggapan informan.

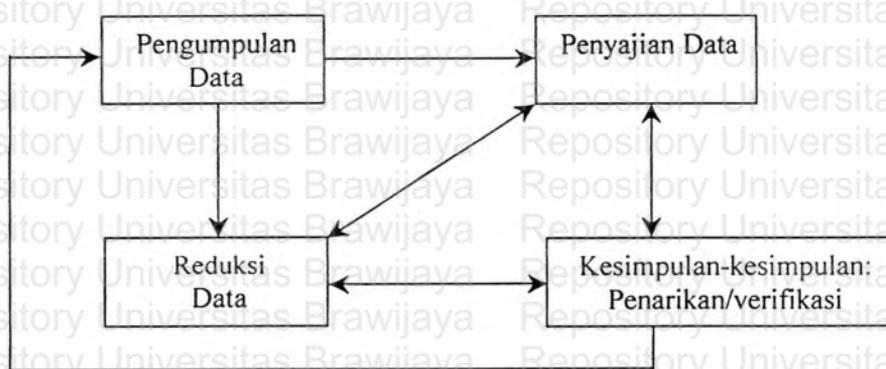
Alur ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus-menerus,

maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Makna-makna yang muncul dari data kemudian diuji kebenarannya, kecocokkannya atau validitasnya.

Secara skematis proses analisis sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1

Analisis Model Interaktif



Sumber : Miles & Huberman (1992)

3. 7. Keabsahan Data

Secara konseptual keabsahan data merupakan standar kepercayaan dari suatu penelitian. Moleong (2000), menetapkan empat kriteria/teknik pemeriksaan atas kabsahan data. Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Untuk memperoleh derajat kepercayaan penelitian ini melakukan antisipasi melalui beberapa langkah diantaranya pengamatan ulang, apabila data yang diperoleh pertama dirasa meragukan, kemudian mengadakan pengecekan melalui perbandingan terhadap data yang sama, yang diperoleh dari sumber lain, atau dengan cara membicarakan dengan informan lain yang





dianggap memiliki pengetahuan/menguasai permasalahan penelitian serta melakukan cek ulang (*member check*) kepada informan.

2. Derajat Keteralihan (*transferability*)

Dengan mengacu pada hasil penelitian para pakar terdahulu yang memiliki kesamaan dan relevansi kuat dengan materi penelitian ini, serta acuan teoritis yang digunakan dalam menyoroti permasalahan penelitian, peneliti berkeyakinan bahwa hasil temuan dalam penelitian ini memiliki kekuatan apabila diaplikasikan pada tempat dan situasi berbeda. Sebaliknya, apabila hasil penelitian memunculkan perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti beranggapan bahwa hal ini sebagai temuan baru terhadap persoalan yang sama-sama dikaji.

3. Derajat Ketergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas (*reability*). Reabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Dan alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain, semuanya tergantung dengan keadaan peneliti sendiri. Keadaan ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan criteria kebergantungan dan kepastian. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan *audit-trail*, memeriksa dan melacak suatu kebenaran (Moleong, 2000), yaitu usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan. Dalam hubungan dengan penelitian ini, *audit-trail* sebaiknya dilakukan oleh pembimbing. Dalam hal ini yang diperiksa antara lain, proses penelitian serta taraf kebenaran data serta tafsirannya.

Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan sebagai berikut:



- a. data mentah, seperti catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman, dokumen dan lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan.
- b. Hasil analisa data, berupa rangkuman, hipotesis kerja, konsep-konsep, proposisi.
- c. Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, interelasi data, tema, pola, hubungan dengan literature dan laporan akhir.
- d. Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni tentang metodologi, desain, strategi, prosedur yang rasional.

4. Derajat Kepastian (*Confirmability*)

Derajat Kepastian/konfirmasi dalam penelitian kualitatif tidak berbeda dengan obyektivitas sebagaimana dalam penelitian non kualitatif. Oleh karenanya konfirmasi/kepastian dalam penelitian ini selain dilakukan terhadap orang/informan, juga lebih menekankan kebenaran data yang diperoleh.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai lokasi penelitian, maka berikut ini akan diuraikan kondisi wilayah yang meliputi beberapa aspek yang dianggap relevan dengan topik penelitian, yakni: letak geografi, topografi dan iklim, pemanfaatan lahan, kependudukan dan tenaga kerja serta kondisi sosial budaya dan kondisi sosial ekonomi, di Kabupaten Flores Timur.

1.1. Letak Geografi

Secara geografis Kabupaten Flores Timur terletak antara $8^{\circ}04'$ – $8^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan $123^{\circ}23'$ – $122^{\circ}38'$ Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka.

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan, dengan luas daratan 1.812,85 km², yang terdiri dari tiga pulau besar yakni: Flores Timur Daratan, dengan luas: 1,066,87 km² atau (58,85%), Pulau Adonara, dengan luas: 519,64 km² (28,67%) dan Pulau Solor, dengan luas: 226,34 km² (12,48%).



Secara administratif, wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 13 Kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 198 dan 17 Kelurahan, dengan rincian seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kabupaten Flores Timur

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
01.	Wulanggintang	Boru	15	329,49
02.	Tite Hena	Lato	11	186,70
03.	Tanjung Bunga	Waiklibang	18	343,16
04.	Larantuka	Larantuka	8/14	133,28
05.	Ile Mandiri	Lewohala	8	74,24
06.	Solor Barat	Ritaebang	15/1	150,68
07.	Solor Timur	Menanga	14	75,66
08.	Adonara Barat	Waiwadan	17	133,96
09.	Wotan Ulumado	Baniona	7	75,81
10.	Adonara Timur	Waiwerang	12/2	108,94
11.	Ile Boleng	Senadan	14	51,39
12.	Witihama	Oringbele	10	77,97
13.	Klubagolit	Pepek Kelu	17	91,57
	Kab.Flores Timur	Larantuka	167/17	1.812,85

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2002.

1.2. Topografi dan Iklim

a. Topografi

Keadaan bentang alam Kabupaten Flores Timur pada umumnya merupakan daratan yang bergelombang dan berbukit, sedang tanah datar sangat terbatas. Jenis tanah daerah ini hampir homogen. Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, vegetasi dan umur jenis tanah. Jenis tanah di Kabupaten Flores Timur pada umumnya adalah jenis *Aluvial*, *Litosol*, *Latosol* dan jenis tanah *mediteran*. Jenis-jenis tanah ini pada umumnya mempunyai ciri-ciri penggunaan tanaman yang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah di Kabupaten Flores Timur yakni untuk kepentingan pertanian, perkebunan, ladang atau tegalan.



b. Iklim

Kabupaten Flores Timur memiliki iklim tropis, dengan musim kemarau lebih panjang, yang berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Sedangkan musim hujan lebih pendek, yang berlangsung dari bulan November sampai bulan April, dengan jumlah rata-rata hari hujan 50 – 100 hari.

1.3. Penduduk dan Angkatan Kerja

a. Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten Flores Timur pada tahun 2001 tercatat sebanyak 199.580 jiwa, terdiri dari laki-laki: 93.538 jiwa (46,87 %) dan perempuan: 106.042 (53,13 %), dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 38.714. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk 10 tahun sebelumnya (1991), yang berjumlah 180.597 jiwa, maka telah terjadi pertambahan jumlah penduduk sebesar 0,62 % setiap tahun.

Berdasarkan data statistik tahun 2002 tercatat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Flores Timur tidak merata antar kecamatan, ada kecamatan yang padat penduduknya, sementara ada kecamatan dengan kepadatan yang amat rendah. Namun secara umum, kepadatan penduduk per Kecamatan rata-rata sebesar 110 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Larantuka dengan rata-rata 245 jiwa/km², sedang kecamatan Titehena dengan kepadatan terendah yakni rata-rata 48 jiwa/km². Gambaran selengkapnya mengenai persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini.

Tabel 2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Flores Timur

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
01.	Wulanggitang	329,49	18.680	57
02.	Titehena	186,70	10.426	48
03.	Tanjung Bunga	343,16	16.925	49
04.	Larantuka	133,28	32.679	245
05.	Ile Mandiri	74,24	7.901	106
06.	Solor Barat	150,68	11.182	74
07.	Solor Timur	75,66	13.831	183
08.	Adonara Barat	133,96	19.173	168
09.	Wotan Ulumado	75,81	6.627	87
10.	Adonara Timur	108,94	21.902	201
11.	Ile Boleng	51,39	11.560	225
12.	Witihama	77,97	12.614	163
13.	Klubagolit	91,57	17.532	191
	Jumlah	1.812,85	199.586	110

Sumber Data: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2002.

b. Angkatan Kerja

Struktur penduduk dilihat dari lapangan usaha, menurut Biro Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur tahun 2002, mencatat bahwa total penduduk usia kerja yakni sebanyak 94.378 orang, dan yang terserap disektor primer (pertanian) sebanyak 67.101 orang (71,10 %) Sebanyak 11.216 orang (11,88 %) bekerja disektor sekunder (meliputi: pertambangan, industri, listrik, gas dan air minum, konstruksi), sedang sisanya sebesar 16.061 orang (17,02 %) bekerja disektor tersier (meliputi: perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa). Uraian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 1999-2002

No.	Lapangan Usaha Utama	Laki-laki		Perempuan	
		1999	2002	1999	2002
01.	Primer	48.701	34.351	51.304	32.700
02.	Sekunder	2.622	4.594	7.436	6.622
03.	Tersier	13.485	8.047	8.007	8.014
04.	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	64.808	46.992	66.485	47.386

Sumber Data: BPS Kabupaten Flores Timur, 2002

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terjadi penurunan pada semua sektor yang disebabkan mobilitas angkatan kerja ke luar daerah dan meningkatnya minat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di daerah lain.

Di samping itu, jumlah angkatan kerja terbesar adalah perempuan yang terserap dalam sektor primer, hal mana keterlibatan mereka hanya sebagai pekerja keluarga dan bukannya sebagai tenaga professional. Dengan demikian pada sektor ini terdapat tenaga setempat yang menganggur.

1.4. Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Potensi lahan untuk tanaman pangan seluas 108.783 Ha, terdiri dari:

- Lahan kering 104.639 Ha, dan lahan basah hanya 3.866 Ha.
- Potensi lahan untuk perkebunan, seluas 120.863 Ha.
- potensi lahan untuk padang penggembalaan seluas 5.409 Ha.

1.5. Kondisi Sosial Budaya

a. Pendidikan

- Sekolah Dasar : 273 unit
- SMTP : 51 unit
- SMTA Umum : 13 unit



d) SMTA Kejuruan : 4 unit

Sedang banyaknya murid per tingkatan sekolah adalah:

a) SD : 31.099 orang

b) SMTP : 8.099 orang

c) SMTA Umum : 4.502 orang

d) SMTA Kejuruan : 896 orang

b. Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Flores Timur, adalah:

a) Rumah Sakit Umum (RSU) : 1 unit

b) Puskesmas : 14 unit

c) Poliklinik : 43 unit

Sedang jumlah tenaga pelayanan kesehatan di Kabupaten Flores Timur, adalah:

a) Dokter : 23 orang

b) Perawat : 117 orang

c) Bidan : 130 orang

d) Paramedis lainnya : 64 orang

c. Agama

Jumlah pemeluk Agama di Kabupaten Flores Timur, adalah sebagai berikut:

a) Katolik : 167.907 orang

b) Islam : 42.661 orang

c) Protestan : 1.474 orang

d) Hindu : 99 orang



1.6. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Pertanian

Luas panen dan produksi Padi adalah: Luas panen : 6.973 Ha, dengan produksi: Gabah kering : 15.073 ton, Beras : 8.653 ton

1) Padi Sawah

Luas panen : 254 Ha, yang meliputi: gabah kering 1.333 ton dan beras 777 ton, atau dengan rata-rata produksi 53,53 Kwintal/Ha.

2) Jagung

Luas panen : 13.809 Ha, dengan produksi: 20.338 ton, atau rata-rata produksi: 14,73 Kwintal/Ha.

3) Ubi kayu

Luas panen : 5.175 Ha, dengan produksi: 22.707 ton, atau rata-rata produksi: 44,11 Kwintal/Ha.

4) Ubi Jalar,

Luas panen : 173 Ha, dengan produksi: 718 ton, atau rata-rata produksi: 41,50 Kwintal/Ha.

5) Kacang Tanah,

Luas panen : 1.557 Ha, dengan produksi: 1.434 ton, atau rata-rata produksi: 9,20 Kwintal/Ha.

6) Kacang Hijau

Luas panen : 1.078 Ha, dengan produksi: 1.057 ton, atau rata-rata produksi: 9,84 Kwintal/Ha.

Sedang produksi sayur-sayuran, menurut data Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Flores Timur mencatat bahwa:



Bawang Merah: 23 ton, Kubis : 55 ton, Petsai/Sawi: 138 ton, Kacang-kacangan: 157 ton, Cabe: 83 ton, Tomat: 123 ton, Terung: 112 ton, Ketimun: 80 ton, Kangkung : 87 ton, dan Bayam:108 ton.

Produksi buah-buahan, dapat dirinci sebagai berikut: Alpokat : 4.700 kwintal, Mangga: 6.490 kwintal, Rambutan: 120 kwintal, Jambu Biji: 420 kwintal, Jeruk Keprok : 900 kwintal, Jambu Air: 170 kwintal, Papaya: 5.470 kwintal, Pisang: 50 kwintal, Nenas: 120 kwintal, Salak: 10 kwintal, Nangka: 850 kwintal, Sawo: 570 kwintal, belimbing: 40 kwintal, dan sirsak: 40 kwintal.

b. Perkebunan

(1) Tanaman Kelapa;

Luas areal tanaman kelapa di Kabupaten Flores Timur adalah 9.915,90 Ha, dengan rincian:

- a. Belum menghasilkan, seluas 2.260,27 Ha,
- b. Sudah menghasilkan seluas 7.665,63 Ha.
- c. Produksi : 8.748,66 ton

(2) Tanaman Kopi

Luas areal tanaman Kopi di Kabupaten Flores Timur adalah 2.804,71 Ha, dengan rincian:

- a. Belum menghasilkan, seluas 1.429,04 Ha,
- b. Sudah menghasilkan seluas 1.404,02 Ha.
- c. Produksi : 240,312 ton

(3) Tanaman Cengkeh

Luas areal tanaman Cengkeh di Kabupaten Flores Timur adalah 381,61 Ha dengan rincian:





- a. Belum menghasilkan, seluas 270,50 Ha,
- b. Sudah menghasilkan seluas 111,11 Ha.
- c. Produksi : 23,758 ton

(4) Tanaman Kakao

Luas areal tanaman Kakao di Kabupaten Flores Timur adalah 2.066,2 Ha, dengan rincian:

- a. Belum menghasilkan, seluas :1.511,00 Ha,
- b. Sudah menghasilkan seluas :555,22 Ha.
- c. Produksi : 176,007 ton

(5) Tanaman Pinang

Luas areal tanaman Pinang di Kabupaten Flores Timur adalah 184,56 Ha, dengan rincian:

- a. Belum menghasilkan, seluas 83,22 Ha,
- b. Sudah menghasilkan, seluas 101,34 Ha.
- c. Produksi : 34,881 ton

(6) Tanaman Kapok

Luas areal tanaman kapok di Kabupaten Flores Timur adalah 280,22 Ha, dengan rincian:

- a. Belum menghasilkan, seluas 29,01 Ha,
- b. Sudah menghasilkan, seluas 251,21 Ha.
- c. Produksi : 48,425 ton

(7) Tanaman Pala

Luas areal tanaman Pala di Kabupaten Flores Timur adalah 129,89 Ha, dengan rincian:

- a. Belum menghasilkan, seluas 74,65 Ha,



b. Sudah menghasilkan, seluas 55,24 Ha.

c. Produksi : 26,766 ton

(8) Tanaman Lada

Luas areal tanaman Lada di Kabupaten Flores Timur adalah 40,84 Ha,

dengan rincian:

a. Belum menghasilkan, seluas 34,93 Ha,

b. Sudah menghasilkan, seluas 5,91 Ha.

c. Produksi : 2,778 ton

(9) Tanaman Jambu Mete

Luas areal tanaman Jambu Mete di Kabupaten Flores Timur adalah

23.060,53 Ha, dengan rincian:

a. Belum menghasilkan, seluas 14.044,69 Ha,

b. Sudah menghasilkan, seluas 9.015,84 Ha.

c. Produksi : 7.239,694 ton

(10) Tanaman Kemiri

Luas areal tanaman Kemiri di Kabupaten Flores Timur adalah 2.331,71 Ha,

dengan rincian:

a. Belum menghasilkan, seluas 1.331,82 Ha,

b. Sudah menghasilkan, seluas 999,89 Ha.

c. Produksi : 710,486 ton

c. Peternakan

Data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Flores Timur (2002), jumlah ternak dapat dirinci menurut jenisnya, seperti berikut:



Sapi : 2.029 ekor, Kerbau : 30 ekor, Kuda : 2.194 ekor, Kambing: 44.922 ekor, domba : 1.906 ekor, babi: 71.000 ekor. Sedang jumlah unggas, dapat dirinci: Ayam Buras : 468.860 ekor, Itik : 9.466 ekor.

d. Perikanan

Jumlah rumah tangga usaha perikanan laut dan kategori usaha, dapat dirinci menurut jenisnya, seperti berikut:

- a. Perahu tanpa motor : jukung : 454 unit,
- b. perahu papan: 2.789 unit
- c. Motor tempel : 368 unit
- d. Kapal motor (< 5 GT) : 299 unit.

Produksi ikan perairan laut tahun 2002 adalah 323.243 ton, meliputi jenis ikan berikut: Ikan Paperek; 618 ton, ikan merah; 413 ton, ikan kerapu: 204 ton, ikan kakap: 294 ton, ikan ekor kuning: 534 ton, ikan cucut: 162 ton, ikan alu-alu: 89 ton, ikan selar: 881 ton. Ikan tembang: 381 ton, ikan julung-julung; 517 ton, ikan teri: 328 ton, ikan terbang: 50 ton, ikan kembung: 404 ton, ikan kome: 96 ton.

Di samping itu terdapat produksi ikan laut bukan jenis ikan perairan Flores Timur, yaitu: Lobster: 2.000 ton, cumu-cumi : 34 ton, kerang darat: 179.500 ton, teripang: 14 ton.

Menurut BPS Kabupaten Flores Timur, 2002, mencatat pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok barang, yakni makanan dan bukan makanan berjumlah Rp 87.558, yang meliputi :

- a) Makanan : Rp 66.283 (75,70%)
- b) Bukan makanan : Rp 21.275 (24,30%)



Angka ini masih lebih rendah bila dibanding pengeluaran rata-rata perkapita propinsi NTT menurut kelompok barang, yakni Rp 94.461/bulan yang meliputi:

a) Makanan : Rp 68.466/bulan

b) Non Makanan : Rp 25.995/bulan

Secara administratif, lokasi penelitian yaitu Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Weri terletak di Kecamatan Larantuka, yang merupakan ibukota Kabupaten Flores Timur. Kecamatan Larantuka terbagi dalam 8 desa dan 14 kelurahan, dengan luas wilayah 133,28 km², dan merupakan kecamatan yang berpenduduk paling padat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Flores Timur. Menurut Monografi Kecamatan Larantuka, tahun 2002, mencatat jumlah penduduk Kecamatan Larantuka adalah 34.933 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga adalah 6.807 KK, dengan tingkat kepadatan penduduk 245 jiwa per Km². Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Larantuka Dirinci Menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/ Kelurahan	Penduduk		Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
01.	Weri	1.071	1.086	2.157	384
02.	Sarotari	2.331	2.022	4.353	751
03.	PTW. Bao	2.239	2.260	4.499	856
04.	Ekasapta	1.443	1.451	2.894	449
05.	Amagarapati	1.116	1.090	2.206	321
06.	Postoh	1.164	1.154	2.318	481
07.	Lokea	657	639	1.296	299
08.	Lohayong	298	288	586	109
09.	Pohon Sirih	356	333	689	121
10.	Balela	561	546	1.107	227
11.	Larantuka	561	501	1.062	247
12.	Pantai Besar	462	442	904	271
13.	Lewolere	1.106	997	2.103	518
14.	Waibalun	1.274	1.188	2.462	535
15.	Lamawalang	359	375	734	119
16.	Mokantarak	491	471	962	171
17.	Bama	329	322	651	160
18.	Blepanawa	319	295	614	102
19.	Lewokluok	573	558	1.131	288
20.	Lamika	546	518	1.064	148
21.	Kawalelo	323	256	279	131
	Jumlah	17.868	17.065	34.933	6.807

Sumber Data: Monografi Kecamatan Larantuka, 2004

Secara geografis, lokasi penelitian yaitu Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Weri, dengan ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah masing-masing sebagai berikut :

a. Kelurahan Sarotari :

- a) Utara : Berbatasan dengan Ile mandiri
- b) Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Weri
- c) Selatan: Berbatasan dengan Laut
- d) Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Puken Tobi Wangin Bao

b. Kelurahan Weri :

- a) Utara : Berbatasan dengan Ile Mandiri

- b) Timur : Berbatasan dengan Desa Tiwatobi
- c) Selatan: Berbatasan dengan Laut
- d) Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Sarotari

Data Kelurahan mencatat bahwa sampai dengan tahun 2004, penduduk lokasi penelitian yakni, Kelurahan Sarotari dengan jumlah penduduk 4.353 jiwa, yang terdiri dari : Laki-laki 2.331 jiwa dan perempuan 2.022 jiwa, menempati wilayah dengan luas 788 Ha; jumlah kepala keluarga 751 KK yang terbagi dalam 12 RW dan 27 RT.

Mata pencaharian penduduk kelurahan Sarotari dan kelurahan Weri dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Mata pencaharian Penduduk Kelurahan Sarotari dan Weri

No.	Mata Pencaharian	Kelurahan	
		Sarotari	Weri
01.	Petani	1.846	384
02.	Industri Rumah Tangga	34	26
03.	Pelayanan jasa	26	28
04.	Perdagangan (Toko Kecil/Kios)	143	84
05.	PNS, TNI/POLRI	368	292
06.	Tidak kerja/Anak-anak	1.377	967
07.	Buruh	254	241
08.	Lain-lain	395	967
	Jumlah	4.353	2.157

Sumber Data: Monografi Kecamatan Larantuka, 2004

Fasilitas umum yang dimiliki Kelurahan Sarotari, dari data kelurahan tercatat fasilitas pendidikan: 2 (dua) buah gedung Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) buah gedung Taman Kanak-kanak (swasta), dan 1 (satu) buah gedung Sekolah Menengah Pertama (swasta).

Di samping itu terdapat fasilitas umum berupa kantor pemerintah dan swasta yang terletak dalam wilayah Kelurahan Sarotari yaitu; gedung Kantor Statistik, gedung Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah,

gedung Kantor Dinas Pariwisata, gedung kantor Kejaksaan Negeri dan gedung Rumah Tahanan Larantuka, gedung kantor PLN serta pusat pelayanan umum kesehatan, yaitu gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Sarotari berpendidikan SD/SLTP/SLTA. Dari jumlah penduduk yang ada, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Penduduk yang berpendidikan SD/ sederajat, dapat dirinci sebagai berikut : -

Tidak Tamat SD : 256 orang; tamat SD sebanyak : 392 orang dan sebanyak 266 masih sekolah (SD).

b. Penduduk yang pendidikan SLTP/ sederajat : 228 orang tidak tamat SLTP, 102 orang tamat SLTP , dan 241 orang masih sekolah (SLTP) ;

c. Penduduk yang pendidikan SLTA/ sederajat : Tidak tamat SLTA : 224 orang, Tamat SLTA : 301 orang dan masih sekolah: 233 orang;

d. Penduduk yang berpindidikan Akademi/ Sarjana: Tidak tamat perguruan tinggi: 34 orang; Tamat Akademi/ Sarjana : 86 Diploma dan 23 orang masih dibangku kuliah.

Agama/kepercayaan yang dianut penduduk Kelurahan Sarotari, dapat dirinci, sebagai berikut: Katolik : 3.914 orang, Islam : 181 orang, Protestan : 258 orang, Hindu/ Budha : - orang.

Sedang fasilitas tempat peribadatan cukup memadai yakni 3 (tiga) buah kapela dan 1 (satu) buah gereja. Sementara kondisi prasana jalan di Kelurahan Sarotari pada umumnya beraspal, hanya pada beberapa tempat terdapat jalan setapak dari semen. Sedangkan di wilayah pemukiman yang baru dirintis, terdapat jalan-jalan tanah dan berbatu. Kelurahan Sarotari, dilalui angkutan kota dan angkutan pedesaan, yang biasanya menggunakan kendaraan roda empat berupa: mikrolet,



bus dan sepeda motor untuk berbagai kepentingan seperti ke pasar, atau ke kantor-kantor pemerintah baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Sedang Kelurahan Weri, sesuai data yang ada pada Kelurahan, tercatat fasilitas umum meliputi fasilitas pendidikan yakni 1 (satu) buah gedung Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) buah gedung Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 1 (satu) buah gedung Sekolah Teknik (swasta) dan 1 (satu) buah gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (swasta).

Dari jumlah penduduk yang ada, dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang berpendidikan SD, dapat dirinci :Tidak Tamat SD : 293 orang, dan Masih Sekolah (SD) : 226 orang; dan Tamat SD : 278 orang.
- b. Penduduk yang berpendidikann SLTP, dapat dirinci: 194 orang tidak tamat SLTP, 241 orang masih Sekolah (SLTP) dan 255 Orang tamat SLTP.
- c. Penduduk yang berpendidikan SLTA, dapat dirinci : 225 orang tidak tamat SLTA, sedang yang masih sekolah (SLTA): 151 orang, dan 223 tamat SLTA,
- d. Penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana: Pendidikan Diploma/Akademi: 42 orang dan Pendidikan Sarjana: 31 Orang, dan masih dibangu kuliah: 46 orang

Agama/kepercayaan yang dianut penduduk Kelurahan Weri dapat dirinci, sebagai berikut: Katolik : 1.869 orang, Islam : 202 orang, Protestan : 244 orang dan Hindu/Budha : 2 orang

Fasilitas tempat peribadatan dirasa cukup memadai dengan 1 (satu) buah gereja, dan 1 (satu) buah masjid. Sedang kondisi prasarana jalan yang ada di Kelurahan Weri sebagian besar jalan beraspal, sedang di beberapa lorong pemukiman warga terlihat masih berupa jalan tanah dan berbatu, dan

sebagiannya lagi jalan/lorong yang sudah di semen. Karena letak kelurahan ini dilalui oleh jalan utama yang menghubungkan pasar dan pusat perdagangan dengan kota-kota kecamatan, sehingga tersedia pula angkutan kota dan sepeda motor untuk berbagai kepentingan.

Selain itu, terdapat fasilitas umum, berupa: 1 (satu) buah gedung kantor Dinas Perhubungan dan 1 (satu) buah gedung Terminal untuk angkutan pedesaan, dan 1 (satu) buah gedung olah raga, yang sering digunakan untuk kegiatan olahraga bulu tangkis/badminton.

Dari pengamatan selama di lapangan diperoleh gambaran bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi kekerabatan/kekeluargaan. Ikatan sosial yang kuat itu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai warisan pemerintahan Kerajaan Larantuka dan nilai-nilai keagamaan warisan penjajah, Portugis. Hal ini ditunjukkan dengan kepercayaan yang tinggi atas adat-istiadat yang dijalankan secara cukup teratur dan tradisi keagamaan warisan Portugis, yang hingga kini masih terpelihara dengan baik.

Bahasa dalam pergaulan sehari-hari yang digunakan penduduk Larantuka umumnya (termasuk penduduk Kelurahan Sarotari dan Weri) adalah bahasa melayu, khas Larantuka, yang dibawa masuk oleh penjajah Portugis pada awal abad ke 16 atau pada tahun 1513. Di samping memiliki bahasa pergaulan sendiri, masyarakat cukup fasih berbahasa Indonesia. Masyarakat juga dikenal luwes dan mudah mengikuti perkembangan zaman, selain sebagai akibat pesatnya pengaruh perkembangan telekomunikasi dan informasi, juga karena letak wilayah ini berada di pesisir yang sudah sejak lama mudah sekali menerima pengaruh dari luar akibat hubungan perdagangan.



1.7. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan isyarat Peraturan Pemerintah nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, menjabarkannya lebih jauh melalui Peraturan Daerah nomor: 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

Dalam rangka implementasi tugas pokok pemerintah, khususnya berkaitan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM menetapkan arah dan kebijaksanaan seperti terlihat melalui Visi, Misi, dan Program Strategis sebagai berikut:

Visi:

Menjadikan koperasi dan Usaha kecil menengah serta Kelompok-kelompok ekonomi produktif sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri serta mampu meningkatkan daya saing.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Flores Timur adalah:

- 1) Memberdayakan koperasi dan UKM serta kelompok ekonomi produktif menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri serta mampu.
- 2) Meningkatkan daya saing dengan mengembangkan sumberdaya pengelola koperasi.
- 3) Mengembangkan kemitraan usaha untuk meningkatkan akses permodalan.



- 4) Memfasilitasi Koperasi dan UKM serta berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Program Strategis:

Berdasarkan visi dan misi seperti tersebut di atas maka program strategis Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Koperasi:

- a) Penumbuhan kemitraan
- b) Peningkatan koordinasi
- c) Penataan dan peningkatan kelembagaan koperasi
- d) Pemberdayaan koperasi, peningkatan produksi pangan
- e) Pemberdayaan koperasi dan usaha distribusi
- f) Peningkatan sumber daya manusia koperasi.

2. Program Pemberdayaan UKM

- a) Pemberdayaan UKM di bidang industri pertanian dan non pertanian, perdagangan dan aneka usaha.
- b) Bimbingan teknis kelembagaan dan usaha
- c) Peningkatan akses permodalan
- d) Menjalani kemitraan usaha
- e) Pendampingan
- f) Promosi, pameran dan pasar rakyat.

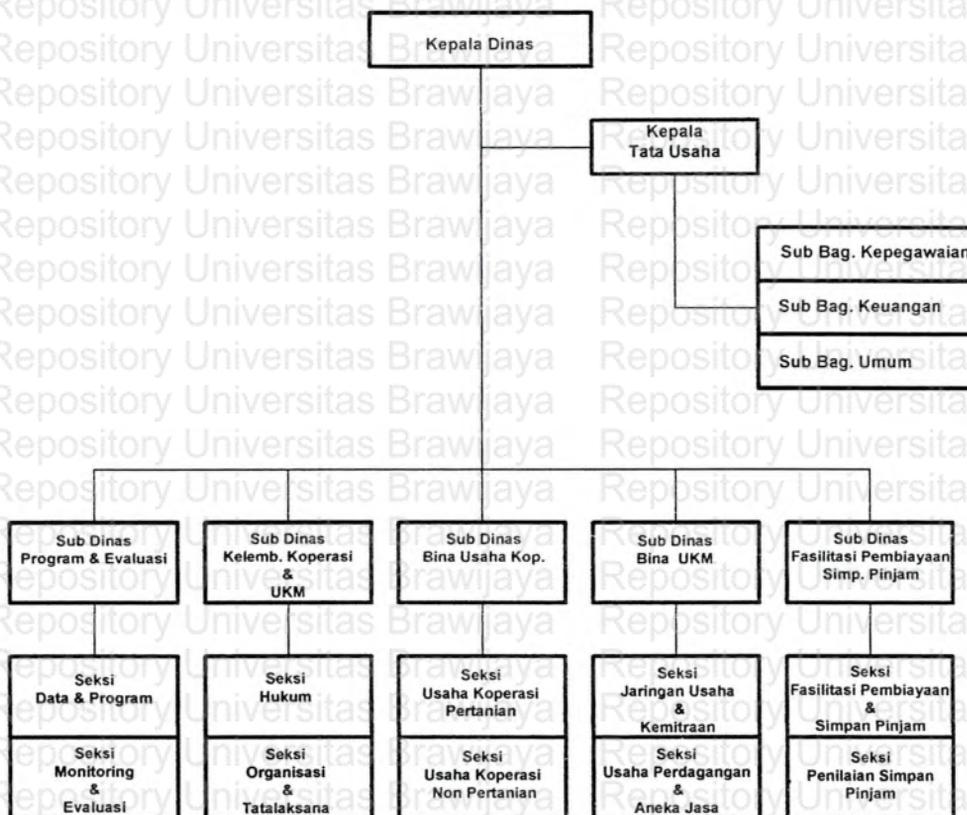
3. Program Fasilitasi Pembiayaan Dan Simpan Pinjam

- a) Penumbuhan kemitraan usaha
- b) Penataan dan pembinaan Unit Simpan Pinjam.
- c) Peningkatan mutu penilaian kesehatan KSP/USP.



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tersebut maka Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur



Sumber Data: Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2001.

1.8. Profil Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka

Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL) adalah yayasan milik Keuskupan Larantuka yang didirikan pada tanggal 25 September



1979, yang berbadan hukum dengan akte notaris nomor: 1 tahun 1979 dan nomor: 56 tahun 1990. Yayasan ini berada di bawah naungan Delegatus Socialis (Delsos) dalam rangka mengimplementasikan program Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Larantuka (Komisi PSE-KL). Pembangunan sosial ekonomi yang merupakan bagian integral dari karya pastoral dapat dilaksanakan secara manajerial, apalagi ditengah dan untuk mayoritas penduduk yang miskin dan susah yang lolos dari perhatian dan sentuhan pembangunan.

Maksud dan Tujuan:

- a. Melaksanakan karya pastoral gereja dalam bidang sosial ekonomi.
- b. Mengakomodasi dan memediasi kebutuhan masyarakat dan menyalurkan bantuan kemanusiaan dari lembaga donor.
- c. Membentuk dan atau mendampingi (motivasi, animasi dan fasilitas) kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk berpikir dan berupaya alternatif membangun kesejahteraan sosial ekonomi.
- d. Membina dan menjalin kerjasama dan kemitraan (networking) baik dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah (Ornop).

Visi : Terbentuknya paguyuban-paguyuban yang saling melayani.

Misi :

- a. Mewartakan 'keselamatan' melalui pelayanan sosial ekonomi.
- b. Menanam dan menumbuhkan kesadaran sosial-ekonomi dan mengembangkan keterlibatan aktif mewujudkan 'saling melayani'.
- c. Mendorong aksi-aksi nyata untuk solidaritas sosial-ekonomi.
- d. Semakin banyak orang/paguyuban menolong/saling melayani bukan sebaliknya ditolong/dilayani.

**Program Strategis:**

- a. Pengumuman (sosialisasi) visi, misi pembangunan sosial-ekonomi.
- b. Berpartisipasi dalam gerakan Aksi Puasa Pembangunan (APP).
- c. Pengembangan Swadaya Masyarakat (PSM) dalam rangka membangun partisipasi melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan metode SPIRAL dan PRA.
- d. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan (Networking) dengan pemerintah, NGO lokal, nasional dan internasional.

Bidang Kegiatan:

- a) Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga/Kelompok (UP2K) melalui aneka Usaha Bersama Simpan Pinjam (UB-SP) dan Usaha Bersama – Usaha Produktif (UB-USPRO), usaha pribadi/ perorangan/keluarga dalam kerangka program pengembangan usaha kecil (*Small Enterprise Development*.)
- b) Pertanian terpadu dan berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) membiarkan alam yang bekerja, dengan tekanan pada konservasi, diversifikasi, PHT, pemasaran dan penguatan institusi petani.
- c) Pemberdayaan kelompok wanita/ibu melalui program Kelompok Swadaya wanita (KSW) dalam rangka kemitraan dan gender.
- d) Kesehatan Dasar (*Primary Health Care*), dengan tekanan pada '*Community Based Health Care*' yang meliputi Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih.
- e) Tanggap darurat (*Emergency Program*).

Bentuk Kegiatan:

- a) Perencanaan bersama kelompok/masyarakat (SPIRAL dan PRA)
- b) Survey, observasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi.



- c) Pendidikan dan Latihan.
- d) Perkreditan
- e) Pendampingan dan pengemangan kelompok/Masyarakat (motivasi, animasi, dengan strategi *live-in* dan *home-visit*)

Sumber Daya

- a) Manadhana: Personil yang punya integritas pribadi dan team work yang kompak, berdedikasi dan berkomitmen 'pemberdayaan' serta punya keterampilan dan pengalaman dalam komunikasi, perencanaan dan problem-solving.
- b) Sadhana: Sarana, fasilitas yang memadai untuk kelangsungan hidup lembaga dan pengimplementasian program.
- c) Dharma; Ethos/Etika kerja, yang menjamin disiplin dan kinerja serta moralitas dan spiritualitas yang mengarifkan budi, meluruskan hati dan menjernihkan nurani.
- d) Dana: Mulai dari apa yang ada pada masyarakat sendiri (bdk. Mrk 5:38), Donatur dalam dan luar negeri, keuskupan dan jasa program kerjasama.

Wilayah Kerja:

Keuskupan Larantuka, yang meliputi Kabupaten Flores Timur dan Lembata.

Jaringan Kerja:

▪ **Organisasi/Lembaga Pemerintah:**

- a. Bappeda,
- b. PMD,
- c. Dinas PU,
- d. Dinas Kesehatan,
- e. Dinas Koperasi,



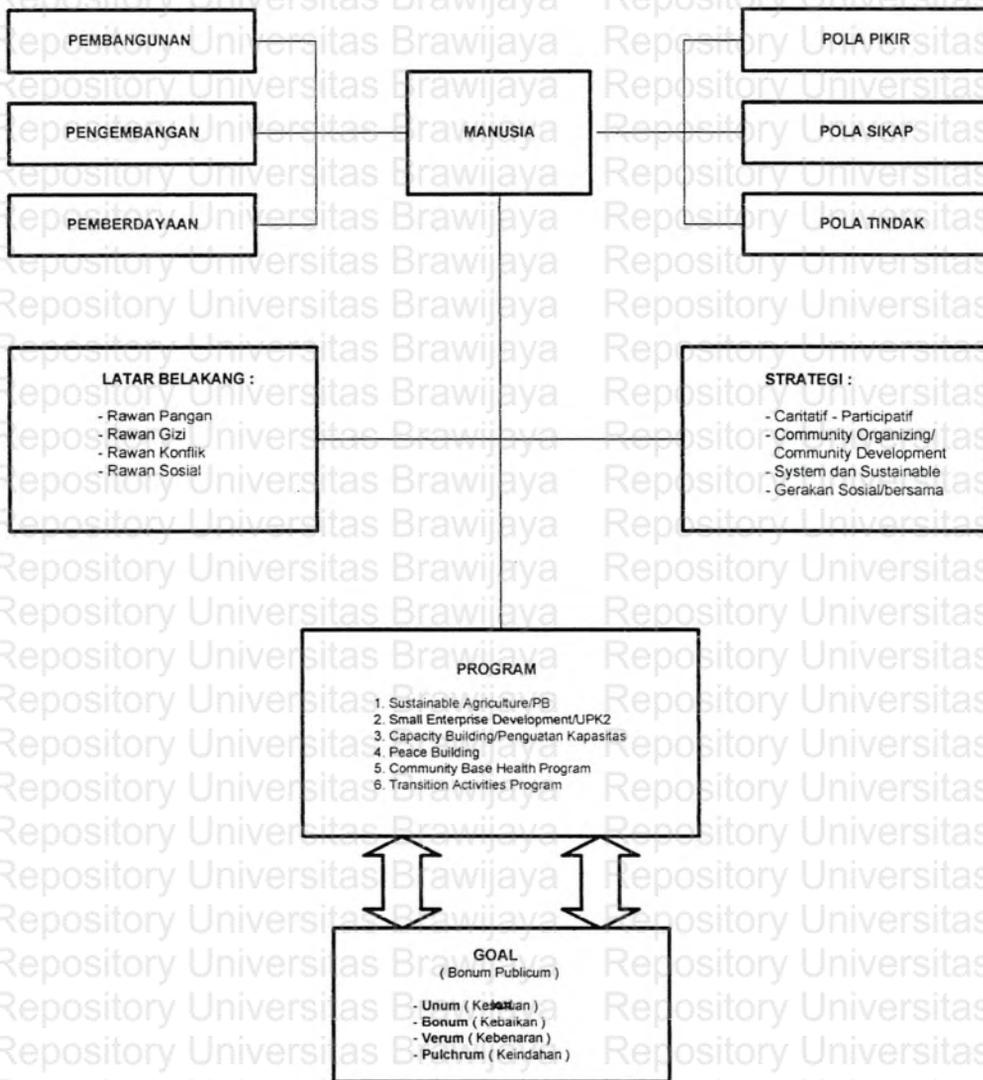
f. Dinas Tenaga Kerja, dan dinas-dinas terkait lainnya.

▪ **Organisasi Non Pemerintah (Ornop):**

- a. Misereor/Caritas Jerman,
- b. Christian Children's Fund (CCF-USA)
- c. Catholic Relief Services (CRS-USA)
- d. Eropcan Commission Humanitarian Office (ECHO)
- e. World Bank (Bank Dunia)
- f. PSE-KWI LPPS/Caritas Indonesia
- g. Bina Swadaya
- h. Dian Desa
- i. Perdhaki
- j. LPPS Nita
- k. Komisi-komisi Keuskupan
- l. Paroki-Paroki dalam Keuskupan

Dari uraian mengenai visi-misi dan program strategis di atas, berikut ini akan dibuat semacam skema alur pikir / konsep program, seperti tergambar di bawah ini:

Gambar 3 : Konsep, Strategi dan Sasaran Program YASPENSEL



Sumber Data: Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka, 2004



Bertolak dari gambaran umum sebagaimana terurai di atas, jelas terlihat bahwa masyarakat pada umumnya masih cukup homogen, yang masih kuat terikat pada tradisi dan budaya setempat. Susunan masyarakat yang demikian biasanya memiliki dinamika dan pergeseran secara sosial, budaya yang relatif kecil pula.

Sementara secara geografis, kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan, yang terdiri dari tiga pulau besar (pulau Flores bagian timur, pulau Adonara, dan pulau Solor) memiliki topografi yang berbukit dan bergunung, dengan iklim tropis dimana musim hujan yang relative pendek, yakni dari bulan Nopember sampai bulan April. Wilayah kepulauan inilah, yang boleh jadi menciptakan kesenjangan atau jarak secara sosial, politik dan ekonomi. Hal ini pula yang membawa kesulitan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan pola dan model pendekatan pelayanan pembangunan yang efektif.

Kondisi yang demikian, akhirnya membuat masyarakat di daerah ini hidup hanya mengandalkan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan curah hujan yang relatif pendek dan tidak menentu serta pola bertani yang umumnya masih tradisional sering menjadi alasan mengapa masyarakat di daerah ini amat rentan terhadap ancaman rawan pangan. Di samping terdapat sumberdaya manusia setempat yang relatif masih rendah, telah ikut memperburuk tingkat kemiskinan masyarakat di daerah ini.

Memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang demikian maka 'pemberdayaan' merupakan langkah penting dan menentukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dan bila dikaitkan dengan visi dan misi, baik pemerintah maupun YASPENSEL, keduanya memiliki komitmen yang kuat terhadap



pemberdayaan masyarakat. Maka di sini, peran keterlibatan pemerintah maupun YASPENSEL dalam pengembangan usaha kecil melalui UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam), tetaplah diperlukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Oleh pemerintah dan YASPENSEL

Pemberdayaan pada hakekatnya mengandung makna keterlibatan elemen masyarakat secara sadar, penuh inisiatif untuk membangun dirinya, tanpa ada paksaan. Kesadaran itulah yang merupakan potensi untuk dikembangkan agar partisipasi mereka menjadi lebih nyata. Walaupun begitu, masyarakat miskin sulit menolong dirinya sendiri. Prakarsa, untuk membantu mereka agar mampu menolong diri mereka sendiri, terletak ditangan 'orang luar' yang memiliki kekuatan dan sumber-sumber yang lebih besar, seperti: Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam sub bab ini akan dipaparkan perihal keterlibatan dan peran pemberdayaan masyarakat melalui Usaha bersama Simpan Pinjam (UBSP) yang difasilitasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, maupun oleh YASPENSEL (Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka).

Secara administratif, Kecamatan Larantuka terbagi dalam 8 desa dan 14 kelurahan, dengan luas wilayah 133,28 km². Kecamatan Larantuka merupakan satu-satunya kecamatan yang berpenduduk lebih padat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.

Data statistik tahun 2002, mencatat jumlah penduduk Kecamatan Larantuka adalah 32.887 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga adalah 6.556 KK, dengan tingkat kepadatan penduduk 245 jiwa per Km².

Bertolak dari kenyataan tersebut, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Larantuka, meliputi Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Weri. Penelitian ini memiliki tujuan utama yakni, untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah maupun oleh Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL) dalam mengembangkan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP), yang difasilitasi oleh pemerintah dan YASPENSEL, serta untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP), yaitu kelompok Usaha bersama Simpan pinjam (UBSP) Rera Gere, yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur dan Kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) Kepuuk Lolon yang difasilitasi oleh Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL).

2.1. Pemberdayaan oleh Pemerintah.

Bahwa program Dinas Koperasi dan UKM seperti terurai di atas, menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan. Salah satu diantara program tersebut adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui pendidikan dan latihan, pembinaan kelembagaan dan bantuan modal usaha. Karena disadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, adalah (1) pengetahuan manajemen yang terbatas, (2) kurangnya keterampilan, (3) rendahnya kemampuan promosi dan pemasaran, dan (4) modal usaha yang relatif kecil.

Memperhatikan kondisi kekurangan/keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha kecil maka selama tahun 2001-2003, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM mengalokasikan dana bergulir dari berbagai sumber untuk Koperasi/KUD, UKM dan LKM di kabupaten Flores Timur berjumlah Rp 2.318.000.000,-

Sumber dana bergulir bagi Koperasi/KUD, UKM dan LKM di Kabupaten Flores Timur tersebut, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Sumber Dana Bergulir Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2001-2003

No.	Sumber Dana	2001 (Rp)	2002 (Rp)	2003 (Rp)
01.	Bantuan Subsidi Kompensasi BBM	250.000.000	400.000.000	370.000.000
02.	Dana Bantuan Dekonsentrasi	7.000.000	15.000.000	145.000.000
03.	Dana Bantuan APBD II	390.000.000	215.000.000	-
04.	Dana Bantuan APBD I	-	110.000.000	120.000.000
05.	Dana Bantuan BDS* dan MAP*	-	250.000.000	-
06.	Dana Bantuan TPK*	30.000.000	-	-
07.	Dana Bantuan BUMN	16.000.000	-	-
	Total	693.000.000	990.000.000	635.000.000

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2004

- * BDS : *Business Development Centre*
- * MAP : *Modal Awal Padanan*
- *TPK : *Tempat Pelayanan Koperasi.*

Dari tabel 6 seperti tergambar di atas, jelas terlihat bahwa total dana bantuan tahun 2001 – 2003 untuk Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp 2.318.000.000,-(Dua miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah). Dari total dana tersebut, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM mendistribusikan kepada koperasi/KUD, UKM dan LKM yang tersebar di 13 kecamatan dalam Wilayah kabupaten Flores Timur, dimana kecamatan Larantuka mendapat porsi terbesar, yakni Rp 1.340.000.000,-(Satu miliar tiga ratus empat puluh juta

rupiah). Pada urutan berikutnya adalah kecamatan yang memperoleh bantuan yang bernilai di atas seratus juta rupiah yang meliputi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Adonara Timur, dengan total bantuan sebesar Rp 190.000.000,-(Seratus sembilan puluh juta rupiah), Kecamatan Titehena menerima bantuan sebesar Rp 185.000.000,-(Seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan Kecamatan Adonara Barat sebesar Rp 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah). Sementara 8 (delapan) kecamatan lainnya menerima bantuan dana kurang dari seratus juta rupiah.

Uraian selengkapnya mengenai distribusi dana bergulir untuk masing-masing kecamatan tahun anggaran 2001-2003 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Penyebaran Dana Bergulir Untuk Koperasi/KUD, UKM, dan LKM Menurut Kecamatan Tahun 2001-2003

No.	Kecamatan	Jumlah (Rp.)
01.	Larantuka	1.340.000.000
02.	Wulanggintang	100.000.000
03.	Titehena	185.000.000
04.	Ile Mandiri	47.500.000
05.	Tanjung Bunga	95.000.000
06.	Solor Barat	50.000.000
07.	Solor Timur	30.000.000
08.	Adonara Barat	125.000.000
09.	Wotan Ulumado	190.000.000
10.	Adonara Timur	20.000.000
11.	Ile Boleng	45.000.000
12.	Witihama	15.000.000
13.	Klubagolit	65.000.000
	Total	2.318.000.000

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur.

Seperti terlihat pada tabel di atas, bahwa Kecamatan Larantuka memperoleh dana bergulir terbesar, melebihi kecamatan lainnya yakni senilai Rp 1.340.000.000,-(Satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Dana tersebut

disalurkan ke Koperasi/KUD, UKM Desa/ kelurahan dalam wilayah Kecamatan Larantuka. Persebaran dana bergulir per Desa/Kelurahan tahun 2001-2003 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 8. Penyebaran Dana Bergulir di Kecamatan Larantuka
Dirinci Menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah (Rp)
01.	Weri	185.500.000
02.	Sarotari	350.500.000
03.	Puken Tobi Wangin Bao	270.000.000
04.	Ekasapta	170.000.000
05.	Amagarapati	54.000.000
06.	Postoh	20.000.000
07.	Lokea	35.000.000
08.	Lohayong	15.000.000
09.	Pohon Sirih	30.000.000
10.	Balela	35.000.000
11.	Larantuka	75.000.000
12.	Waibalun	60.000.000
13.	Lamawalang	25.000.000
14.	Blepanawa	15.000.000
	Jumlah	1.340.000.000

Sumber Data ; Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur



2.1.1. Bentuk dan Proses Pemberdayaan

a. Bentuk Pemberdayaan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa pemberdayaan suatu kelompok/masyarakat sulit dilepaskan dari peran dan keterlibatan 'orang luar'. Hal itu tentu erat kaitannya dengan hakekat dan sifat kemiskinan dari masyarakat, yang pada umumnya tidak memiliki cukup kekuatan untuk keluar dari 'perangkap kemiskinan' bila tidak dibantu oleh 'orang luar'. Maka proses pemberdayaan hanya dapat efektif bila bentuk dan proses pemberdayaan itu mampu bergerak mengikuti (menyesuaikan) dengan situasi dan kondisi atau tingkat perkembangan kelompok/masyarakat setempat, baik sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, meliputi: (1) Pendidikan/latihan, yang mengarah kepada pematapan organisasi dan manajemen usaha, dan (2) bantuan modal usaha. Untuk jelasnya maka dapat diuraikan berikut ini.

1) Pendidikan dan Latihan

Pendidikan dan latihan yang dijalankan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Flores Timur, lebih bernuansa pembinaan dan sosialisasi. Pembinaan dan sosialisai semacam ini, meliputi penataan dan pematapan organisasi serta pengurus. Biasanya mencakup pembentukan kelompok/organisasi, penetapan pengurus hingga penataan administrasi kelompok.

Proses pembinaan dan sosialisasi ini merupakan prasyarat bagi penyaluran dana bergulir kepada kelompok/masyarakat. Hal demikian seperti diungkapkan Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Dinas



Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, Ibu Afliana B. Nange, SH
sebagai berikut:

“Sebelum anggota kelompok mendapat bantuan modal, langkah pertama yang kami (Dinas Koperasi dan UKM) lakukan adalah membentuk kelompok/organisasi. Ini sesuai isyarat Keputusan menteri Koperasi dan UKM nomor 23 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro, terutama berkaitan dengan persyaratan penerima dana bergulir. Bila kelompok/organisasi sudah ada maka kami tinggal memantapkan saja melalui pembinaan menyangkut: administrasi dan pengenalan pengurus akan manfaat koperasi, prinsip-prinsip koperasi, rapat anggota, rapat pengurus dan pengawas serta sistim pembinaan anggota”. (Wawancara, tanggal 10 April 2004).

Senada dengan hal tersebut di atas, Ignas Igo, salah seorang anggota kelompok UBSP Rera Gere, menyatakan:

“Kelompok ini pada awalnya adalah kelompok arisan, yang lebih mengutamakan hubungan sosial antar anggota. Kemudian kelompok ini berubah menjadi Kelompok UBSP untuk kepentingan usaha dan menabung lewat kelompok, yang disponsori Dinas koperasi dan UKM. Waktu itu, kami belum mempunyai badan hukum, badan pengurus, badan pengawas dan lain-lain, kemudian dibentuk dan mulai melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan anggota dan administrasi. Sekarang ini, para pengurus diberi pembinaan khusus untuk membuat neraca, perhitungan rugi/laba dan pembuatan buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar pengawas dan buku daftar simpan pinjam dan lain-lain. Selain itu, para pengawas diberi pembinaan untuk pengawasan terhadap kegiatan/usaha dan administrasi kelompok”. (Wawancara, tanggal 07 April 2004)

Melalui pembinaan dan pelatihan semacam ini, diharapkan anggota maupun pengurus dapat lebih memahami kaidah-kaidah organisasi serta mampu mengelola organisasi/kelompok dengan lebih baik. Dalam arti anggota dan pengurus sanggup membina dan memelihara hubungan kerjasama serta pelaksanaan pengawasan yang semakin efektif dalam rangka mewujudkan tujuan bersama melalui organisasi/kelompok.

2) Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha merupakan bentuk pemberdayaan yang dianggap memiliki 'daya dorong' yang kuat dan menentukan bagi masyarakat kecil. Bahwa bantuan modal usaha yang ditempuh pemerintah merupakan langkah terobos yang penting dalam upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Karena pengusaha kecil umumnya tidak memiliki akses dan kemampuan untuk memperoleh bantuan dana dari lembaga perbankan, yang umumnya menerapkan syarat administrasi dan jaminan yang sulit dipenuhi pengusaha kecil.

Dengan demikian, bantuan modal usaha yang disediakan pemerintah ini amatlah menolong masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha, apalagi dengan bunga yang relatif terjangkau dan tanpa jaminan/agunan. Kemudahan yang disiapkan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM ini, amat membantu mereka untuk mengembangkan usaha kecil, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Seperti dikemukakan salah seorang pengurus UBSP Rera Gere, Bapak Silvinus Boro, berikut ini:

"Selama ini saya mencoba untuk meminjam dana dari bank, untuk tambah modal usaha. Namun selalu gagal karena harus ada jaminan seperti sertifikat tanah, bangunan/rumah, atau barang berharga lainnya dan hal ini sulit untuk saya penuhi. Tapi sekarang saya merasa senang karena pemerintah mulai memberi pinjaman dana, dengan bunga yang rendah. Apalagi dapat dicicil selama jangka waktu tertentu dan tidak ada jaminan barang atau benda berharga seperti yang diterapkan oleh bank. Sekarang ini saya senang karena bisa dapat bantuan dana dari pemerintah lewat kelompok". (Wawancara, tanggal 6 April 2004).

b. Proses pemberdayaan

Umumnya, proses pemberdayaan dapat mengandung makna, upaya membangun kekuatan atau kemampuan kelompok/masyarakat agar secara individu dapat mandiri. Melalui proses stimulasi dan dorongan yang



2) Penyuluhan.

Pada tahap ini kelompok prakarsa menentukan agar kegiatan penyuluhan dapat dihadiri para anggota kelompok, minimal 20 orang. Penyuluhan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Melalui penyuluhan diharapkan adanya pemahaman tentang: manfaat berkoperasi, prinsip-prinsip koperasi, Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas serta Sistem pembinaan keanggotaan.

3) Pembentukan Panitia Pendiri.

Pada tahap ini, kelompok pemrakarsa bersama-sama dengan beberapa orang yang telah mengikuti penyuluhan membentuk Panitia Pendiri yang secara otomatis menjadi calon pengurus berdasarkan kemufakatan bersama.

Panitia Pendiri sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni: Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Tugas Panitia adalah: melakukan konsultasi dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk terbentuknya koperasi.

4) Penyebarluasan formulir pendaftaran Calon Anggota.

Panitia Pendiri segera mempersiapkan formulir pendaftaran calon anggota. Membagikan formulir tersebut kepada seluruh anggota untuk diisi dan meminta kepada mereka untuk segera mengembalikan formulir tersebut. Setelah formulir terkumpul, panitia segera mempersiapkan undangan rapat pembentukan koperasi untuk disampaikan kepada para calon anggota serta Dinas Koperasi dan UKM.

5) Rapat Pembentukan Koperasi.

Pembentukan koperasi dihadiri oleh 20 orang calon anggota, pemrakarsa dan panitia Pendiri, Dinas Koperasi dan UKM, Pejabat/Petugas dari instansi/lembaga terkait.

6) Rapat Pengurus dan Pengawas.

Pengurus dan Pengawas segera mengadakan rapat pertama. Tujuan dari rapat pertama adalah:

a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi pengajuan Badan Hukum Koperasi;

b. Membahas program dan RAPBKOP yang telah ditanda tangani.

c. Mempersiapkan kegiatan awal dari program yang telah ditetapkan dan rapat Anggota sehingga usaha segera dapat dilaksanakan.

d. Mempersiapkan buku administrasi koperasi, seperti:

(a) Buku Daftar Anggota.

(b) Buku Daftar Pengurus.

(c) Buku Daftar Pengawas.

(d) Buku Daftar Simpanan Anggota,

7). Pengajuan Badan Hukum.

a) Mengajukan surat permohonan Badan Hukum Koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM.

b) Dinas Koperasi dan UKM kemudian meneliti kelengkapan administrasi permohonan.

c) Bila dianggap cukup lengkap, Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan Surat Tanda Terima.

d) Dengan bermodalkan Surat Tanda Terima, Pengurus Koperasi sudah dapat melaksanakan kegiatan/usaha.

▪ **Prosedur Memperoleh Dana Bantuan dari Pemerintah.**

Prosedur memperoleh bantuan modal dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Flores Timur, adalah :



- a) Mempersiapkan kelompok: Biasanya, kelompok yang sudah ada di masyarakat, kemudian dipersiapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM;
- b) Kelompok mengajukan permohonan kepada Dinas koperasi dan UKM untuk didaftarkan;
- c) Setelah terdaftar, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kepada kelompok, dan kelompok wajib membuat laporan perkembangan kelompok setiap bulan kepada Dinas Koperasi dan UKM;
- d) Kelompok mengajukan permohonan berupa bantuan modal 5.000.000 sampai 10.000.000 untuk usaha kecil.
- e) Bila permohonan tersebut dinilai layak dan memenuhi syarat-syarat administratif maka pencairan dana segera dilakukan melalui Bank pemerintah, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Larantuka.

▪ **Prosedur Pengembalian dan Penetapan Bunga Pinjaman**

- a) Prosedur pengembalian dana pinjaman itu dilakukan dengan cara mengangsur, yang meliputi pokok dan bunga setiap bulan, yang disetor melalui rekening Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kabupaten pada Bank Pemerintah yakni Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Larantuka.
- b) Sedangkan mengenai penetapan bunga pinjaman amat bervariasi, bergantung sumber dana.

Hal itu dapat dilihat seperti pada penetapan bunga untuk sumber dana Subsidi BBM, untuk tahun 2000 dan 2001, bunga 16 % per tahun dengan masa kontrak 3 tahun. Sementara untuk tahun 2003, ditetapkan bunga 16 % per tahun, dengan masa kontrak 10 tahun. Untuk dana yang bersumber dari dana bantuan Dekonsentrasi, ditetapkan bunga 6 % per tahun dengan masa kontrak 3 tahun



untuk tahun 2002, sedang untuk tahun 2003 masa kontrak menjadi 4 tahun. Lalu sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum), ditetapkan bunga pinjaman sebesar 8 % per tahun, dengan masa kontrak 2 tahun.

Kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam Rera Gere, yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Flores Timur, berada di Kelurahan Sarotari dengan anggota berjumlah 22 orang. Kelompok UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) ini, baru didirikan pada tanggal 14 Desember 2001, namun keberadaan kelompok ini sebenarnya sudah cukup lama. Karena sebelum memiliki badan hukum seperti sekarang ini, kelompok UBSP Rera Gere pada mulanya adalah kelompok arisan warga masyarakat yang berasal dari satu wilayah tertentu (Kecamatan Ile Boleng), yang bekerja dan berdomisili di Larantuka.

Latar belakang pekerjaan anggota kelompok ini sebagian besar adalah pegawai negeri yang masih aktif : 11 orang (50 %), dan pensiunan PNS : 6 orang (27,27 %) dan hanya 5 orang (22,73 %) yang bekerja pada lembaga swasta atau usaha mandiri, dengan penghasilan yang relatif kecil.

Pendidikan anggota kelompok, terdiri dari: SD : 1 orang, SLTP : 2, SLTA: 12 orang, Diploma III : 3 orang, S1: 4 orang. Sedang usia anggota dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni : Usia 34 tahun – 44 tahun sebanyak 12 orang (54 %), usia 45 tahun – 55 tahun sebanyak 5 orang (23 %), dan usia 56 tahun – 66 tahun sebanyak 5 orang (23 %).

Usaha yang dikembangkan anggota kelompok pun bervariasi, yakni usaha tenun ikat tradisional, usaha kios dan usaha jual-beli sayur dan buah. Usaha ini sebagian anggota yang baru mulai merintisnya, sedang sebagiannya lagi memang sudah menggelutinya sejak lama, namun kurang berkembang karena faktor manajemen usaha yang belum baik, juga modal usaha yang relatif kecil.





Di dalam kelompok UBSP Rera Gere, tidak semua anggota yang tertarik mengembangkan usaha produktif. Karena ada sebagian anggota yang lebih memilih menggunakan pinjaman untuk hal-hal lain, seperti pembangunan rumah tinggal, biaya pengobatan keluarga yang sakit, atau untuk pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga hanya 12 orang (55 %) anggota saja yang memilih mengembangkan usaha produktif.

Keberadaan kelompok UBSP Rera Gere kendati relatif masih baru, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur terhadap Kelompok UBSP yang ada di Kabupaten Flores Timur, Kelompok UBSP Rera Gere justru dinilai 'sehat'. Adapun kriteria yang digunakan meliputi: a) administrasi kelompok; b) partisipasi anggota; c) usaha/ kegiatan yang dijalankan; d) laporan perkembangan kelompok ; dan e) disiplin dalam mengangsur pinjaman.

Berikut ini akan disajikan Susunan Badan Pengurus dan Anggota Kelompok UBSP Rera Gere, sebagaimana terlihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 9. Daftar Susunan Badan Pengurus dan Anggota
Kelompok UBSP Rera Gere Tahun 2004

No.	Nama	Umur	Keterangan
01.	Andreas Kewa Ama	40 tahun	Ketua
02.	Didakus Kia Dale	39 tahun	Sekretaris
03.	Kosmas Kopong	42 tahun	Bendahara
04.	Ph. L. Tokan	48 tahun	Ketua Bawas
05.	Laurens Nama	39 tahun	Anggota Bawas
06.	Alex Kopong	41 tahun	Anggota Bawas
07.	Karel Laga	58 tahun	Anggota
08.	Anton Bata	49 tahun	Anggota
09.	Valens Taran	42 tahun	Anggota
10.	Petrus Pati	46 tahun	Anggota
11.	Ignas Igo	57 tahun	Anggota
12.	Blasius Bayo	57 tahun	Anggota
13.	Damian Tupe	44 tahun	Anggota
14.	Ben Koting	38 tahun	Anggota
15.	Silvinus Boro	43 tahun	Anggota
16.	Stef Boli	46 tahun	Anggota
17.	Andreas Ola	49 tahun	Anggota
18.	Zakarias Sada	58 tahun	Anggota
19.	Karolus Ola	34 tahun	Anggota
20.	Ande Sinyendir	36 tahun	Anggota
21.	Paulus Bala	56 tahun	Anggota
22.	Ignas payong	37 tahun	Anggota

Sumber Data: Kelompok UBSP Rera Gere, 2004

▪ **Perosedur Memperoleh Dana Pinjaman dari Pemerintah**

Berikut ini akan digambarkan mengenai prosedur dan mekanisme yang ditempuh oleh kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) Rera Gere dalam rangka memperoleh dana dari Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Kelompok membuat permohonan untuk memperoleh bantuan dana kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur.
- b) Petugas dari Dinas Koperasi dan UKM akan turun langsung melakukan *survey* ke lapangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kelompok.

- c) Setelah melihat kondisi lapangan, selanjutnya Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Flores Timur membuat kontrak Kerja sama Operasional (KSO) dengan Kelompok menyangkut hak dan kewajibannya.
- d) Bila Kerjasama Operasional (KSO) telah dibuat, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur baru dapat mengirim berkas-berkas administrasi tersebut ke Dinas Koperasi Propinsi NTT. Selanjutnya Dinas Koperasi Propinsi NTT langsung mentransfer dana ke Rekening Kelompok melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Larantuka, yang selanjutnya kelompok sendiri akan mencairkan dana tersebut.

▪ **Prosedur Anggota Memperoleh Dana dari Kelompok**

Untuk memperoleh dana atau pinjaman modal dari kelompok, anggota perlu melewati prosedur dan mekanisme sebagai berikut:

- a) Sebelum dana dicairkan, pengurus mengundang semua anggota kelompok untuk mendengarkan sosialisasi tentang pemanfaatan dana, penyaluran dan pengembalian.
- b) Pengurus memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk mengajukan permohonan pinjaman, baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pengurus, yang memuat besarnya pinjaman dan untuk kegiatan/keperluan apa saja.
- c) Setelah semua permohonan masuk, pengurus menginventarisasinya, dan selanjutnya oleh pengurus menyalurkan dana yang ada kepada anggota sesuai permohonan.

Secara umum, prosedur untuk memperoleh dana bantuan dari pemerintah ini lebih mudah bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain seperti perbankan, terutama yang berkaitan dengan syarat administrasi. Hal ini

menggambarkan kesungguhan pemerintah untuk menolong usaha kecil dan menengah, mengembangkan usaha demi peningkatan taraf hidup. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, Drs. Frederik S. Bili, sebagai berikut :

“Prosedur untuk memperoleh bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UKM jauh lebih mudah, bila dibanding dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank. Selain bunga pinjamannya relatif kecil dengan jangka waktu yang lebih lama, juga tanpa jaminan. Sehingga tidak terlalu membebani peminjam, yang pada umumnya menghendaki agar prosedur tidak terlalu berbelit-belit dan memberatkan. Kita menyadari bahwa bantuan modal ini dimaksudkan untuk menolong masyarakat yang lemah secara ekonomi. Ini merupakan pencerminan dari komitmen dan tekad pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui upaya memajukan usaha kecil dan menengah di daerah ini”. (Wawancara tanggal 11 maret 2004)

Senada dengan pendapat di atas, Kosmas Kopong, salah seorang pengurus kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) Rera Gere berkomentar seputar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, seperti berikut :

“Saya punya pengalaman mengurus pinjaman dana pada Dinas Koperasi dan UKM, dan saya tidak menemui hambatan sedikitpun. Persyaratan administrasi yang diminta dari kelompok cukup banyak, namun kami dapat dipenuhi. Semua urusan berjalan lancar, dan tidak banyak waktu yang terbuang. Padahal, awalnya saya berpikir akan banyak waktu, tenaga dan biaya yang terbuang untuk urusan ini. Kendati musti menunggu hampir tiga minggu baru dana pinjaman itu bisa dicairkan, karena musti mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Koperasi di tingkat propinsi. Tapi, saya merasa puas atas pelayanan mereka, terutama karena kami bisa memperoleh pinjaman dana sesuai kebutuhan kelompok”. (wawancara tanggal 15 Maret 2004).

Hal lain yang patut dikemukakan disini yakni, terdapat sikap dan perilaku anggota yang sering memanfaatkan kelompok hanya sekedar untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Keadaan semacam ini sering menimbulkan masalah, terutama berkaitan dengan pengalihan usaha yang telah direncanakan ke kegiatan yang bersifat konsumtif. Misalnya, rencana awal membuka kios atau memelihara ternak, namun dalam perjalanan dana pinjaman tersebut

dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bersifat konsumtif, seperti untuk pesta nikah, pesta sambut baru, dan lain-lain.

Anggota juga sering berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, biasanya dengan motivasi sekedar untuk mendapatkan bantuan dana.

Gambaran mengenai sikap dan perilaku anggota yang demikian, juga mendapat sorotan dari John Ola, salah seorang tokoh masyarakat yang cukup mengetahui dinamika dan seluk beluk usaha yang dirintis anggota yang bergabung dalam suatu kelompok, seperti berikut:

“Saya melihat, kalau dulu masyarakat beranggapan bahwa dana bantuan yang datang dari pemerintah itu berarti tidak perlu dikembalikan, karena itu uang rakyat juga. Akibatnya, banyak pinjaman yang tidak dikembalikan. Namun dana tersebut digunakan hanya untuk foya-foya, bayar utang, bikin pesta, dan lain-lain, sehingga timbul kredit macet. Namun sekarang kelompok/masyarakat mulai menggunakan cara baru untuk mengelabui petugas pemerintah yakni dengan cara menjadi anggota di beberapa kelompok. Biasanya karena sudah banyak utang, lalu dengan cara demikian mereka berharap dapat menutup utang. Mereka inilah yang sering bikin rusak kelompok.” (Wawancara, tanggal 13 Maret 2004)

Apa yang dinyatakan di atas merupakan segi-segi yang dapat menghambat aktivitas kelompok, di samping tentunya dapat merusak solidaritas yang telah dibangun bersama oleh kelompok. Pola kerja semacam ini tentu terkait dengan mentalitas dan lingkungan sosial budaya setempat.

2.1.2. Hasil yang dicapai

Dana pinjaman dari Pemerintah, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, umumnya digunakan oleh anggota UBSP Rera Gere untuk usaha produktif, yakni 12 orang (55 %) dan sebagiannya yakni 10 orang (45 %) menggunakan dana pinjaman tersebut untuk mengatasi kesulitan atau kebutuhan yang sifatnya mendesak, seperti: biaya pengobatan/kesehatan, pendidikan, dan memperbaiki/membangun rumah tinggal.

Sedang untuk usaha produktif, jenis usaha yang dikembangkan anggota kelompok seperti: Usaha Tenun ikat tradisional dan Usaha kios. Namun hingga kini, hanya 5 (lima) orang saja yang usahanya masih bertahan. Sedang 7 (tujuh) orang lainnya usahanya macet tinggal Usaha ini memang ada yang baru memulainya, tapi ada juga yang sudah cukup lama menggelutinya, cuma kurang berkembang karena di samping administrasi usaha (pembukuan) yang kurang baik, juga masalah modal usaha yang relatif kecil. Tapi dengan adanya pembinaan administrasi dan bantuan modal dari Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, usaha-usaha tersebut mulai menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang berarti. Namun hingga kini, hanya 5 (lima) orang saja yang usahanya masih bertahan. Sedang 7 (tujuh) orang lainnya usahanya macet .

Untuk mengetahui lebih jauh dinamika usaha dan hasil yang dicapai oleh anggota kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam Rera Gere, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a) Usaha Tenun Ikat Tradisional.

Usaha tenun ikat tradisional selama ini belum banyak yang mencoba mengembangkan ke arah usaha komersial. Karena masih dipandang sebagai usaha sambilan dari ibu-ibu rumah tangga sekedar mengisi waktu luang, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun kini ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan membuat tenun ikat tradisional mulai makin giat dan gencar mengembangkan serta memodifikasinya sesuai tuntutan selera konsumen (berorientasi pasar), dengan tetap menjaga mutu dan corak aslinya sebagai identitas budaya setempat. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana (tradisional), sehingga hasil yang diperoleh pun boleh dibilang tidak



sebanding dengan waktu dan tenaga yang dicurahkan atau dikorbankan. Tapi mereka tetap mengerjakannya dengan tekun dan sabar. Untuk menyelesaikan satu lembar sarung tenun ikat (motif daerah) dibutuhkan waktu 1 (satu) minggu, karena dituntut ketelitian dan kesabaran yang tinggi.

Mengenai pemasaran hasil usaha tenun ikat tradisional ini umumnya bersifat musiman. Harga jual sarung tenun ikat tradisional di pasar-pasar lokal amat bervariasi yakni berkisar antara Rp 150.000 – Rp 500.000 per sarung, tergantung motif dan kualitas.

Permintaan pasar akan sarung tenun ikat tradisional ini lebih banyak ditentukan oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat setempat. Jadi bersifat musiman, kadang-kadang sepi dan lesu, tapi ada saat-saat pembeli memburu dan memborong persediaan yang ada. Seperti kunjungan kapal pesiar asing yang disponsori biro perjalanan wisata bekerjasama dengan Dinas pariwisata Kabupaten Flores Timur; atau kegiatan pentas seni dan budaya di tingkat kabupaten maupun propinsi yang disponsori oleh Dinas pariwisata; dan kegiatan sosial budaya lainnya, yang membuat para pengrajin tenun ikat tradisional memperoleh pemasukan yang lumayan besar. Tetapi, bila musimnya sedang lesu, pembelian sarung tenun ikat tradisional ini dalam seminggu kadang-kadang hanya laku terjual 2-(dua) lembar sarung saja. Kondisi ini tidak membuat mereka patah semangat, karena bagi mereka yang penting ada uang yang masuk, biar sedikit. Penghasilan mereka dari usaha ini rata-rata berkisar Rp 200.000 – Rp 300.000/bulan.

Walau penghasilan dari usaha ini per bulan relatif kecil, namun mereka tetap gembira menjalani usaha ini. Penghasilan mereka dari usaha ini jauh lebih baik dibanding sebelum mereka mendapat pembinaan dan bantuan modal dari

pemerintah. Dalam sebulan penghasilan mereka hanya berkisar Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Dari hasil kerja keras mereka ini dapat membantu meringankan beban keluarga, teristimewa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari berupa bahan makanan (seperti; beras, ikan, sayur, buah) juga untuk biaya pendidikan anak, meliputi: seragam sekolah, uang sekolah, buku-buku tulis dan buku pelajaran dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pendidikan anak. Hal ini seperti dituturkan oleh keluarga Ibu Berek berikut ini:

“Usaha ini saya mulai pada tahun 2000 lalu. Waktu itu, saya punya dua lembar sarung tradisional, yang saya tenun sendiri. Karena sulit uang untuk biaya sekolah anak, sarung itupun saya jual. Sejak saat itu, saya tertarik dengan usaha tenun tradisional ini. Saya lalu bekerjasama dengan anggota masyarakat yang biasa tenun sarung, yang tinggal di kampung-kampung pedalaman. Saya membeli sarung tenunan mereka yang mutu dan motifnya bagus untuk kemudian saya jual kembali ke pasar lokal dengan harga yang sedikit lebih mahal. Ya, biar untung sedikit yang penting ada uang yang masuk. Sampai sekarang mereka dan saya tetap ada hubungan (menjalin hubungan kerja) karena sudah saling kenal. Dengan modal yang saya pinjam dari kelompok sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sekarang usaha saya ini mulai lebih maju. Setiap minggu biar sedikit selalu ada uang yang masuk. Karena orang di sini perlu sarung untuk upacara adat, atau untuk baju seragam sekolah. Jadi ada saja sarung yang laku di pasar, walaupun tidak banyak. Dalam satu bulan saya bisa memperoleh penghasilan berkisar Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Dari usaha ini dapat menambah pendapatan keluarga kami. Apalagi suami saya hanya pegawai kecil, PNS golongan II. Tapi, sekarang dengan usaha kecil-kecilan ini, ya ada tambahan penghasilan, bias Bantu meringankan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, juga untuk ongkos anak sekolah”. (Wawancara, tanggal 18 Maret 2004).

b) Usaha Kios

Usaha kios yakni menyediakan kebutuhan rumah tangga berupa sembilan bahan pokok, yang meliputi: Beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, sabun, kacang-kacangan, dan lain-lain. Pada umumnya usaha ini bukan baru sama sekali bagi mereka yang menggelutinya. Cuma kurang berkembang karena modal usaha yang relatif kecil, di samping karena administrasi usaha seperti pembukuan, yang tidak pernah mendapat perhatian untuk dibenahi. Hal ini



menyulitkan mereka untuk mengetahui pemasukkan setiap harinya, bahkan sulit untuk mengetahui keuntungan dari usaha itu secara keseluruhan. Apalagi, mereka cenderung untuk mengambil saja barang-barang yang diperlukan untuk keluarga mereka tanpa mencatatnya dalam buku mereka. Tapi, dengan adanya pembinaan dan bantuan modal yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur berkaitan dengan administrasi usaha kios ini, kini mereka mulai dapat mengelola usahanya secara lebih baik.

Saat dialog dengan salah seorang pelaku usaha kios, diperoleh gambaran bahwa usaha ini mulai agak berkembang dan lebih baik dibanding sebelum memperoleh pembinaan dan bantuan modal dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hasil atau keuntungan usaha kios, banyak membantu selain untuk keperluan rumah tangga, pendidikan anak, maupun pengobatan anggota keluarga yang sakit.

Seperti Ibu Nela M, yang berusaha mengembangkan Kiosnya dari dana pinjaman pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur. Usaha ini amat membantu meringankan kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi selama ini mereka hanya bersandarkan pada penghasilan suaminya sebagai Pegawai Negeri Sipil, golongan III. Walau penghasilan mereka per bulannya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun mereka mempunyai banyak tanggungan dalam rumah. Pada tahun 2002, mereka mendapat bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai tambahan modal untuk usaha kios. Melalui usaha kios ini, telah sangat membantu meringankan beban keluarga mereka.

Barang-barang yang dijual atau disediakan di kios ini amat bervariasi. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen/pembeli, sehingga pembeli

banyak yang tertarik berbelanja di Kios mereka. Hal ini seperti dituturkan oleh ibu

Nela M. berikut ini:

“Usaha kios ini saya mulai pada tahun 1999, pada awalnya dengan modal Rp 600.000. Tapi waktu itu usaha kurang berjalan dengan baik karena harga barang di toko naik terus (amat mahal), sehingga saya hanya menjual barang tertentu saja, yang bisa ada untung sedikit. Waktu itu penghasilan saya dalam sebulan berkisar Rp 100.000 sampai Rp 200.000,- Kemudian setelah kelompok ini ada, saya bikin (mengajukan) permohonan ke kelompok. Waktu itu saya dapat pinjam dari kelompok 1 juta rupiah, semuanya saya gunakan buat beli barang jualan ini. Kalau persediaan di kios ini mulai habis, saya langsung ke toko untuk beli, di (toko) langganan saya. Sekarang bisa lihat sendiri, barang disini ada terus (selalu ada/tersedia). Jualan begini tidak banyak untung, yang penting bisa bantu bikin ringan (meringankan) kebutuhan dalam rumah (keluarga) ini. Kebutuhan kami di rumah ini juga kami ambil dari kios ini, tapi kami selalu catat sehingga kami bisa tahu berapa banyak yang kami pakai di rumah ini. Sekarang pendapatan saya dalam satu bulan antara Rp 300.00 sampai Rp 500.000. Dari penghasilan yang ada, saya simpan terus (tabung/sisihkan), lalu tiap minggu saya pakai untuk beli tambah barang di sini. Saya senang karena usaha kios ini bisa meringankan kebutuhan keluarga kami, juga dapat membantu meringankan biaya pengobatan orangtua kami yang sakit”.(wawancara tanggal 17 Maret 2004.)

c) Usaha Sayur dan Buah.

Usaha sayur dan buah akhir-akhir ini mulai banyak digemari masyarakat.

Usaha sayur dan buah ini, biasanya oleh penjual tidak membelinya langsung di lokasi produksi seperti di Hokeng, Boru dan Oka, melainkan dengan mengambil dari tangan pertama di pasar. Kerena memiliki modal usaha yang pas-pasan, sehingga merekapun hanya mampu membeli sayur dan buah dalam jumlah yang sedikit/ terbatas.

Biasanya, untuk sayur-sayuran dan buah, setelah dibelinya dari tangan pertama pada setiap pagi, mereka langsung membersihkan dan mengikat kembali atau mengemas seadanya saja. Kemudian mulai dijajagan kembali sepanjang lorong-lorong pasar yang hanya berlangsung pada pagi hari itu.

Usaha sayur-sayuran ini, biasanya meliputi: bayam, sawi, kangkung, tomat, wortel, kubis, dan lain-lain. Sedang buah-buahan yang biasa dijual meliputi: Alpokat, mangga, nangka, papaya, pisang, salak, jeruk, semangka, dan lain-lain.

Dari usaha ini biasanya mereka memperoleh keuntungan yang pas-pasan saja, yakni berkisar antara Rp 100.000 sampai 200.000 per bulan. Selepas pasar, jualan mereka yang tidak laku, biasanya mereka bawa pulang ke rumah dan dijual pada sore hari. Tapi, masalah yang sering dikeluhkan adalah jualan mereka yang tidak bertahan lama. Apalagi mereka tidak memiliki lemari pendingin untuk menjaga agar buah dan sayur tersebut tetap segar. Akibatnya jualan mereka tersebut cepat menjadi rusak. Hal yang demikian sering membuat mereka cemas karena sering merugi, dan ada pula diantara mereka yang akhirnya memutuskan untuk tidak menjalankan lagi usaha tersebut. Untuk jelasnya berikut kutipan wawancara dengan salah seorang pengusaha sayur dan buah, ibu Tin Kewa berikut ini:

"Usaha ini saya baru mulai tahun 2001, awalnya dengan modal Rp 100.000. Waktu itu belum terlalu banyak yang jualan buah dan sayur. Penghasilan saya waktu itu, dalam sehari bisa mencapai Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Kemudian saya mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 50.000,- saya mulai lebih semangat. Dengan adanya dana bantuan tersebut, saya mulai membeli buah dan sayur dalam jumlah yang lebih banyak. Awalnya dari usaha ini saya memperoleh penghasilan dalam sebulan mencapai Rp 200.000 sampai Rp 350.000. dari hasil usaha ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan kami sehari hari, dan untuk ongkos sekolah anak-anak yang masih SMP. Akhir-akhir ini, jualan saya mulai kurang laku dan banyak yang rusak. Apalagi, mulai makin banyak ibu-ibu rumah tangga yang beralih ke usaha sayur dan buah setelah mendapat bantuan modal dari pemerintah. Sejak saat itu, jualan saya sering tidak laku dan rusak. Karena terus merugi, lalu saya putuskan untuk tidak lagi menjalankan usaha ini." (Wawancara, tanggal 05 April 2004).

Gambaran di atas menjelaskan bahwa usaha yang dirintis anggota, memang ada yang bertahan, ada pula yang terpaksa 'gulung tikar'. Hal ini tentu terkait



dengan kemampuan / keterampilan anggota dalam mengelola usaha, di samping karena kurang memiliki jiwa/semangat wirausaha, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya masyarakat setempat.

.2. Pemberdayaan Oleh YASPENSEL

2.2.1. Bentuk dan Proses Pemberdayaan

a. Bentuk Pemberdayaan

Bahwa pemberdayaan masyarakat sulit dilepaskan dari peran dan keterlibatan 'orang luar'. Hal itu tentu erat kaitannya dengan hakekat dan sifat kemiskinan dari masyarakat, yang pada umumnya tidak memiliki cukup kekuatan untuk keluar dari 'perangkap kemiskinan' bila tidak dibantu oleh 'orang luar'. Maka proses pemberdayaan hanya dapat efektif bila bentuk pemberdayaan yang digunakan menjadi media yang tepat. Dalam arti mampu mendorong tumbuhnya semangat dan kesadaran baru dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik.

Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka, meliputi: (1) Pendidikan dan Latihan, yang mengarah kepada pematapan organisasi dan manajemen usaha, serta (2) bantuan modal usaha. Untuk jelasnya maka dapat diuraikan berikut ini.

1) Pendidikan dan Latihan

Pendidikan dan latihan yang dijalankan oleh Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka, meliputi pendidikan dan latihan dasar (motivasi) dan dinamika kelompok dengan memperkenalkan apa yang disebut '5-BHP' (5-Bidang Hasil Pokok), yang meliputi: (1) penataan dan pematapan organisasi; (2) administrasi; (3) permodalan; (4) usaha; dan (5) pengembangan.

Kelima aspek ini menjadi fokus utama, sehingga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dan semangat baru dalam diri anggota kelompok / masyarakat untuk menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Gambaran mengenai kesan dan manfaat pendidikan dan latihan ini, seperti diungkapkan Ibu Martha Benga, berikut:

“Kami merasa beruntung bisa memperoleh pendidikan dan latihan yang diberikan oleh YASPENSEL. Awalnya kami dibimbing untuk saling mengenal melalui permainan dan dinamika kelompok, kemudian diberikan materi mengenai pentingnya hidup berkelompok, bagaimana mengelola organisasi, hak dan kewajiban anggota, bagaimana mengelola keuangan, serta kiat-kiat mengembangkan usaha. Hingga saat ini semua hal yang kami peroleh waktu latihan, saya rasakan sangat bermanfaat dalam mengembangkan usaha saya”. (Wawancara, tanggal 30 Maret 2004)

2) Bantuan Modal Usaha

Ungkapan yang sering digunakan untuk menegaskan pentingnya pemberdayaan yakni: “Kalau anda memberi seekor ikan kepada seorang yang lapar, maka ia hanya bertahan hidup selama sehari. Tapi, bila anda memberi kail kepada seorang lapar, maka ia akan dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama”. Ungkapan ini hendak menggarisbawahi pentingnya membangun kesadaran dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk mengolah sendiri potensi sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan hidup. Bantuan modal tetaplah dipandang sebagai sarana, hanya sekedar merangsang dan memotivasi mereka, tanpa harus bergantung pada pemberi bantuan modal tersebut. Kendati begitu, modal bagi masyarakat kecil tetap merupakan hal penting dan menentukan. Seperti dikemukakan oleh salah seorang anggota kelompok UBSP Kepuuk Lolon, bapak Thomas Suban, berikut ini:

“Kami disini, untuk dapat uang susah. Usaha kami ini sulit berkembang bila hanya berharap dari penghasilan yang ada sekarang. Kalau kami pinjam dari orang lain, bunga pinjaman itu ditetapkan sangat besar, berlipat-lipat sehingga memberatkan kami. Kalau kami pinjam ke bank maka harus urus administrasi yang banyak dan sulit, lalu musti dengan jaminan. Sehingga

sulit bagi orang kecil seperti saya untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank. Sekarang kami senang bisa mendapatkan bantuan modal buat usaha, karena YASPENSEL memberi pinjaman modal dengan bunga kecil dan tidak ada jaminan apapun. Kami tidak pernah membayangkan, kalau pada saat sulit seperti ini, ada orang yang mau membantu kami.” (Wawancara, tanggal 05 April 2004)

b. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan yang diperankan oleh Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL), khususnya berkenaan dengan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga/kelompok melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP), meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui pemerintah dan tokoh masyarakat setempat untuk memperkenalkan program. Sasaran sosialisasi program ini adalah masyarakat yang terwadah dalam kelompok.
- 2) Bila masyarakat atau kelompok berkenan menerima program YASPENSEL, artinya masyarakat atau kelompok merasa bahwa program yang dibawa YASPENSEL itu berguna bagi mereka dan lingkungan setempat, maka langkah berikutnya adalah pengenalan program kepada kelompok beriringan dengan pemberian pendidikan dan latihan dasar (motivasi) dan dinamika kelompok dengan memperkenalkan apa yang disebut '*5 (lima) Bidang Hasil*

Pokok' (5-BHP), yang meliputi:

a) Organisasi:

Pada dasarnya organisasi membahas segala faktor yang berkaitan dengan tata kehidupan dan pengembangan organisasi, yang meliputi: *keanggotaan*, yaitu berkaitan dengan kriteria anggota, hak anggota dan kewajiban anggota; dan *kepengurusan* yaitu yang berkaitan dengan kriteria pengurus, hak pengurus dan kewajiban pengurus.

b) Administrasi:

Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan di dalam mencatat, mendata kegiatan, usaha, kekayaan dan lainnya beserta segala sarana pendukungnya yang memadai. Administrasi di sini mencakup dua hal pokok yakni: Administrasi organisasi dan administrasi keuangan.

c) Permodalan:

Modal UBSP terdiri atas *modal sendiri*, yaitu modal yang berasal dan berkembang dari simpanan anggota dan kekayaan yang dihimpun dari hasil kegiatan UBSP, dan *modal luar*, yaitu modal yang berasal dari sumber-sumber luar UBSP seperti dana atau pinjaman dari pihak lain.

d) Usaha:

Yang dimaksud usaha adalah segala kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan.

e) Pengembangan UBSP:

Pengembangan UBSP, biasanya melalui bantuan teknis dan bantuan manajemen serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan program.

3) Anggota kelompok didorong dan dilatih agar sanggup menggali dan mengenali apa yang menjadi masalah mereka yang sesungguhnya serta menemukan cara untuk keluar dari lilitan masalah tersebut.

4) Bila kelompok telah berhasil menggali dan mengenali masalah mereka yang sesungguhnya melalui kegiatan identifikasi masalah, maka langkah berikutnya adalah menentukan langkah konkret yang perlu ditempuh.

Di sini kelompok diberi kesempatan untuk mendiskusikannya secara intensif untuk kemudian merumuskan dan menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya serta menentukan tindakan nyata yang hendak ditempuh. Yakni

dengan menentukan langkah konkret yang perlu ditempuh. Beranjak dari proses yang demikian, kemudian kelompok merumuskan programnya. Dalam seluruh proses ini peran YASPENSEL bertindak sebatas sebagai fasilitator, motivator dan animator.

Bila kegiatan sosialisasi program berakhir, pihak YASPENSEL masih tetap melakukan pendampingan, fasilitasi dan animasi terhadap kelompok ini. Kegiatan pendampingan / fasilitasi dan animasi ini biasanya dapat berlangsung selama 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun, tergantung kebutuhan dan kesiapan kelompok.

Pendampingan yang dilakukan YASPENSEL, biasanya dengan menerjunkan beberapa orang tenaga lapangan, dan dengan menggunakan pola pendekatan '*hidup dan tinggal bersama masyarakat*' (*live-in*). Melalui pola pendekatan ini mereka dapat belajar, saling mengenal antar pribadi maupun kelompok, serta kebiasaan-kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat, sehingga terjalin komunikasi yang intensif dan bermutu.

Prinsip pendampingan adalah terbangunnya kemandirian atau keberdayaan masyarakat. Dengan demikian, maka tugas pendampingan bukanlah hal mudah. Peran utama pendamping adalah membangkitkan semangat, kesadaran sehingga memiliki orientasi hidup baru. Dengan cara demikian, diharapkan mereka dapat lebih mengenal dan memahami potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Kesadaran yang demikian dapat mendorong dan merangsang mereka untuk mengelola potensi sumberdaya lokal seoptimal mungkin bagi terciptanya peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Maka di sini, peran pendamping/fasilitator amatlah menentukan, terutama dalam kaitan memosisikan diri secara 'tepat' dan menempatkan masyarakat





secara 'apa adanya'. Sehingga diharapkan melalui pendampingan tersebut memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, keterampilan, teknologi dan budaya.

Bagaimana posisi serta sikap YASPENSEL dalam seluruh proses pendampingan berlangsung? Berikut ini disajikan percakapan penulis dengan Rm. Willy Bunganaen, Pr, salah seorang Wakil Direktur YASPENSEL berikut ini:

"Pendampingan yang kami lakukan terhadap kelompok/masyarakat ini amatlah fleksibel, bergantung pada hasil evaluasi terhadap kesiapan kelompok. Prinsip kami, mendampingi tapi ada saatnya untuk 'menarik diri' dari kelompok, sambil memberikan kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk berkreasi dan bereksperimen. (mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), sehingga terbangun proses belajar bersama (*learning process society*), yang pada gilirannya akan terbentuk rasa memiliki dan tanggungjawab. Karena menurut kami: masyarakatlah yang lebih mengetahui apa masalah mereka, dan cara atau jalan untuk keluar dari kemelut sosial ekonomi yang sedang mereka hadapi itu." (Wawancara, tanggal 17 Mei 2004).

Berdasarkan data yang dihimpun dari kantor YASPENSEL, tercatat bahwa sejak tahun 1990-2000, terdapat 51 Kelompok UBSP/USPRO yang difasilitasi oleh Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL), yang tersebar di 13 kecamatan dalam wilayah kabupaten Flores Timur dan 2 (dua) kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lembata.

Usaha yang dikembangkan anggota meliputi: Kios, tenun ikat tradisional, jual-beli hasil pertanian/perkebunan (Kopi, jambu mete dan kelapa), ternak, tahu-tempe, dan lain-lain. Usaha ini terdiri dari dua jenis, yakni usaha produktif perorangan, dan usaha produktif perorangan melalui kelompok UBSP dan USPRO. Biasanya, bila usaha anggota melalui kelompok mulai mengalami peningkatan dan kemajuan, maka anggota tersebut dapat melepaskan diri dari kelompok untuk kepentingan mengembangkan usaha secara lebih mandiri di





luar kelompok, dengan membangun jaringan dan kerjasama yang lebih luas yang memiliki prospek.

Pengamatan peneliti selama di lapangan, diperoleh gambaran bahwa anggota kelompok benar-benar saling mengenal dan saling mendukung. Mereka umumnya tetap menggunakan dua pola pengembangan usaha ini secara konsisten, yakni mengembangkan usaha melalui kelompok atau memilih untuk lepas dari kelompok dan berdiri sendiri.

Pendampingan yang dilakukan YASPENSEL, umumnya menjangkau kelompok/masyarakat dipelosok-pelosok wilayah yang kadang-kadang sulit ditembus sarana transportasi. Kelompok dampingan yang tersebar di wilayah seluas 1.812,85 km², tentu membutuhkan tenaga pendamping yang andal.

Walau mereka memiliki tenaga lapangan yang terbatas, namun tugas-tugas pendampingan tetap dilakukan dengan penuh semangat. Mereka senantiasa memiliki keyakinan bahwa “benih yang ditabur pasti ada yang tumbuh”, dan “setiap kerja keras yang dilakukan dengan sukacita, tidak akan sia-sia.”

Keyakinan yang demikian inilah yang terus menggelorakan semangat mereka untuk tetap terlibat bersama sama masyarakat kecil membangun hari esok yang lebih baik. Berikut ini akan disajikan daftar kelompok UBSP/USPRO yang difasilitasi oleh YASPENSEL seperti terlihat di bawah ini.

Tabel 10. Kelompok UBSP/USPRO Dampungan YASPENSEL (1990-2002)

NO.	NAMA KELOMPOK	LOKASI	BENTUK USAHA
01.	Taan Mae-Mae I	Boru	UBSP/USPRO
02.	Taan Mae-Mae II	Boru	UBSP/USPRO
03.	Hogo Hama	Boru	UBSP/USPRO
04.	Naga Pura	Bawalatang/Nawakote	UBSP/USPRO
05.	Onek Tou	Duang/Nawakote	UBSP/USPRO
06.	Doro Pana	Nobo	UBSP/USPRO
07.	Tawa Gere	Nobo	UBSP/USPRO
08.	Pai Hode Taan Sare	Kobasoma	UBSP/USPRO
09.	Hololimang	Lato/Watowara	UBSP/USPRO
10.	Peka Sayong	Tenawahang/Gerong	UBSP/USPRO
11.	Goe Gere	Tenawahang/Gerong	UBSP/USPRO
12.	Klore Laka	Tenawahang/Gerong	UBSP/USPRO
13.	Wulu Boleng	Gerong	UBSP/USPRO
14.	Doro Nuro	Lewolaga	UBSP/USPRO
15.	Pohe Nawa	Lewolaga	UBSP/USPRO
16.	Dore Kame	Lewolaga	UBSP/USPRO
17.	Puli Tobeng	Leworok/Leraboleng	UBSP/USPRO
18.	Watunuhong	Leworok/Leraboleng	UBSP/USPRO
19.	Buriwerang	Tuakepa	UBSP/USPRO
20.	Duli Tukan	Tuakepa	UBSP/USPRO
21.	Suban Sao	Serinuho/Duli	UBSP/USPRO
22.	St. Yoseph	Serinuho/Duli	UBSP/USPRO
23.	St. Theresia	Krokoebang	UBSP/USPRO
24.	Wolo Wutun	Kawalelo	UBSP/USPRO
25.	Taan Tou II	Badu	UBSP/USPRO
26.	Nubun Tawa I	Lamawalang	UBSP/USPRO
27.	Empat Sekawan	Waibalun	UBSP/USPRO
28.	Nuba Nara	Waibalun	UBSP/USPRO
29.	Angrek	Pantai Besar	UBSP/USPRO
30.	Janur	Pantai Besar	UBSP/USPRO
31.	Mutiara Jaya	Lohayong	UBSP/USPRO
32.	Sadar Usaha	Lokea	UBSP/USPRO
33.	Flamboyan	Amagrarapati	UBSP/USPRO
34.	Bali Baran	Sarotari	UBSP/USPRO
35.	Tawa Baran	Sarotari	UBSP/USPRO
36.	Bougenville	Weri	UBSP/USPRO
37.	Kepuuk Lolon	Weri	UBSP/USPRO
38.	Sirsak	Wailingo	UBSP/USPRO
39.	Gelekat Lewo	Loba/Kiwangona	UBSP/USPRO
40.	Kodi Liwo	Karing Lamlouk	UBSP/USPRO
41.	Sinar Rejeki	Tapobali	UBSP/USPRO
42.	Sartika	Redontena	UBSP/USPRO
43.	Talapia	Waibreno/Baya	UBSP/USPRO
44.	Tunas Muda	Lewoleba Timur	UBSP/USPRO
45.	Breket One	Lewoleba Timur	UBSP/USPRO
46.	Polo Arna	Lewoleba Timur	UBSP/USPRO
47.	Tunas Baru	Walakean/Lewoleba	UBSP/USPRO
48.	Tunas harapan	Tujuh Maret/Lewoleba	UBSP/USPRO
49.	Kembang Sepatu	Lewoleba Utara	UBSP/USPRO
50.	Nyiur Melambai	Lewoleba Utara	UBSP/USPRO
51.	Sinar Baru	Lusiduawutun/Loang	UBSP/USPRO

Sumber Data: Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka, 2004



Kelompok UBSP Kepuuk Lolon merupakan salah satu kelompok binaan/dampingan YASPENSEL yang hingga kini aktivitas dan dinamika usahanya tidak pernah surut.

Kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) Kepuuk Lolon ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1996, dengan anggota seluruhnya berjumlah 35 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah: 13 orang dan perempuan berjumlah; 22 orang.

Bila dilihat dari tingkat usia, maka anggota kelompok ini memiliki komposisi yang dapat dikategorikan dalam tiga golongan umur seperti berikut: usia 35-45 tahun adalah 9 orang (26 %), usia 46-56 adalah 18 orang (51 %) dan usia 56-66 tahun yakni 8 orang (23 %).

Mata pencaharian anggota umumnya adalah petani, dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000 – Rp 200.000/bulan. Sedang tingkat pendidikan anggota terdiri dari : tamat SD/ sederajat: 29 orang (83 %), SLTP: 4 orang (11 %) dan , SLTA: 2 orang (6 %).

Berikut ini disajikan Daftar susunan anggota dan kepengurusan UBSP Kepuuk Lolon seperti terlihat pada tabel 10 berikut:



Tabel 11. Daftar Susunan Badan Pengurus UBSP Kepuuk LolonKeadaan Maret 2004

No.	Nama	Umur	Keterangan
01.	Hironimus Beda	47	Ketua
02.	Yohanes Pati	40	Wakil Ketua
03.	Vero Uri	52	Sekretaris
04.	Agnes Keneka	41	Bendahara
05.	Katarina Tuto	43	Anggota
06.	Maria Sili	46	Anggota
07.	Agnes Barek	53	Anggota
08.	Katarina Perada	55	Anggota
09.	Pius Paji	54	Anggota
10.	Barek Sengaji	55	Anggota
11.	Theresia Penaten	55	Anggota
12.	Deran Ola	49	Anggota
13.	Dominikus Dei	54	Anggota
14.	Sabon Tawa	56	Anggota
15.	Petrus Ola	54	Anggota
16.	Daeng Soge	44	Anggota
17.	Elisabeth Barek	40	Anggota
18.	Thomas Jogo	60	Anggota
19.	Laurens Boli	59	Anggota
20.	Agnes Palang	55	Anggota
21.	Thomas Suban	56	Anggota
22.	Dominikus Liat	47	Anggota
23.	Maria Fatimah Lipat	42	Anggota
24.	Laurens Suban	52	Anggota
25.	Bulu Pati	57	Anggota
26.	Agnes Barek	42	Anggota
27.	Vero Benga	32	Anggota
28.	Theresia Bulu	58	Anggota
29.	Bene Bengan	44	Anggota
30.	Yuliana Surat	52	Anggota
31.	Ester Nini	59	Anggota
32.	Elis Benga Ola	56	Anggota
33.	Bengan Tuen	55	Anggota
34.	Margaretha Date	57	Anggota
35.	Yoseph Kia	61	Anggota

Sumber Data : UBSP Kepuuk Lolon, 2004

Dari jumlah anggota yang ada, terdapat 14 orang (40 %) yang sejak awal mengembangkan usaha produktif, namun kini tinggal 11 orang yang usahanya masih bertahan, karena 3 (tiga) orang terpaksa mengalihkan usaha dari usaha jual beli hasil perkebunan, meliputi jambu mete dan kopi, ke usaha ternak.

Khusus usaha jual beli hasil perkebunan meliputi jambu mete dan kopi, kini kurang diminati lagi karena lahan usaha mereka sudah dicaplok pengusaha/pemodal besar dari Surabaya dan Ujung pandang. Para pengusaha

besar ini biasanya membeli hasil langsung dari petani dengan harga yang cukup menguntungkan petani.

Dengan demikian, jenis usaha yang digeluti anggota kelompok yang bertahan hingga kini meliputi, usaha tenun ikat tradisional, usaha jual beli kelapa dan ternak. Sedang anggota yang lainnya menggunakan dana pinjaman untuk kepentingan pendidikan, pengobatan/kesehatan dan membangun rumah tinggal.

▪ **Prosedur memperoleh Bantuan Modal Dari YASPENSEL**

Bila kelompok sudah mulai berjalan dan menunjukkan aktivitas organisasionalnya secara memadai seperti kegiatan menghimpun dana dari anggota, yang terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, yang ditunjukkan dengan bukti administrasi, seperti pembukuan kelompok, laporan perkembangan kelompok kepada YASPENSEL setiap bulan. Maka dengan menggunakan ukuran kesiapan 5-BHP (yakni: Organisasi, Administrasi, Permodalan, Usaha dan Pengembangan), pihak YASPENSEL sudah boleh melayani pinjaman modal kepada kelompok. Agar pelayanan pinjaman modal dapat langsung pada sasaran dan mencapai tujuan maka ditetapkan prosedur yang meliputi:

1) Pengajuan Pinjaman Modal

- a) Anggota UBSP mengajukan pinjaman modal kepada YASPENSEL, melalui kelompok, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan/mengetahui Pastor Paroki, dan Kepala Desa atau Lurah setempat.
- b) Berdasarkan ajuan anggota UBSP, pengurus UBSP mengadakan penilaian terhadap ajuan modal tersebut dan selanjutnya mengajukan ke pihak YASPENSEL.
- c) YASPENSEL akan menilai, memproses dan mempertimbangkan kelayakan ajuan pinjaman modal kelompok UBSP. Biasanya didahului



dengan mengirim tim khusus ke lapangan/lokasi, untuk melakukan observasi / survey kelayakan pemohon.

- d) Hasil persetujuan YASPENSEL akan diberitahukan kepada kelompok beserta jumlah pinjaman yang disetujui. Segera setelah itu pihak YASPENSEL akan mencairkan pinjaman modal melalui rekening UBSP pada Bank yang ditentukan.

2) Pencairan Pinjaman Modal

- a) YASPENSEL mencairkan pinjaman modal kepada kelompok UBSP melalui pengurus kelompok.
- b) Kelompok UBSP akan mencairkan Pinjaman modal kepada anggota UBSP setelah anggota memenuhi persyaratan administrasi.

3) Pengembalian/Angsuran Pinjaman Modal

- a. Angsuran pinjaman dari anggota kelompok UBSP dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang tertera dalam surat pernyataan pinjaman, umumnya berkisar antara 6 (enam) bulan sampai 24 bulan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi anggota UBSP yang ingin mengangsur lebih cepat dari pada jadwal angsurannya.
- b. Bunga pinjaman dibayar oleh anggota sesuai dengan pembayaran bunga yang tertera dalam surat pernyataan pinjaman, yakni 2 % per bulan.

Sebagai tambahan dapat dijelaskan bahwa: Angsuran pinjaman yang meliputi pokok dan bunga, disetor oleh kreditor/peminjam pada setiap bulan melalui rekening YASPENSEL pada bank, (disetor pada tanggal 15 setiap bulan) atau dapat menyetornya langsung pada YASPENSEL, sesuai kesepakatan antara peminjam dengan pihak YASPENSEL.

Sedangkan pengembalian pinjaman bagi kelompok UBSP, biasanya dijemput oleh staf/tenaga lapangan, sekaligus memberikan motivasi, sosialisasi dan animasi kepada kelompok. Sementara untuk wilayah yang hanya meliputi beberapa orang, pengembalian dilakukan melalui rekening YASPENSEL pada Bank; atau dapat menyetornya langsung ke kantor YASPENSEL, berdasarkan kesepakatan antara YASPENSEL dengan peminjam.

2.2.2. Hasil Yang Dicapai

Usaha yang dikembangkan anggota kelompok bervariasi, tergantung minat dan kepentingan dari masing-masing anggota kelompok. Yang dimaksudkan dengan *usaha* adalah segala kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Bila dilihat dari segi pengelola maka usaha ini dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang, yaitu:

- a) Usaha ekonomis produktif, yang dikelola oleh UBSP sebagai satu kesatuan unit usaha.
- b) Usaha ekonomis produktif yang dikelola oleh masing-masing anggota UBSP secara perorangan. Dalam hal ini Kelompok UBSP bertindak sebagai pemberi fasilitas kredit bagi anggota UBSP yang membutuhkan guna pengembangan usaha sendiri.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan perhatian pada usaha ekonomis produktif jenis kedua, dimana Kelompok UBSP memosisikan diri sebagai pemberi fasilitas kredit bagi anggota UBSP yang membutuhkan guna pengembangan usaha sendiri.

Kelompok UBSP Kepuuk Lolon, berkonsentrasi pada pemupukan modal, (yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela) untuk

kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan, yang meliputi pengembangan usaha produktif. Berdasarkan kesepakatan, besarnya simpanan anggota adalah: Simpanan pokok: Rp 50.000/ anggota; simpanan wajib: Rp 100.000/anggota; dan simpanan sukarela tanpa patokan khusus, tergantung kesanggupan.

Bantuan modal dari YASPENSEL (Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka) pada tahap I sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Dari bantuan modal itu, kemudian disalurkan kepada anggota kelompok sesuai ajuan pinjaman, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pengembangan usaha kecil meliputi: usaha tenun ikat tradisional dan jual-beli hasil perkebunan rakyat seperti, kelapa, kopi, dan kacang mete dan ternak. Namun kini usaha jual beli kacang mete dan kopi sudah semakin kurang diminati lagi, karena akhir-akhir ini pengusaha/ pemodal besar membelinya langsung ke petani.

Berikut akan disajikan usaha-usaha yang dikembangkan anggota kelompok, yang hingga kini masih bertahan, yakni:

a. Usaha Tenun Ikat Tradisional

Usaha tenun ikat tradisional saat ini mulai ramai ditekuni, selain karena permintaan pasar yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, juga terutama didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya daerah setempat ditengah pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informasi telah membawa perubahan yang mahahebat, suka atau tidak suka, perlahan-lahan mulai mengikis dan menggerogoti, bahkan dapat membenamkan identitas budaya lokal yang merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai

harganya. Bertolak dari kesadaran seperti itulah, pihak YASPENSEL tergerak untuk memfasilitasi kelompok yang menaruh minat pada usaha tenun ikat tradisional ini.

Umumnya usaha ini kurang berkembang, dibanding usaha-usaha lainnya.

Masalah utama terletak pada proses pengerjaan yang masih menggunakan peralatan tradisional, yang banyak memakan waktu dan tenaga. Sehingga hasil yang dicapai hampir sulit sekali memenuhi permintaan pasar lokal dengan segera, baik dalam jumlah maupun mutu. Karena memang proses pengerjaan tenun ikat tradisional ini tidak bisa sepenuhnya dijalankan dengan target waktu yang ketat.

Tampak jelas bahwa waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan hampir tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Meskipun pendapatan dari usaha ini relatif kecil, namun dapat membantu meringankan beban hidup keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal ini seperti diungkapkan oleh ibu Martha Benga, yang telah menekuni usaha ini sejak 1998, berikut ini:

“Sejak dulu saya sudah biasa tenun sarung. Setelah berkeluargapun saya masih juga tenun. Cuma, waktu itu kegiatan menenun sarung ini hanya sekedar mengisi waktu luang, tidak dengan tujuan untuk dijual, tapi untuk digunakan sendiri. Namun pada tahun 1998, ketika ekonomi keluarga kami benar-benar dalam kesulitan, saya mulai merintis usaha jual-beli sarung tenun ikat ini. Sejak saat itu, saya sering menerima pesanan dengan motif yang mereka mau. Harga waktu itu, untuk satu lembar sarung tradisional saya jual dengan harga Rp.150.000 sampai Rp 350.000. Sampai sekarang, kesibukan saya adalah membeli sarung motif daerah untuk kemudian saya jual kembali dengan harga sedikit lebih mahal. Penghasilan yang saya peroleh dari usaha dalam sebulan antara Rp 600.000 sampai Rp 1.000.000, padahal sebelumnya penghasilan saya dalam sebulan hanya berkisar Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Hingga sekarang, saya tetap senang dengan usaha ini, karena biar pemasukkannya kecil, yang penting ada uang masuk. Dari usaha ini bisa membantu meringankan kebutuhan kami sehari-hari dan membantu biaya pendidikan anak serta pengobatan anggota keluarga yang sakit.” (Wawancara tanggal 20 Maret 2004).

b. Usaha Jual-Beli Kelapa

Usaha jual-beli kelapa, yakni kegiatan membeli kelapa langsung dari petani. Biasanya kelapa dibeli dengan harga sedikit lebih murah, untuk kemudian dijual ke pasar dengan harga sedikit lebih mahal sesuai harga pasaran setempat.

Usaha ini relatif baru dan kurang diminati orang, karena harga kelapa yang sering tidak stabil, kadang-kadang naik tapi kadang-kadang turun drastis (fluktuasi), sehingga beresiko bagi pengusaha. Meski begitu, bagi mereka yang mampu mengelolanya, hal ini tentu merupakan peluang penting yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Ibu Agnes Berek, disamping kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, mencoba memanfaatkan peluang ini. Ia terdorong untuk memulai usaha jual-beli kelapa ini, semata-mata untuk memperbaiki pendapatan keluarga yang sangat kecil. Apalagi selama ini mereka hanya bergantung dari penghasilan suaminya sebagai petani yang relatif kecil.

Pada tahun 1999 ia mendapat bantuan modal dari YASPENSEL melalui kelompok sebesar Rp 500.000, yang digunakannya untuk usaha jual-beli kelapa ini. Ia biasanya membeli kelapa langsung dari petani kelapa dengan harga Rp 200 per buah lalu dijual di pasar lokal dengan harga Rp 400 atau Rp 500 per buah. Ia mengaku mempunyai banyak pengalaman suka dan duka dari usahanya selama ini. Walau keuntungan yang diperolehnya relatif kecil, tapi ia senang menjalani usaha ini. Penghasilan yang diperolehnya setiap bulan dari usaha ini adalah berkisar Rp 200.000 sampai Rp 500.000. Padahal sebelumnya pendapatan mereka sebulan hanya berkisar Rp 100.000 sampai Rp 150.000.

Hingga kini, ibu Agnes Berek masih setia menjalani usaha ini. Lebih jauh Ibu Agnes Berek mengungkapkan aktivitasnya, seperti dikutip dibawah ini:

"Saya selalu beli kelapa langsung pada pemilik kelapa dalam jumlah banyak. Sebelum kelapa diangkut ke pasar untuk dijual, kelapa-kelapa tersebut terlebih dahulu dikupas untuk diambil sabutnya. Kelapa-kelapa ini saya jual di pasar dengan harga antara Rp. 400 – Rp 500 per buah, itupun kalau pembelinya lagi banyak. Tapi kalau pembeli tidak banyak, maka kelapa yang ada akan saya jual dengan harga Rp 300 per buah. Keuntungan dari jual kelapa ini biar hanya Rp 100 sampai Rp.300/ buah, tapi saya senang karena kadang-kadang mereka borong habis kelapa saya ini. Biasanya untuk kepentingan pembuatan minyak kelapa. Tapi bila pembeli kelapa mulai kurang, maka kelapa yang ada menjadi tidak laku, ya terpaksa saya bawa pulang ke rumah. Nanti tiba hari pasar akan saya bawa lagi ke sini. Tapi sekarang saya tidak perlu lagi bawa pulang kelapa ke rumah, karena sudah ada kios yang saya sewa untuk tampung kelapa. Usaha ini telah banyak membantu keluarga kami yakni meringankan kebutuhan keluarga kami seperti beli kebutuhan makan-minum, beli pakaian dan perabot rumah, biaya sekolah anak serta perbaikan rumah tinggal". (Wawancara tanggal 17 Maret 2004).

Kerja keras dari ibu Agnes Berek untuk mempertahankan usahanya ini, mendapat perhatian dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Berikut dapat disajikan kutipan pendapat bapak John kopong sebagai berikut:

"Di desa ini satu-satunya usaha jual-beli kelapa yang masih bertahan dan sekarang mulai agak maju adalah usaha milik ibu Agnes Berek ini. Sedang yang lain-lain itu sepertinya kurang nampak kegiatannya. Orang lebih mengenal Usaha Ibu Agnes Berek ini, karena dia sering keluar masuk kebun-kebun kelapa untuk membeli kelapa. Saya lihat kelapa-kelapa yang di belinya itu biasanya ditampung dulu dirumahnya, dikupas kulitnya baru kemudian mereka angkut ke pasar. Di pasar dia ada sewa kios untuk simpan kelapa. Saya lihat, sekarang mereka punya hidup mulai bagus, rumah mereka mulai diperbaiki dan anak-anaknya juga sekolah semua". (Wawancara tanggal 18 Maret 2004).

c. Usaha Ternak Kambing

Selain anggota kelompok yang memafaatkan dana pinjaman untuk usaha tenun ikat tradisional dan jual beli kelapa, terdapat juga anggota kelompok yang memanfaatkan dana pinjaman untuk usaha ternak kambing.

Bapak Laurens Boli sejak tahun 2000, mulai menggeluti usaha ini. Awalnya ia hanya memiliki 8 (delapan) ekor kambing. Setelah bergabung dalam kelompok UBSP Kepuuk Lolon, ia mendapat pinjaman dana dari YASPENSEL sebesar



Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang digunakannya untuk membeli (menambah) jumlah kambing yang sudah ada.

Ternak kambing ini, biasanya dijual ke pasar lokal dengan harga yang amat bervariasi, dan biasanya harga kambing jantan dijual lebih mahal daripada kambing betina. Umumnya, kebutuhan masyarakat akan kambing, untuk keperluan pesta maupun untuk keperluan yang berkaitan dengan urusan adat.

Atau kegiatan pemerintah, seperti untuk acara makan pada rapat-rapat/pertemuan yang melibatkan banyak pihak. Walau begitu, kebutuhan akan kambing masih bersifat musiman. Artinya, sepenuhnya bergantung pada aktivitas sosial masyarakat setempat. Penghasilan dari usaha ternak kambing ini berkisar Rp 300.000 sampai Rp 750.000 per bulan. Padahal sebelumnya, penghasilannya dalam sebulan hanya mencapai antara Rp 100.000 sampai Rp 250.000.

Selengkapnya Bapak Laurens Boli menuturkan kepada penulis sebagai berikut:

“Usaha ini saya rintis pada tahun 2000 yang lalu. Waktu itu saya pelihara kambing sekedar untuk mengatasi kesulitan dalam rumah. Awalnya saya hanya punya 8 ekor kambing, setelah mendapat bantuan dana dari YASPENSEL sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saya beli tambah 7 ekor kambing lagi. Kambing-kambing yang ada saya kandangkan, dan dalam sehari saya dibantu anak saya, kami beri makan dua kali, pagi dan sore. Walau cukup banyak waktu yang terbuang, namun bila ada yang beli, kami senang sekali. Kambing yang ada saya pelihara sampai agak besar baru saya jual. Kambing yang sudah besar biasanya saya jual di pasar lokal dengan harga 350.000 – 750.000. Dalam sebulan paling kurang laku terjual 4 – 6 ekor. Biasanya, dari uang yang ada, sebagian kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian lagi untuk membeli tambah kambing. Dalam sebulan kami bisa peroleh penghasilan berkisar Rp 300.000 sampai Rp 700.000. Sekarang usaha ini tidak bisa jalan lagi karena ternak kami kena penyakit. Waktu ini penyakit mencret menyerang kambing disini, dan kami sulit mendapat obat sehingga kambing-kambing tersebut mati semua. Sampai sekarang saya belum ada keinginan untuk berusaha lagi, takut gagal lagi.” (Wawancara, tanggal 23 Maret 2004).



2.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Bahwa pada hakekatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sangatlah ditentukan oleh masyarakat sendiri, disamping peran pendampingan oleh 'orang luar'.

Berkaitan dengan itu maka perlu sekali untuk disiasati secara cermat agar harapan dan kehendak masyarakat berupa perbaikan taraf hidup dapat terwujud melalui program-program pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor-faktor yang turut berpengaruh, yaitu faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat, dalam upaya pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP), yang difasilitasi baik oleh pemerintah maupun YASPENSEL, demi peningkatan taraf hidup masyarakat di kabupaten Flores Timur. Lebih jauh, Kepala Sub Dinas Program dan Evaluasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, mengungkapkan:

"Pada Era Otonomi Daerah ini, Daerah mempunyai kesempatan yang luas untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alamnya secara optimal, sesuai semangat Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Apalagi saat ini pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap program pemberdayaan masyarakat kecil, yang diwujudkan melalui pengalokasian dana khusus bagi pengembangan usaha kecil melalui kelompok/masyarakat. Cuma, kelompok/masyarakat belum sepenuhnya menangkap peluang ini. Mungkin karena SDM anggota/pengurus kelompok masih lemah sehingga belum dapat mengembangkan usaha secara memadai". (Wawancara, tanggal 18 Mei 2004).

Senada dengan pandangan di atas, Wilhelmina Fasa, seorang tenaga lapangan UP2K YASPENSEL menyatakan:

"Lembaga kami (YASPENSEL) sudah cukup lama menaruh perhatian pada masyarakat kecil. Pengalaman kami selama mendampingi masyarakat kecil ialah, bahwa mereka umumnya secara sosial agak terpinggirkan, dan belum sepenuhnya diajak serta didorong memanfaatkan sumberdaya setempat demi memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka memang memiliki SDM yang masih rendah, terisolasi karena sarana dan prasarana yang masih terbatas. Di samping itu, mereka juga masih dipengaruhi dan terikat





secara sosial budaya terhadap kebiasaan dan adat istiadat setempat, yakni adanya kegemaran berpesta, pola hidup boros serta berorientasi jangka pendek. Hal-hal semacam ini tentu menuntut kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, sehingga suatu saat nanti mereka mampu bangkit dan memiliki hidup yang semakin baik". (Wawancara, tanggal 08 Maret 2004)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat, bapak Martin Bayo, berikut ini:

"Kita memiliki potensi sumber daya alam yang cukup, cuma belum digali dan dikembangkan secara optimal. Kita juga memiliki lahan pertanian yang sebagiannya belum terolah, padang yang luas untuk peliharaan ternak, dan aneka budaya yang khas. Ini semua merupakan potensi yang masih 'tidur' karena belum ada kemauan untuk mengolah atau menggarapnya. Saat ini semakin terbuka pilihan untuk mengembangkan usaha, karena terdapat kemudahan untuk memperoleh bantuan modal, baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun LSM. Cuma, belum semua anggota masyarakat yang memanfaatkan peluang ini. Saya melihat, sumber persoalannya terletak pada SDM masyarakat kita yang umumnya masih rendah, memiliki tradisi yang kurang menunjang seperti: suka berpesta, pola hidup boros, dan masih terikat pada kebiasaan dan adat istiadat setempat yang konsumtif. Semua itu seperti lingkaran setan yang membuat masyarakat kita sulit untuk maju". (Wawancara, tanggal 7 April 2004)

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya pengembangan usaha kecil melalui UBSP, baik yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun oleh YASPENSEL, yakni:

a. Faktor Pendukung:

- (1) Semakin terbukanya kesempatan untuk mengelola sumber daya lokal sesuai semangat otonomi daerah (Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)
- (2) Terbukanya iklim usaha akibat adanya kemudahan untuk memperoleh bantuan modal, baik yang bersumber dari lembaga pemerintah, swasta maupun LSM.



b. Faktor-Faktor Penghambat:

Faktor-faktor yang dianggap dapat menghambat pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah.
- (2) Masyarakat masih sangat kuat terikat pada tradisi dan adat-istiadat setempat.

B. Pembahasan

Pemberdayaan pada hakekatnya mengandung makna keterlibatan elemen masyarakat secara sadar, penuh inisiatif untuk membangun dirinya, tanpa ada paksaan. Kesadaran itulah yang merupakan potensi untuk dikembangkan agar partisipasi mereka menjadi lebih nyata dan bermanfaat.

Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin sangat lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk penindasan, sehingga mereka sulit melepaskan diri dari perangkap kemiskinan itu. Dengan kata lain, masyarakat miskin sulit menolong dirinya sendiri, kalau tidak dibantu oleh 'orang luar' (Chambers, 1987).

Pandangan Chambers ini, merupakan gambaran awal betapa peliknya menangani orang miskin di perkotaan maupun pedesaan. Intervensi '*orang luar*' itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena '*orang luar*' biasanya jarang sekali memperhatikan, apalagi memahami sifat kemiskinan dari orang miskin itu. Walau begitu, peran dan keterlibatan '*orang luar*' masih tetap penting dan dibutuhkan.

Bantuan '*orang luar*' itulah kiranya dapat mengantar mereka keluar dari kondisi yang membelenggu mereka selama ini. Setidaknya mereka didorong agar



mampu menggali '*energi sosial*' nya yang selama ini terpendam. Maka disini peran pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM) dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin melalui kelompok Usaha bersama Simpan Pinjam, tetap relevan dan dibutuhkan dari waktu ke waktu.

Secara teoritis masalah kemiskinan dan kerentanan secara sosial-ekonomi (rawan pangan) hanya dapat diatasi melalui bantuan modal dan diikuti dengan upaya penyadaran melalui pendidikan dan latihan. Karena lewat bantuan modal dan pendidikan dianggap menjadi 'pintu masuk' untuk membangun ketahanan secara sosial-ekonomi, serta kesadaran dan orientasi baru masyarakat.

Pandangan demikian, tentunya membenarkan langkah terobosan penting yang telah ditempuh, baik oleh Pemerintah maupun YASPENSEL.

a. Pemberdayaan oleh Pemerintah

Sebagaimana telah digambarkan pada bagian terdahulu, bahwa selama Orde Baru, peran pemerintah amatlah dominan, yakni sebagai agen pembangunan dan agen pembaharuan. Kendati kita mengenal rumusan pembangunan 'untuk rakyat', namun dalam praktek rumusan itu berdiri sendiri, sementara rumusan: "dari rakyat" dan "oleh rakyat" terkesan tenggelam.

Inisiatif dan keterlibatan masyarakat dibatasi. Masyarakat ikut serta dalam mendukung program-program pembangunan yang dipelopori pemerintah bukan atas dasar kesadaran melainkan hasil mobilisasi 'dari atas'. Hal ini dapat ditunjukkan melalui peraturan dari pemerintah tingkat atas seperti: instruksi, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang cenderung diterapkan secara kaku. Itulah sebabnya isu partisipasi meletus sebagai reaksi



untuk 'menggugat' peran pemerintah yang begitu dominan, yang menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan.

Secara teoritis, pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (birokrasi) dan LSM memiliki perbedaan, sebagaimana dikemukakan Uphoff (1995) dan Trieanto (1999). Pola pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh birokrasi/pemerintah, bercorak sentralistik (*top-down*), karena lebih mendasarkan diri pada atauran/ regulasi yang ditetapkan oleh pejabat pusat/tertinggi. Sehingga aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dianggap sebagai penyimpangan.

Sedangkan LSM, menggunakan pendekatan partisipatif, yakni melalui proses tawar menawar, dialog, akomodatif dan persuasif, dan setiap keputusan diambil didasarkan pada musyawarah tentang apa yang mereka inginkan. Dengan cara ini masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan hasil yang dicapai menjadi karya dan milik bersama mereka.

1) Bentuk dan Proses Pemberdayaan

a) Bentuk Pemberdayaan

Secara empiris, pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah mengambil bentuk berupa pendidikan dan latihan serta bantuan modal, merupakan langkah terobosan yang tepat dan menentukan. Bila kita cermati peran dan keterlibatan pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM) tampak jelas bahwa pemerintah sering bertindak kurang tepat. Peran pendampingan pemerintah sebatas menunaikan tugasnya sebagai aparatur Negara, sehingga fungsi pendampingannya lebih bernuansa 'menggurui' atau mendikte. Pola pendampingan pemerintah lokal yang demikian, sering menjadi pemicu lahirnya persoalan baru, yang merupakan persoalan lama yang tidak terbenahi, seperti;

Pertama, anggota masyarakat yang hendak dibantu tidak diidentifikasi secara baik. Dalam arti, kriteria dan syarat seseorang mendapatkan bantuan, baik melalui pendidikan dan latihan maupun bantuan modal, kurang jelas. Tampaknya pemerintah tidak memiliki data yang akurat mengenai kelompok dan status sosial-ekonomi masyarakat yang hendak dibantu melalui program ini. Akibatnya, program bantuan pemerintah ini justru lebih menjangkau kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi sudah lebih baik, yakni pegawai negeri sipil dari pada kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi lemah. Dengan demikian, masyarakat kecil yang mestinya menjadi sasaran pemberdayaan justru kurang tersentuh oleh program pemberdayaan ini. Hasil ikutannya bahwa apabila kelemahan ini tidak secepatnya dibenahi, maka akan melahirkan kesenjangan dan jarak sosial yang semakin lebar.

Kedua, Kelompok kurang dipersiapkan secara baik, intervensi pemerintah terlalu kuat. Dalam arti, pemerintah perlu membiarkan anggota kelompok melatih mengorganisir dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mereka 'dari dalam'. Mestinya kelompok memiliki aspirasi, inisiatif, dan program sendiri yang merupakan pencerminan dari kebutuhan mereka di tingkat bawah. Dengan demikian, anggota masyarakat akan memperoleh manfaat langsung dari keterlibatannya di dalam organisasi/ kelompok tersebut. Melalui cara yang demikian, akan tumbuh solidaritas antar anggota kelompok, dan ikatan emosional yang kuat. Tanpa itu, solidaritas dan ikatan emosional sulit tumbuh, yang ada hanyalah ikatan mekanis, yakni ikatan sosial yang semu, karena digerakan dari luar kelompok. Dalam kondisi yang demikian, anggota kelompok cenderung apatis, dan ikatan sosial antar anggota kelompok dapat semakin kendor, yang dapat pula mengaburkan tujuan bersama.



b) Proses Pemberdayaan

Secara empiris, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap anggota kelompok, diperoleh gambaran bahwa anggota kelompok sendiri terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Cuma peran serta/keterlibatan anggota atau kelompok dalam keseluruhan proses ini lebih didorong oleh kesadaran yang palsu. Yakni ketaatan pada aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun kurang diimbangi oleh kesadaran dari dalam, yang merupakan pancaran kesadaran dan kemandirian yang sesungguhnya.

Prijono dan Pranarka (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan, paling tidak, harus melewati tiga tahap yakni (1) *Tahap inisial* yakni proses pembangunan dan pemberdayaan berlangsung dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat; (2) *Tahap partisipatoris*, yaitu dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat; dan (3) *tahap emansipatoris*, yakni pemberdayaan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Bila kita cermati tahap-tahap dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, dan dengan mengacu pada teori proses pemberdayaan dari Prijono dan Pranarka (1996) di atas, maka dapatlah digolongkan ke dalam tahap transisi dari tahap inisial ke tahap partisipatoris.

Hal itu tampak bila kita telusuri seluruh tahap mulai dari persiapan kelompok, penentuan kelompok prakarsa hingga penetapan badan hukum organisasi, sampai kepada pencairan dana kelompok, sepenuhnya masih berada di bawah bayang-bayang otoritas (intervensi) pemerintah, yang tetap



menggunakan aturan sebagai acuan tindak. Maka dapatlah dipahami bila 'mesin' kelompok/masyarakat masih sepenuhnya digerakan oleh pemerintah.

Memang, pengembangan usaha kecil melalui UBSP yang difasilitasi oleh pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur), tetaplh memiliki arti penting. Apalagi sumberdaya manusia setempat yang umumnya memang belum bisa menolong diri mereka sendiri. Mestinya kelemahan seperti tersebut di atas, janganlah dijadikan alasan pembenar oleh pemerintah untuk mendominasi kelompok/masyarakat.

Bila pemerintah tidak menggeser model pendekatan 'mobilisasi' dan 'dominasi' ini ke arah memberi iklim dan ruang kepada kelompok/masyarakat bagi tumbuhnya inisiatif untuk berperan serta atau berpartisipasi secara apa adanya, maka masyarakat/kelompok akan tetap tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk mengelola potensi sumberdaya lokalnya, makin tergantung, serta menunggu saja intervensi dari pihak luar (pemerintah).

Artinya, proses pendekatan pemberdayaan yang demikian hanya akan melahirkan kelompok masyarakat yang tetap kerdil, sulit untuk mandiri dan dewasa, baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Maka di sini dibutuhkan peran fasilitasi dan advokasi dari pemerintah secara lebih sungguh-sungguh. Harapan kita, agar pemerintah mulai mengubah semangat dan orientasi pengabdian, yang selama ini cenderung lebih berorientasi 'ke dalam' institusi birokrasinya sendiri; dan di lain pihak masih menempatkan kelompok/masyarakat tidak lebih dari pada obyek yang harus dibangun. Dengan semangat dan orientasi pengabdian baru, maka dari waktu ke waktu, pemerintah akan lebih sungguh-sungguh mendampingi kelompok masyarakat sehingga tumbuh

kesadaran, dan kesanggupan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia, secara mandiri dan bertanggungjawab.

Memang, selama ini pendampingan yang dilakukan pemerintah senantiasa mengacu pada Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Tekhnis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi. Pendekatan semacam ini tentu amat sentralistik (*top-down*).

Pola pendekatan yang sentralistik itu umumnya hanya efektif untuk tujuan jangka pendek. Apalagi pemerintah lebih menampilkan peran sebagai 'pemodal', bagi kelompok. Akibatnya, kelompok merasa seperti dituntut agar lebih mementingkan aspek kelancaran dalam pengembalian angsuran sesuai masa kontrak.

Ini berarti telah terjadi bias, dan sekaligus menunjukkan bahwa proses serta pendekatan yang digunakan pemerintah selama ini belum sepenuhnya mampu menangkap, menggali dan memahami situasi dan sifat kemiskinan kelompok/masyarakat setempat. Karena pemerintah/birokrasi biasanya mempunyai harapan dan target sendiri ketika mendatangi kelompok/masyarakat. Boleh jadi harapan dan target yang di bawah pemerintah itu, berbeda dengan harapan dan kehendak masyarakat setempat. Bila pembangunan mengabaikan inisiatif masyarakat lokal maka hanya melahirkan partisipasi yang semu.

Mestinya pusat perhatian pemerintah bukan hanya sekedar mendorong kelompok/masyarakat untuk memanfaatkan dana bantuan tersebut. Tetapi, lebih kepada upaya membangun 'kesadaran' mereka agar sanggup memanfaatkan

potensi diri dan potensi sumberdaya lokalnya. Pada tataran ini, kelompok/masyarakat diharapkan mampu untuk 'bangkit' mengubah orientasi hidup, yang dapat diwujudkan berupa adanya perbaikan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Upaya membangun keyakinan masyarakat ini merupakan 'modal' yang paling berharga, dan akan lebih bertahan dibanding bila pemerintah hanya mementingkan pengembalian dana pinjaman saja.

Data lapangan menunjukkan bahwa, dana pinjaman dari pemerintah itu dimanfaatkan/digunakan anggota untuk berbagai keperluan. Bahwa dari jumlah anggota kelompok yang ada, terdapat 12 orang (55 %) yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, seperti usaha kios, usaha ternak dan usaha tenun ikat tradisional. Dan sisanya, yakni 10 orang (45%) menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif.

Selanjutnya, dari 12 orang yang memilih usaha produktif tersebut, ternyata hanya 5 (lima) orang (42%) saja yang usahanya bertahan hingga sekarang. Sedang 7 (tujuh) orang (58%) lainnya usahanya macet, karena berbagai sebab. Sementara sisanya, yakni 10 orang (45 %) menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kegiatan atau keperluan yang bersifat konsumtif, seperti; untuk biaya pendidikan, kesehatan dan memperbaiki / membangun rumah tinggal.

Ada fenomena menarik, dimana banyak diantara anggota kelompok yang memilih jenis usaha yang sama. Hal ini dilakukan semata mata karena mereka merasa tertarik/tergiur dengan kesuksesan pendahulunya. Boleh jadi, hal ini disebabkan oleh kelompok yang belum dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan usaha. Misalnya, melalui pelatihan dan pembinaan teknis yang terkait dengan manajemen usaha dan keterampilan lainnya yang berhubungan dengan usaha anggota kelompok.

Hasil ikutannya, bahwa usaha-usaha yang dijalankan anggota kurang bertahan/ berkembang, yang ditunjukkan dengan hanya 5 (lima) orang (42%) anggota yang usahanya dapat bertahan hingga kini. Hal ini disebabkan oleh anggota kelompok yang tidak memiliki jiwa wirausaha, juga karena tidak memiliki kemampuan/keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha, sehingga tidak mampu bertahan / bersaing.

Bila kita ditelusuri lebih jauh, maka usaha-usaha yang tergolong maju/sukses, merupakan hasil kerja keras individu/anggota yang telah merintis usaha bertahun tahun lamanya. Hal ini, tentu terkait dengan manajemen usaha dan kompetensi serta keterampilan untuk mengembangkan usaha tersebut. Juga karena secara individu mereka memiliki kemauan, semangat dan keberanian untuk memulainya. Dengan demikian maka dapat dikatakan di sini bahwa upaya perbaikan taraf hidup anggota kelompok, melalui pengembangan usaha kecil belum sepenuhnya berhasil.

Di sini jelas, bahwa peran pemerintah masih sebatas memberikan fasilitas berupa bantuan modal dan administrasi. Sedang pelatihan-pelatihan yang sifatnya mengarah kepada penciptaan keterampilan tertentu, mestinya menjadi prioritas dan perlu dilakukan / diadakan oleh pemerintah.

Para pendamping/fasilitator dari Dinas Koperasi dan UKM, biasanya di tunjuk berdasarkan jabatan/kedudukan formal, dan bukan atas dasar kompetensi. Ini tentu menggambarkan corak dan karakter birokrasi yang sebenarnya, yang lebih mementingkan proses dari pada hasil. Pemerintah juga sering memposisikan diri sebagai 'pembina' bagi usaha-usaha kecil. Pada hal kita tahu bahwa tidak satupun dari aparat pemerintah itu yang mempunyai pengalaman merintis usaha hingga sukses.



Sehingga sering kita jumpai bahwa suatu program yang terkesan populis, namun pada akhirnya dalam implementasinya hanya menghasilkan sanjungan dan pujian bagi aparat/pejabat pemerintahnya saja.

Lebih jauh mengenai aktivitas aparatur pemerintah saat berada di lapangan, dapat dicatat disini bahwa hampir seluruh aktivitas yang dijalankan aparatur di tingkat bawah lebih didorong oleh kepentingan untuk mempertanggung jawaban secara struktural kepada atasan mereka. Hal yang demikian itu dapat memberi *image* negatif bagi pemerintah, yakni mengabdikan kepada masyarakat dengan setengah hati.

Walaupun begitu, bukan berarti aparatur pemerintah itu tidak mempunyai rasa empati atas situasi yang dihadapi masyarakat kecil. Namun oleh karena ketaatan mereka terhadap aturan ataupun atasannya yang masih begitu kuat, sehingga cenderung melahirkan semacam pola kerja dan pola sikap yang khas, yang melekat pada birokrasi/pemerintah. Ketaatan dan rasa hormat yang kaku/berlebihan itu pula cenderung mengendorkan semangat dan niat luhur mereka untuk melayani kepentingan masyarakat kecil secara optimal.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa pola pendekatan yang digunakan aparatur pemerintah umumnya bersifat formal/sentralistik. Maka konsekuensi dari pendekatan ini yaitu waktu untuk bersama masyarakat relatif sangat singkat/pendek, sehingga cenderung tergesa-gesa. Kadang-kadang mereka menggunakan waktu pada sore hari, namun pada umumnya mereka sering menggunakan jam kerja/dinas, fasilitas dan biaya perjalanan dinas untuk mengadakan kunjungan, pembinaan / sosialisasi kepada kelompok.

Dalam situasi yang demikian, tentu ada banyak hal yang bisa mereka bahas dan bicarakan bersama kelompok/masyarakat. Tapi sering diperoleh kesan dan gambaran bahwa belum semua permasalahan masyarakat dapat digali/diketahui ataupun dipahami secara sungguh-sungguh oleh aparatur pemerintah. Karena dalam pola hubungan yang formal seperti itu, terkadang hal-hal yang sesungguhnya menjadi permasalahan utama masyarakat di tingkat bawah sering tidak muncul ke permukaan.

Hal lain yang bisa ditemukan dari pola hubungan formal atau 'top-down' ini yakni masyarakat hanya tergerak berkelompok sekedar untuk mendapat pinjaman dana, dan kurang ada rasa memiliki baik terhadap kelompok maupun program, karena menganggap mereka tidak dilibatkan dalam seluruh proses.

Inilah kira-kira beberapa kelemahan dari pola pendekatan formal atau 'top-down', tapi sekaligus merupakan situasi yang paling dilematis, yang harus bisa diperankan oleh aparat dan pejabat di tingkat bawah. Karena hal ini dianggap berkaitan langsung dengan citra jabatan/kedudukan dan citra instansi mereka di mata pejabat pemerintah tingkat atas/pusat.

Dengan persepsi aparatur di tingkat bawah seperti itu, mereka seringkali tergelincir dari kedua kutub ini. Sebab sulit untuk berdiri di atas dua kutub sekaligus, yakni: memilih untuk melayani masyarakat kecil, ataukah memilih untuk menjaga harga diri dan nama baik atasan atau lembaga.

Dilema ini sering mendorong aparatur di tingkat bawah untuk bertindak kurang sepatutnya, mungkin saja karena tidak rela kehilangan kepercayaan dari lembaga dan atasannya. Inilah sisi yang melemahkan birokrasi /pemerintah kita, yang dapat kita temukan juga ditempat-tempat lainnya, yakni ingin dilayani dan bersikap pasif menunggu instruksi/perintah dari atasannya.

Untuk mengubah mentalitas aparat birokrasi pemerintah (daerah) seperti ini tentu membutuhkan waktu. Tapi hal lain yang penting di sini, adalah diperlukan peran kontrol masyarakat yang dilakukan secara lebih gencar. Karena apabila aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu dikontrol dan diawasi secara terus menerus oleh masyarakat, maka lambat laun kelemahan maupun kekurangan yang ada senantiasa dapat dikurangi. Tanpa peran kontrol dari masyarakat secara sistematis, maka mustahil mengharapkan keadaan yang demikian sulit itu dapat diperbaiki.

2) Hasil Yang Dicapai

Pertanyaan penting yang perlu diajukan di sini adalah: apakah peran pendampingan pemerintah selama ini telah mampu merangsang / mendorong terciptanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal secara mandiri, bertanggung jawab dan berkelanjutan?

Pertanyaan di atas, tentu dapat membimbing kita untuk melihat lebih jauh peran dan hasil-hasil yang dicapai kelompok/masyarakat melalui pengembangan usaha kecilnya. Seperti telah disinggung dimuka bahwa pengembangan usaha kecil melalui UBSP, yang difasilitasi pemerintah ternyata membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Dari data lapangan seperti tersaji pada bagian terdahulu menunjukkan bahwa usaha yang dikembangkan anggota kelompok, yang difasilitasi pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur) telah membawa manfaat berupa peningkatan pendapatan anggota. Melalui usaha tersebut mereka dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pendidikan anak, dan kesehatan. Berikut ini dapat disajikan perbandingan





penghasilan anggota sebelum dan sesudah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah, sebagai berikut:

(a) *Usaha tenun Ikat Tradisional*: penghasilan anggota dari usaha ini sebelum mendapat pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah adalah Rp 100.000 – Rp 150.000 per bulan. Setelah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah, penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 200.000 – Rp 300.000 per bulan.

(b) *Usaha Kios*: Penghasilan anggota dari usaha ini sebelum mendapat pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah adalah Rp 100.000 – Rp 200.000 per bulan. Setelah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah, penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 300.000 – Rp 500.000 per bulan.

(c) *Usaha sayur dan Buah*: Penghasilan anggota dari usaha ini sebelum mendapat pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah adalah Rp 100.000 – Rp 250.000 per bulan. Setelah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari pemerintah, penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 200.000 – Rp 350.000 per bulan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa umumnya usaha yang dikembangkan anggota kelompok yang difasilitasi oleh pemerintah membawa manfaat bagi peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Yaitu membantu meringankan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup atau kebutuhan akan makanan seperti: beras, lauk-pauk, sayur-buah, minyak, dan lain-lain. Juga membantu pemenuhan kebutuhan akan pakaian, perabot rumah tangga, pendidikan anak dan kesehatan. Jadi, ada perbaikan taraf hidup. Tentu,



keberhasilan ini tidak sepenuhnya menggambarkan kemajuan kelompok. Karena keberhasilan kelompok ternyata merupakan hasil kerja keras individu tertentu saja.

Seperti diungkapkan Friedmann (1992), bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi. Maka kemampuan individu senasib untuk berkumpul dalam satu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan yang dicapai secara individual akan membawa manfaat secara kelompok atau kolektif pula. Kendati keberhasilan secara individual tersebut tentu tidak terlepas dari usaha dan kerja keras mereka dalam merintis usaha dengan susah payah dalam rentang waktu yang cukup lama. Maka di sini faktor minat dan kemampuan serta keterampilan anggota amatlah menentukan suatu usaha dapat bertahan serta berkelanjutan.

Kendati keberhasilan usaha individu tersebut belum dapat menjamin terjadinya perubahan besar dalam kelompok, tapi setidaknya ada hal baru yang patut menjadi media pembelajaran bersama (*learning society*) dalam mengembangkan usaha secara mandiri dan berkesinambungan.

Bantuan pemerintah yang meliputi administrasi dan bantuan modal, mestinya dipandang sebagai sarana, yakni sekedar upaya untuk merangsang anggota kelompok dalam memperbaiki taraf hidupnya, dan bukannya sebagai upaya yang bersifat final.



Bagaimanapun bila upaya membangun 'masyarakat' tanpa diikuti dengan membangun 'kesadaran', maka biasanya mereka akan cenderung kembali ke kebiasaan atau pola hidup semula, yakni pola hidup subsisten, dan selalu 'bergantung' pada orang lain. Sehingga ketika pendampingan berakhir, kelompok/masyarakat itupun mulai kembali ke kebiasaannya semula, dan tetap tidak berdaya.

Hal-hal pelik seperti inilah yang telah berulang ulang diingatkan oleh para ahli bahwa, orang miskin biasanya sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan, bila tidak terlebih dahulu dibangkitkan 'kesadaran' dan 'rasa percaya diri' akan potensi dirinya yang memungkinkan mereka dapat menolong dirinya sendiri.

b) Pemberdayaan Oleh YASPENSEL

1) Bentuk dan Proses Pemberdayaan

a) Bentuk Pemberdayaan

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh YASPENSEL, meliputi pendidikan/latihan dan bantuan modal usaha. Kedua program ini, merupakan langkah tepat untuk membangun kesadaran dan orientasi baru masyarakat guna mewujudkan perbaikan taraf hidup melalui pengembangan usaha kecil.

Pendidikan/latihan, yang dilaksanakan oleh YASPENSEL yang meliputi apa yang disebut dengan '5 (lima) Bidang Hasil Pokok' (5-BHP) yakni: (a) organisasi, (b) administrasi, (c) permodalan, (d) usaha dan (e) pengembangan.

Kelima hal ini, merupakan paket pendidikan/latihan yang ideal. Masyarakat sungguh-sungguh dibangun kesadarannya, sebelum dibantu dengan modal usaha. Masyarakat terlebih dahulu diajak untuk berkelompok, membangun

kesamaan pandangan mengenai bagaimana cara mencapai tujuan bersama. Bila organisasi sebagai fundasi sudah kuat, maka harapan dan cita-cita individu dapat dibangun di atasnya. Melalui cara yang demikian, masyarakat akan lebih mandiri, bersikap menghargai dan akan memanfaatkan peluang serta fasilitas berupa bantuan modal ini secara lebih bertanggungjawab. Ini merupakan modal utama yang harus diperjuangkan oleh setiap elemen masyarakat yang memperjuangkan dan memiliki komitmen pemberdayaan masyarakat kecil.

Pola pendidikan/latihan semacam ini lebih efektif karena nilai-nilai kebersamaan dan pembelajaran lebih terpatneri dalam hati sanubari mereka. Hal ini hanya dapat terwujud bila iklim pembelajaran yang dibangun sungguh-sungguh berorientasi 'ke dalam'. Dalam arti memperhitungkan keragaman, kekhasan lokal, potensi dan situasi sosial-ekonomi dan budaya yang dimiliki masyarakat. Semuanya berjalan tanpa ada tekanan/paksaan melainkan kehendak semua pihak untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

b) Proses Pemberdayaan

Secara empiris, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap anggota kelompok UBSP Kepuuk Lolon, yang difasilitasi oleh YASPENSEL, diperoleh gambaran bahwa anggota kelompok sendiri terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Peran serta/keterlibatan anggota atau kelompok dalam keseluruhan proses ini amat nyata, dan merupakan pancaran kesadaran dan kemandirian yang sesungguhnya.

Prijono dan Pranarka (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan, paling tidak, harus melewati tiga tahap yakni (1) *Tahap inisial* yakni proses pembangunan dan pemberdayaan berlangsung dari pemerintah, oleh pemerintah



dan untuk rakyat; (2) *Tahap partisipatoris*, yaitu dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat; dan (3) *tahap emansipatoris*, yakni pemberdayaan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Kalau pendekatan yang digunakan aparat pemerintah umumnya bersifat formal dan *top-down*, maka terdapat hal yang agak berbeda yang dilakukan YASPENSEL, yakni pendekatan *hidup dan tinggal bersama masyarakat (live-in)*. Pola pendekatan yang demikian memungkinkan mereka untuk lebih mengenal dan memahami situasi dan sifat kemiskinan masyarakat setempat.

Keseluruhan proses ini, tentunya dapat digolongkan dalam tahap transisi, yakni tahap yang berada di antara tahap inisial dan tahap partisipatoris. Artinya masyarakat sendiri sudah mulai diberi wewenang (memberi ruang bagi tumbuhnya kreativitas dan inisiatif) untuk bertindak selaku aktor penentu yang berkenaan dengan aktivitas pengembangan usaha kecil. Sedang YASPENSEL memosisikan diri sebagai pendamping atau mitra, yakni membangun 'keyakinan' dan 'kesadaran' masyarakat untuk menolong dirinya.

Mencermati keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil yang difasilitasi oleh YASPENSEL, dimana pendekatan yang digunakan telah memberi warna tersendiri, baik proses maupun hasilnya.

Kalau pendekatan yang digunakan aparat pemerintah umumnya bersifat formal dan *top-down*, maka terdapat hal yang agak berbeda yang dilakukan YASPENSEL, yakni pendekatan *hidup dan tinggal bersama masyarakat (live-in)*. Pola pendekatan yang demikian memungkinkan mereka untuk lebih mengenal dan memahami situasi dan sifat kemiskinan masyarakat setempat.



Model pendekatan ini memungkinkan mereka untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dari hati ke hati secara lebih intensif dan bermutu. Di samping itu, melalui pendekatan 'hidup dan tinggal bersama masyarakat' ini, memungkinkan tercipta suasana keterbukaan antara kedua belah pihak, menyingkirkan jarak sosial, dan keengganan diantara mereka serta dapat meninggalkan kesan yang mendalam. Maka tercipta ruang dialog, yakni saling tukar informasi, saling belajar mengenal dan memahami sehingga terjalin komunikasi yang bermutu.

Keterbukaan dan kesediaan masyarakat setempat untuk menerima mereka sebagai 'orang luar' ini merupakan pintu masuk untuk bertindak lebih jauh, dan merupakan awal dari kesuksesan. Walau dengan segala macam keterbatasan yang mereka miliki, termasuk sarana dan prasarana penunjang, namun berkat tenaga-tenaga lapangan yang terlatih dan berpengalaman proses pendampingan selalu dapat berjalan dengan baik.

Padahal masyarakat kecil itu biasanya mempunyai rasa curiga yang tinggi terhadap orang-orang yang baru mereka kenal, namun semua itu dapat diatasi. Setidaknya hambatan psikologis dan jarak sosial yang ada di dalam benak kelompok/masyarakat, dapat tereliminasi. Dengan demikian tercipta suasana dan terjalin pola hubungan diantara mereka yang lebih longgar dan fleksibel, (tidak kaku), penuh persaudaraan dan kekeluargaan.

Bentuk pendekatan seperti ini dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi masyarakat kecil, karena mereka merasa bahwa dalam kesulitan hidupnya masih ada orang yang mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan membantu memberi jalan keluar bagi mereka. Mereka diajak untuk bangkit, agar memiliki rasa percaya diri, sehingga mereka bisa menolong diri mereka dari situasi kemiskinan yang menindas / membelenggu itu.



Mereka didorong untuk menggali dan menemukan sendiri masalah-masalah mereka, dan kemudian menentukan jalan keluar / langkah pemecahannya secara bersama. Melalui proses pelibatan masyarakat secara aktif sejak awal seperti ini, merupakan modal yang amat berharga yang dapat melahirkan 'semangat' dan 'kesadaran baru' untuk mewujudkan harapan-harapan mereka secara bersama. Artinya masyarakat sudah mulai dapat berpartisipasi secara aktif memanfaatkan/mengolah potensi dirinya dan tidak terlalu berharap pada bantuan dari 'orang luar'.

3) Hasil Yang Dicapai

Hasil yang bisa ditunjukkan oleh kelompok binaannya, UBSP Kepuuk Lolon, yakni terdapat kemajuan yang cukup berarti. Hal yang menonjol adalah adanya solidaritas anggota kelompok yang cukup tinggi, serta adanya proses pembelajaran bersama (*learning society process*) dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi anggota /kelompok. Juga adanya kemandirian, baik secara individu maupun kelompok. Dalam hal penentuan usaha maupun kegiatan, setiap anggota mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri jenis usaha yang digeluti.

Dari data lapangan seperti tersaji pada bagian terdahulu menunjukkan bahwa usaha yang dikembangkan anggota kelompok UBSP Kepuuk Lolon, yang difasilitasi oleh Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL) telah membawa manfaat berupa peningkatan pendapatan yang berarti. Melalui usaha tersebut mereka dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pendidikan anak, dan kesehatan. Berikut ini dapat



disajikan perbandingan penghasilan anggota sebelum dan sesudah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL, sebagai berikut:

(a) *Usaha tenun Ikat Tradisional*: penghasilan anggota dari usaha ini sebelum mendapat pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL adalah Rp 200.000 – Rp 300.000 per bulan. Setelah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL, penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 600.000 – Rp 1.000.000 per bulan.

(b) *Usaha Jual Beli Kelapa*: Penghasilan anggota dari usaha ini sebelum mendapat pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL adalah Rp 100.000 – Rp 150.000 per bulan. Setelah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL, penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 200.000 – Rp 500.000 per bulan.

(c) *Usaha sayur dan Buah*: Penghasilan anggota dari usaha ini sebelum mendapat pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL adalah Rp 100.000 – Rp 150.000 per bulan. Setelah memperoleh pendidikan, latihan dan bantuan modal dari YASPENSEL, penghasilan mereka bertambah menjadi Rp 300.000 – Rp 750.000 per bulan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa umumnya usaha yang dikembangkan anggota kelompok yang difasilitasi oleh YASPENSEL membawa manfaat bagi peningkatan taraf hidup anggota kelompok ke arah yang lebih baik.

Yaitu membantu meringankan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup atau kebutuhan akan makanan seperti: beras, lauk-pauk, sayur-buah, minyak, dan lain-lain. Juga membantu pemenuhan kebutuhan akan pakaian, perabot rumah tangga, perbaikan rumah tinggal, pendidikan anak dan





kesehatan. Jadi, ada perbaikan taraf hidup. Tentu, keberhasilan ini tidak sepenuhnya menggambarkan kemajuan kelompok. Karena keberhasilan kelompok ternyata merupakan hasil kerja keras individu tertentu saja.

Seperti diungkapkan Friedmann (1992), bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi. Maka kemampuan individu senasib untuk berkumpul dalam satu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif.

Beranjak dari pandangan Friedmann di atas, dan bila kita mencoba mengaitkannya dengan data lapangan yang ada, maka jelas terlihat bahwa peran pemberdayaan YASPENSEL amatlah menentukan. Yaitu upaya membangun kesadaran dan membangkitkan semangat atau 'roh' pada kelompok atau masyarakat untuk sanggup menolong dirinya, baik secara individu maupun kolektif.

Proses membangkitkan 'semangat' dan 'kesadaran' ini merupakan modal untuk memupuk dan memelihara ikatan dan relasi antar anggota kelompok untuk mewujudkan cita-citanya, baik secara individu maupun kelompok. Dari sini kemudian melahirkan perasaan senasib dan sepenanggungan, yang merupakan daya ikat dalam setiap kelompok atau organisasi untuk memunculkan 'energi sosial' yang selama ini terpendam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model pemberdayaan yang digunakan YASPENSEL cukup efektif, bila dilihat dari keseluruhan proses dan hasil-hasil yang dicapai oleh anggota kelompok dampingannya. Hal itu bisa terlihat melalui tingkat keaktifan, kesungguhan dan keuletan mereka dalam mengembangkan usaha. Di samping itu, model



pendampingan yang diterapkan YASPENSEL memberi 'ruang' bagi mereka berekspresi dan bereksperimen dengan leluasa.

Pada bagian terdahulu telah dipaparkan bahwa dari seluruh anggota kelompok UBSP Kepuuk Lolon yang berjumlah 35 anggota, dimana 21 orang (60%) yang memanfaatkan dana pinjaman untuk kegiatan yang sifatnya meringankan/mengatasi kesulitan mereka seperti: pendidikan, kesehatan dan untuk memperbaiki/membangun rumah tinggal. Sedang anggota sisanya, yakni 14 orang (40 %) mengembangkan usaha produktif, meliputi: usaha tenun ikat tradisional, jual beli hasil perkebunan dan ternak kambing. Dalam perjalanan, ternyata terdapat usaha dari 3 (tiga) orang yang mengalami kemacetan dan akhirnya 'gulung tikar'.

Usaha yang gagal, umumnya disebabkan oleh faktor internal yakni yang bersumber dari anggota kelompok seperti: masih rendahnya kemampuan anggota dalam mengelola usaha, serta rendahnya minat dan keterampilan anggota untuk menunjang pengembangan usaha dimaksud. Sedang faktor eksternalnya, yakni yang berhubungan dengan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang terbatas, serta tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat yang kurang menunjang.

Bagi anggota yang usahanya berhasil, kehidupan mereka semakin baik dan meningkat. Keuntungan dari usaha mereka biasanya mereka gunakan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup (dalam rumah tangga) sehari-hari. Juga untuk kepentingan biaya pendidikan anak, kesehatan maupun membangun / memperbaiki rumah tinggal.

Bagi anggota yang usahanya yang gagal, ini tentu tidak lepas dari minat dan pengalaman dalam mengelola usaha. Selain itu, orientasi anggota kelompok,



yang masih kuat diikat oleh lingkungan sosial setempat, yang melahirkan pola sikap, yang sulit melepaskan kebiasaan lama, seperti pola hidup konsumtif yakni kegemaran akan pesta dan hidup boros, tidak memiliki orientasi sosial ekonomis.

Maka disini dapat dikatakan, hanya anggota kelompok yang mempunyai minat/orientasi wirausaha, serta pengalaman dan keberanian merintis usaha saja, yang dapat bertahan dan berkembang. Tetapi bagi anggota yang gagal, biasanya mulai 'bangkit' kembali, berkat dorongan dan dukungan sesama anggota.

Hal lain yang dapat dikemukakan di sini, bahwa hasil kerja LSM sering oleh birokrasi dilihat sebagai saingan, bahwa dapat berwujud sebagai 'musuh'. Apalagi selam ini, pola sikap dan pola kerja masyarakat cenderung didominasi dan meniru pola sikap dan pola kerja aparat pemerintah (birokrasi), termasuk level paling bawah sekalipun. Karena pemerintah memiliki perangkat dan struktur yang sanggup mendominasi peran pembangunan. Hal yang demikian, sering melahirkan anggapan yang minor terhadap LSM (YASPENSEL).

Berangkat dari kondisi semacam ini, maka dapat dipahami bila anggota/kelompok dampingan YASPENSEL, sulit menampilkan warnanya secara jelas, karena masyarakat umumnya masih berada dalam bayang-bayang dominasi birokrasi. Maka di sini dibutuhkan suatu pola kerjasama yang sinergi antara Pemerintah dan LSM (YASPENSEL), agar kepentingan masyarakat ke depan tidak lagi dikorbankan demi citra dan harga diri dari masing-masing lembaga.



c) Faktor Pendukung dan Penghambat

Chambers (1987) pernah mengungkapkan bahwa “hanya masyarakat miskin sendirilah yang bisa menolong dirinya sendiri.” Ungkapan yang demikian tentu beranjak dari suatu kondisi bahwa masyarakat memiliki potensi terpendam, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tapi, dilain pihak, masyarakat miskin itu umumnya sangat lemah karena telah masuk dalam ‘perangkap kemiskinan’, sehingga sulit untuk menolong dirinya sendiri.

Dalam situasi pelik semacam ini, tentu membutuhkan keterlibatan ‘orang luar’ untuk mendorong dan menstimulasi mereka agar sanggup menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia sehingga dapat mengubah taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Gambaran yang demikian, tentu ditemukan juga dalam kelompok UBSP, baik yang difasilitasi pemerintah maupun oleh YASPENSEL.

1) Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam upaya pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) yakni:

- a. Semakin terbukanya kesempatan untuk mengelola sumber daya lokal sesuai semangat otonomi daerah (Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)

Bila kita telusuri kebijakan pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Orde baru, yang memberi peran terlalu besar (dominan) kepada pengusaha besar. Asumsi yang digunakan adalah, bila pengusaha semakin besar dan kuat secara ekonomi maka rakyatpun akan mendapat ‘tetesan’ dari atas yang makin besar pula. Tetapi kemudian ternyata kebijakan ini hanya menciptakan ketimpangan/ kesenjangan yang menganga,



dimana yang kaya semakin kaya sedang rakyat miskin semakin bertambah miskin.

Sebagai koreksi terhadap kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, kemudian lahir kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih memihak kepada rakyat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, mengamanatkan secara tegas upaya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, maju, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kemudian ditetapkan arah kebijakan yang menjamin peran serta dan keterlibatan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat (LSM) sebagai perwujudan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal yang demikian, tentu amatlah menolong masyarakat kecil, dalam upaya memperbaiki kesejahteraan hidup mereka.

- b. Terbukanya iklim usaha dan adanya kemudahan untuk memperoleh bantuan modal, baik yang bersumber dari lembaga pemerintah, swasta maupun LSM.

Dewasa ini mulai tumbuh kesadaran bersama, bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas segenap komponen masyarakat, yang oleh Uphoff (1995) dibagi dalam tiga sektor yakni:

Pemerintah (birokrasi), swasta (pasar) dan masyarakat (LSM). Keterlibatan sungguh-sungguh dari segenap komponen ini, diharapkan dapat menarik



dengan cepat masyarakat keluar dari situasi kemiskinan yang membelenggu mereka selama ini.

2). Faktor-Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang dianggap dapat menghambat pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

a. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah.

Masyarakat umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah serta masih sangat kuat terikat pada tradisi dan adat-istiadat setempat. Khusus yang terkait dengan kelompok sering ditemukan bahwa anggota maupun pengurus kelompok kurang memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mereka juga belum memiliki jiwa dan orientasi kewirausahaan serta keterampilan dalam mengelola usahanya, sehingga usaha yang ada sering tidak berkembang/berjalan ditempat. Kondisi semacam ini memberikan gambaran bagi kita bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan/keterlibatan 'orang luar' yang sungguh memahami kondisi dan sifat kemiskinan mereka.

b. Masyarakat masih sangat kuat terikat pada tradisi dan adat-istiadat setempat.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa pengaruh lingkungan sosial budaya masih amat kuat. Hal ini dapat terlihat melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh mereka, seperti, gemar mengadakan pesta, pola hidup boros, karena memiliki orientasi jangka pendek (pola pikir siklis). Bahwa tradisi dan budaya yang merugikan mestinya dapat diarahkan untuk hal-hal yang produktif. Tanpa itu, usaha-usaha yang sungguh-sungguh sulit memperbaiki keadaan yang memprihatinkan itu.



Untuk mengeliminasi hal ini tentu peran pendamping sangat menentukan pula. Kerena pendamping merupakan media penting untuk mentransformasikan nilai dan orientasi baru kepada kelompok/masyarakat.

Melalui pendamping dapat diandalkan untuk membangun keyakinan dan harga diri mereka agar dapat mengelola energi dan potensi sosial mereka.

Dari uraian mengenai faktor-faktor penghambat seperti di atas, kiranya dapat diatasi melalui cara:

- 1). Perlu Adanya bantuan teknis, permodalan dan pendampingan. Maksudnya agar pembinaan teknis mengenai administrasi usaha yang diikuti dengan bantuan permodalan. Namun semua itu, mestinya tetap diawali dengan sosialisasi atau pelatihan yang bertujuan untuk membangun 'kesadaran' agar masyarakat memiliki 'orientasi hidup ke arah yang lebih baik.

Maka perlu menyediakan waktu dan tenaga yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok/masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Dengan cara demikian usaha dan aktivitas kelompok/masyarakat dapat lebih bertahan dan berkesinambungan, karena bertumpuh pada keswadayaan/kemandirian mereka sendiri.

- 2) Pemerintah, Swasta maupun LSM, perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil.

Ini tentu membutuhkan waktu dan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak, sehingga melalui proses pembelajaran dalam kelompok/masyarakat yang terus menerus, mampu membangkitkan kembali '*energi sosial*' yang terpendam selama ini.



Tabel 12. Perbandingan temuan-temuan penelitian terdahulu dan korelasinya dengan penelitian ini.

No.	Peneliti, Tempat dan Tahun	Hasil Penelitian	Korelasinya Dengan Penelitian ini
01.	Uphoff (1992), Malawi, Haiti, Pakistan & Kenya	-Keberhasilan program dan proyek disebabkan oleh pendekatan yang digunakan NGO melalui 'proses pembelajaran', serta diberinya kewenangan penuh bagi masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya.	-Pola pendekatan yang digunakan pemerintah lebih bersifat formalistik, karena terikat pada aturan. Sedang YASPENSEL menggunakan pendekatan pembelajaran, dimana masyarakat diberi wewenang untuk berkreasi dan bereksperimen.
02.	Triyanto (1999), Kecamatan Tulaka, Kab. Pacitan	- Birokrasi mendasarkan diri pada aturan yang kaku, sehingga setiap aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan dianggap sebagai penyimpangan. Sedang LSM (Plan International) mendorong masyarakat agar mengelola potensi sumberdaya lokal demi kesejahteraannya, dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dan hasil kerja mereka merupakan milik bersama mereka.	-Birokrasi menggunakan pendekatan yang sentralistik (top-down), mempunyai harapan / target sendiri ketika mendatangi masyarakat, dan masyarakat ditempatkan sebagai obyek pembangunan. Sedang YASPENSEL menggunakan pola partisipatif, dimana masyarakat dibangkitkan kesadarannya, didorong untuk memanfaatkan potensi sumberdaya lokal demi meningkatkan taraf hidup mereka.
03.	Awang (1995), Desa Hutan Kabupaten Madiun	Kegagalan proses pemberdayaan masyarakat penerima IDT, karena tidak diberinya kewenangan bagi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kebutuhan pembangunannya.	-Birokrasi karena pendekatan yang digunakan berdasarkan aturan/regulasi maka pelibatan masyarakat bersifat semu dan sementara. Sedang YASPENSEL memberi kewenangan penuh kepada kelompok/masyarakat untuk merumuskan sendiri, melaksanakan dan menilai programnya sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1.(a) Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan, baik oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM maupun YASPENSEL, yakni pendidikan/latihan dan bantuan modal. Bentuk pemberdayaan semacam ini amatlah tepat, karena secara langsung dapat menolong masyarakat kecil untuk meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan usaha kecil. Pendidikan/latihan, bagi pemerintah merupakan proses mempersiapkan kelompok menerima bantuan modal. Sementara bagi YASPENSEL, bukan sekedar mempersiapkan kelompok/masyarakat untuk menerima bantuan modal. Namun lebih dari itu, yakni sebagai media pembelajaran bersama dalam membangun 'kesadaran' dan 'orientasi' hidup baru.
- (b) Secara formal, proses pemberdayaan yang dijalankan oleh kedua lembaga ini dapat dikatakan sama. Namun secara substansial memiliki perbedaan yang mendasar. Pola pendekatan yang digunakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat didasarkan pada aturan/regulasi, terkesan amat sentralistik (*top-down*), dan cenderung memposisikan masyarakat sebagai obyek. Sedang strategi YASPENSEL dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui cara membangun 'kesadaran' dan mendorong sumberdaya lokal yang berpotensi untuk



mengelola sendiri program-program mereka. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra sejajar/pendamping. Dengan demikian posisi masyarakat sebagai pelaku utama, sedang keberadaan YASPENSEL ditengah mereka lebih merupakan penggerak penyadaran dan stimulator dinamika.

Konsekuensi logis dari 'semangat' dan pola pendekatan yang berbeda, ternyata memberikan hasil yang berbeda pula.

Partisipasi yang dibangun birokrasi bersifat jangka pendek dan kurang bertahan. Karena apa yang disebut dengan perencanaan partisipatif masih diwarnai oleh kehendak dan harapan pemerintah, dan bukan apa yang dikehendaki masyarakat. Dalam arti, pemerintah mendatangi masyarakat dengan konsep dan target sendiri. Boleh jadi konsep tersebut tidak sepenuhnya cocok dengan kehendak dan harapan masyarakat setempat.

Sedang YASPENSEL, menggunakan pendekatan partisipatif, dimana mereka berusaha memahami masyarakat 'dari dalam', dan bersama masyarakat merancang program. Kemudian masyarakat sendiri yang melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi. Peran YASPENSEL sebatas sebagai pendamping/fasilitator dan animator, sedang posisi masyarakat sebagai pelaku utama.

2. Bahwa usaha yang dikembangkan anggota kelompok, baik yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur maupun YASPENSEL membawa hasil yang cukup menggembirakan, seperti dapat meringankan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pendidikan dan kesehatan. Memang selama ini pendampingan yang dijalankan oleh



pemerintah lebih menekankan pada proses dan bukan pada hasil. Melalui pendekatan *top-down*, masyarakat dimobilisasi untuk menerima program dari atas. Dengan demikian, usaha yang dikembangkan anggota menjadi kurang bertahan. Usaha yang bertahan, semata-mata karena hasil kerja keras mereka secara individual, di samping karena memiliki minat / jiwa wirausaha.

3. Adanya beberapa faktor pendukung dalam pengembangan usaha kecil melalui UBSP (baik yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun oleh YASPENSEL), yaitu adanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan dalam memperoleh bantuan modal. Sedang faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah, di samping masyarakat masih sangat kuat terikat pada tradisi dan adat-istiadat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dan sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1.a. Bahwa pendidikan/latihan dan bantuan modal merupakan bentuk pemberdayaan yang tepat dalam rangka pengembangan usaha kecil melalui UBSP. Untuk itu, pemerintah maupun LSM perlu terus mempertahankan bentuk dan proses pemberdayaan semacam ini, serta berupaya untuk mendampingi/memfasilitasi masyarakat secara sungguh-sungguh sehingga dari waktu ke waktu semakin mandiri dalam segala bidang kehidupan. Dalam arti pemberdayaan masyarakat (melalui pendidikan/latihan dan bantuan modal ini), kiranya dapat diterapkan melalui pola-pola yang semakin mudah diserap dan diadopsi oleh masyarakat



setempat. Proses pemberdayaan semacam ini tentunya akan dapat membuahkan hasil yang lebih berarti.

- b. Pemerintah dan masyarakat (LSM), perlu membangun kerjasama program (*sharring program*) pemberdayaan yang saling menguntungkan, seperti dengan: (1) melakukan pemetaan wilayah miskin dan indentifikasi masyarakat miskin menurut tingkatannya serta menentukan prioritas dan sasaran bersama; (2) adanya visi dan komitmen bersama mengenai pentingnya pendidikanlatihan dan bantuan modal dalam upaya pengembangan usaha kecil; (3) masyarakat perlu 'bukti', bukan program 'kosong'. Oleh karena masyarakat umumnya hanya mau diyakinkan atau mau ikut berpartisipasi secara aktif, kalau program-program pemberdayaan tersebut sungguh berguna atau bermanfaat bagi mereka. Maka di sini perlu ditunjukkan 'bukti' keberhasilan program tersebut di tempat lain.

Ini merupakan salah satu alternatif 'model' pemberdayaan masyarakat, yang bila diterapkan secara sungguh-sungguh akan sanggup membangkitkan 'semangat' dan 'keyakinan' masyarakat untuk mengelola potensi sumberdaya lokal yang tersedia demi peningkatan taraf hidup mereka.

2. Agar pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dapat membawa manfaat serta hasil yang berarti, maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat perlu memberikan pendidikan dan latihan khusus, guna menumbuhkan kesadaran, minat dan kemampuan anggota untuk menentukan pilihan usaha secara tepat. Dengan demikian, bantuan modal usaha yang diberikan untuk mengembangkan



usaha akan lebih bertahan serta akan membawa manfaat nyata bagi peningkatan taraf hidup anggota keluarga ke arah yang lebih baik.

3. Pemerintah maupun LSM perlu memberi 'ruang' dan mendorong kelompok/masyarakat tumbuh apa adanya, serta menciptakan aturan/regulasi yang menjamin terselenggaranya aktivitas masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam arti, proses pemberdayaan melalui pendidikan / latihan maupun bantuan modal mestinya menjadi '*pintu masuk*' untuk lebih memahami kondisi dan sifat kemiskinan masyarakat '*dari dalam*'. Pola pendekatan melalui 'proses pembelajaran bersama' ini, memungkinkan terciptanya dialog dari hati ke hati, dan terjalin komunikasi yang lebih bermutu. Dengan demikian akan terbuka kesempatan untuk transfer pengetahuan, keterampilan dan budaya. Melalui 'proses pembelajaran bersama' (*learning society*) semacam ini, masyarakat akan tumbuh kesadarannya serta memiliki dorongan yang kuat untuk menggali '*energi sosial*'nya yang selama ini terpendam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1999). *Ekonomi Politik Pembangunan*, Brawijaya University Press.
- Abdul Wahab, Solichin, *et al.* (2002). *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*, Penerbit SIC.
- AS Hikam, Muhammad. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*, Penerbit: LP3ES, Jakarta.
- Baswir, Revrison, *et. al.* (2003). *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit: ELSAM, Jakarta.
- Billah, M.M. (2000). *Perkembangan ORNOP di Indonesia, Bahan Seminar yang diselenggarakan oleh SMERU (Social Monitoring and Early Response Unit)*, Jakarta, 15 Agustus 2000.
- Blau, Peter M. & Meyer, Marshall W. (2000). *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit: Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Bryant, Coralie & Louis G.White. (1987). *Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang*, Penerbit: LP3ES, Jakarta.
- Budairi, Muhamad. (2002). *Masyarakat Sipil dan Demokrasi: Dialektika Negara dan LSM ditinjau dari Perspektif Hukum*, Penerbit: E-law Indonesia, Yogyakarta.
- Budiman, Arif. (1995). *Teori pembangunan Dunia Ketiga*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan, ed. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chambers, Robert. (1997). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Penerbit: LP3ES, Jakarta.
- Clark, John. (1995). *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, diterjemahkan oleh Godril Dibyo Yuwono, Judul Asli: *Democratizing Development The Role of Voluntary Organizations*, Penerbit: PT.Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. (2002). *Runtuhnya Teori pembangunan dan Globalisasi*, Penerbit: INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka pelajar, Yogyakarta.



Friedman, John. (1992). *Empowerment: The Politics and Alternative Development*, Blackwell Publisher, Cambridge, Massachusetts, 02142 USA.

Gaffar, Afan. (2002). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hagul, Peter. (1985). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta.

Hartiningsih, Maria. (2003). *Menggagas Organisasi Non Pemerintah Masa Depan*, Kompas, 22 Januari 2003.

Hettne, Bjorn. (2001). *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hidayat, Syarif, *et.al.* (2001). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (CBD)*, Penerbit: PT Pustaka Quantum, Jakarta.

NFID :International NGO Forum on Indonesian Development. (1993). *Pembangunan di Indonesia: Memandang Dari Sisi Lain*, penerbit: Yayasan Obor dan INFID, Jakarta.

Ismani. (1996). *Administrasi Negara, Birokrasi dan Etos Kerja*, Fakultas Ilmu Administrasi, Penerbit: IKIP Malang.

Juliantara, Dadang. (1998). *Meretas Jalan Demokrasi*, Penerbit :Kanisius, Yogyakarta.

Kartasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Penerbit: PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.

Kartasmita, Ginandjar. (1997). *Administrasi pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: LP3ES, Jakarta.

Koentjoroningrat. (1987). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Korten, DC dan Sjahrir. (1988). *Pengembangan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Korten, DC,. (1993). *Menuju Abad 21: Tindakan Suka Rela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Manning, Chris. (1990). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.



Mas'ood, Mohtar. (2003). Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mikkelsen, Britha. (1995). *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. Sage Publications Inc. Matheos Nalle (Penerjemah). 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit :PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mubyarto. (1994). *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Penerbit: Aditya Media, Yogyakarta.

Nugroho, Riant, D. (2001). *Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pranarka, dan Onny S. Prijono. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Prijono, Onny. (1996). *Organisasi Non Pemerintah (NGOs) Peran dan Pemberdayaannya*, CSIS, Jakarta.

Rasyid, M.Ryaas. (2002). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Penerbit: PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Robert, Bogdan and Steven J. Taylor. (1992). *Alih Bahasa Arief Furchan, Edisi I, Usaha Nasional, Introduction to Qualitative Research Methods*, Surabaya.

Saefuddin, Asep. *et al.* (2003). *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*, Penerbit: PT. Gramedia Puskata Utama, Jakarta.

Setiyono, Budi. (2002). *Jaring Birokrasi: Tinjauan dari aspek Politik dan Administrasi*, Penerbit: Gugus Press, Jakarta.

Siagian, Sondang. (2001). *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya*, Penerbit: Bumi Aksara.

Soetrisno, Loekman. (1995). *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat, Anggito Ambimanyu et al*, PAU - Se UGM Bersama BPFEUGM, Yogyakarta.

Strauss, Auselin dan Juliet Corbin. (1987). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, Disadur oleh H.M. Djunaidi Ghomi, Penerbit: PT. Bina Ilmu, Surabaya.



1303144

Sudarsono, Nani. (2000). *Pembangunan Berbasis Rakyat*, Penerbit: Yayasan Melati Bhakti Pertiwi, Jakarta.

Suharsini, Sumadi. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Penerbit Rineksa Cipta, Jakarta.

Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*, Penerbit: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, Yogyakarta.

Supriatna, Tjahya. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Penerbit: PT Rineksa Cipta, Jakarta.

Suwarsono. (2000). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Penerbit: LP3ES, Jakarta.

Suyanto, Bagong. (1995). *Perangkap Kemiskinan: Problem & Strategi Pengentasannya*, Penerbit: Airlangga University Press, Surabaya.

Swasono, Sri Edi. (1998). *Pendekatan Pemberantasan Kemiskinan*, Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi IKIP Malang, 25 Oktober 1998.

Syamsu, Ibnu. (1986). *Pengantar Studi Pembangunan*, Penerbit: Erlangga, Surabaya.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (2001). *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta.

Triyanto, Hery. (2001). *Intervensi LSM dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*; Hasil Penelitian yang dimuat di *Wacana* Volume 3 no. 1 Juli, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Universitas Brawijaya, Malang.

Usman, Sunyoto. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Wahyono, Ary, et al. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Penerbit: Media Pressindo, Yogyakarta.

Widjanarko, Agoes. (2001). *Konsep Pendekatan dan Strategi Pengembangan Pedesaan dalam Perspektif Kemandirian Lokal*, Lokakarya Proyek Perintisan Pengembangan Pedesaan, Jakarta Tanggal 14-15 Nopember 2001.

Yustika, Ahmad Eran. (2003). *Negara Vs Kaum Miskin*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zauhar, Soesilo. (2002). *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.

